KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL

Tahun 2018

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAMANGGUNG

Pemuka Adat Suku Dayak – Kalimantan Barat

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Edward U. P Nainggolan

(Kepala Kanwil DJPb Prov. Kalbar)

Ketua Tim

Bambang Sri Prastyono

(Kepala Bidang PPA II)

Editor

Hendrawan Karmonoharjo

Anggota Tim

Hery Mulyono

Bayu Budi Santosa

Luky Ardhana

Libra Andy Chandra Simamora

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat yang diberikan sehingga Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Provinsi Kalimantan Barat dapat menyusun dan menyelesaikan Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahun 2018.

KFR merupakan output pelaksanaan tugas Kanwil DJPBN yang memiliki fungsi pembinaan, koordinasi, supervisi, dan representasi Kementerian Keuangan di daerah selaku pengelola fiskal sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPBN.

KFR ini disusun berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 61/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Kajian Fiskal Regional yang diarahkan pada analisis fiskal dan makroekonomi untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal dan mendukung pencapaian fungsi alokasi, stabililasi, dan distribusi APBN sebagai bahan informasi untuk menyusun APBN/APBD sehingga dapat dievaluasi sejauh mana kebijakan fiskal pemerintah telah sesuai dengan tujuan makroekonomi.

Penyusunan KFR ini telah melalui proses pengumpulan data dan informasi dari berbagai pihak sehingga substansi KFR diharapkan telah memuat informasi kondisi fiskal Provinsi Kalimantan Barat yang komprehensif dan berguna kepada *stakeholders* regional Provinsi Kalimantan Barat. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung penyusunan KFR ini, terutama berkaitan dengan penyediaan data yang diperlukan.

Kami menyadari bahwa dalam KFR ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kami mohon kritik dan saran yang dapat digunakan untuk proses perbaikan dalam penyusunan KFR di masa yang akan datang.

Pontianak, Februari 2019
Kepala Kantor

Edward UP Nainggolan
NIP 19710314 199303 1 001

KAJIAN FISKAL REGIONAL

INDIKATOR PEMBANGUNAN

	TARGET	REALISASI
Pertumbuhan Ekonomi	5.94%	5.06%
Indeks Pembangunan Manusia	66.56%	N/A
Angka Kemiskinan	6.72%	7.37%
Inflasi	4.75%	3.13%
Angka Pengangguran	3.41%	4.26%

INDIKATOR FISKAL

CAPAIAN APBN

REALISASI PENDAPATAN
RP 6413,92 M (PAJAK)
RP 861,57 M (BUKAN PAJAK)

REALISASI BELANJA NEGARA
RP 29.654,81 M

CAPAIAN APBD

REALISASI PENDAPATAN
RP 3.909,03 M (PAD)
RP 19.854,33 M (TRANSFER)
RP 466,16 M (LAIN-LAIN)

REALISASI BELANJA DAERAH
RP 23.458,17 M

Provinsi Kalimantan Barat
PAD :2264M (126%)
Transfer:3462M (98%)
Belanja :4346M (80%)

Kota Singkawang
PAD : 130M (85%)
Transfer: 717M (99%)
Belanja : 846M (88%)

Kabupaten Sambas
PAD : 40M (19%)
Transfer: 1493M (99%)
Belanja : 1916M (75%)

Kabupaten Bengkayang
PAD : 30M (51%)
Transfer: 805M (91%)
Belanja : 783M (75%)

Kabupaten Landak
PAD : 80M (96%)
Transfer:1043M (125%)
Belanja :1054M (75%)

Kabupaten Sanggau
PAD : 114M (114%)
Transfer:1297M (122%)
Belanja : 1177M (71%)

Kabupaten Mempawah
PAD : 76M (97%)
Transfer: 927M (101%)
Belanja : 865M (80%)

Kabupaten Kapuas Hulu
PAD : 75M (112%)
Transfer:1580M (101%)
Belanja :1357M (82%)

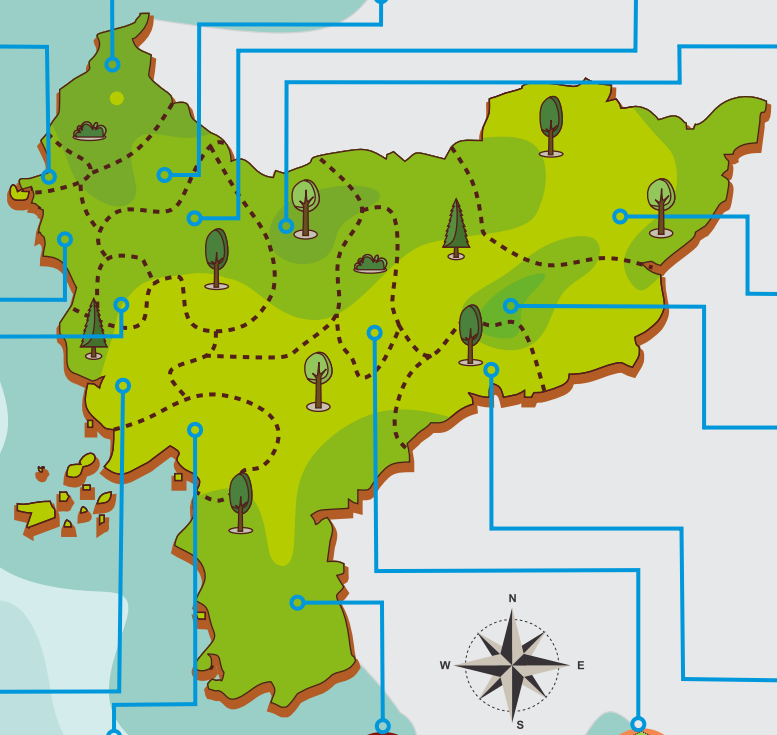

Kota Pontianak
PAD : 440M (91%)
Transfer: 1158M (106%)
Belanja :1622M (106%)

Kabupaten Sintang
PAD : 240M (135%)
Transfer: 1669M (99%)
Belanja :1428M (75%)

Kabupaten Kubu Raya
PAD : 164M (121%)
Transfer: 1309M (116%)
Belanja : 1258M (81%)

Kabupaten Kayong Utara
PAD : 26M (121%)
Transfer: 711M (116%)
Belanja : 623M (81%)

Kabupaten Ketapang
PAD : 127M (109%)
Transfer:1884M (102%)
Belanja : 1648M (84%)

Kabupaten Sekadau
PAD : 54M (98%)
Transfer: 798M (98%)
Belanja : 715M (77%)

Kabupaten Melawi
PAD : 41M (97%)
Transfer: 993M (139%)
Belanja : 759M (66%)

DAFTAR ISI

Lembar Judul i
Kata Pengantar ii
Tim Penyusun iii
Daftar Isi iv
Executive Summary vii
BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL 1
A. INDIKATOR MAKROEKONOMI FUNDAMENTAL 1
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 1
2. Suku bunga 8
3. Inflasi 9
4. Nilai tukar 10
B. INDIKATOR KESEJAHTERAAN 10
1. Indeks Pembangunan Manusia *(IPM)IHuman Development Index* (HDI) 10
2. Tingkat Kemiskinan 12
3. Ketimpangan *(Gini Ratio)* 13
4. Kondisi Ketenagakerjaan 14
C. EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI DAN PEMBANGUNAN REGIONAL 15
BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN DI TINGKAT REGIONAL 17
A. APBN TINGKAT PROVINSI 17
B. PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT PROVINSI 18
1. Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi 18
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi 20
C. BELANJA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT PROVINSI 22
1. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Organisasi (Bagian Anggaran Kementerian/ Lembaga) 23
2. Perkembangan pagu dan realisasi berdasarkan Fungsi 26
3. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja 27
4. Analisis Belanja Pemerintah Pusat 28
D. ANALISIS *CASH FLOW* PEMERINTAH PUSAT 30
E. TRANSFER KE DAERAH 31
F. PENGELOLAAN BLU PUSAT 34

1. Profil dan jenis layanan satker BLU pusat 34
2. Perkembangan pengelolaan aset, PNBP dan RM BLU pusat 36
3. Kemandirian BLU 38
4. Profil dan jenis layanan satker PNBP 39
5. Analisis Terkait Pengelolaan BLU 40
G. PENGELOLAAN MANAJEMEN INVESTASI PUSAT 43
1. Penerusan pinjaman 43
2. Kredit program 44
BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD.....47
A. APBD TINGKAT PROVINSI.....47
B. JENIS PENDAPATAN DALAM APBD.....48
C. JENIS BELANJA DALAM APBD 50
1. Rincian Belanja Daerah Berdasarkan klasifikasi urusan 50
2. Rincian Belanja Daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) 52
D. ANALISA BELANJA DAERAH 53
E. PENGELOLAAN BLU DAERAH.....54
1. Profil dan jenis layanan satker BLU daerah 54
2. Perkembangan pengelolaan aset, PNBP dan RM BLU daerah 55
3. Analisis legal 56
F. PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH 58
1. Bentuk Investasi Daerah 58
2. Profil dan jenis Badan Usaha Milik Daerah.....59
G. SILPA DAN PEMBIAYAAN 59
1. Perkembangan surplus/defisit APBD 59
2. Pembiayaan Daerah 60
H. CONTOH ANALISIS LAINNYA.....64
1. Analisis Horizontal dan Vertikal 64
2. Analisis Fiskal Daerah.....65
3. Analisis Kesehatan Pengelolaan Keuangan Daerah 66
BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) 69
BAB V KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SERTA TANTANGAN FISKAL REGIONAL.....78
A. KEUNGGULAN DAN POTENSI DAERAH.....78

B. TANTANGAN FISKAL REGIONAL 86
BAB VI ANALISIS TEMATIK.....90
BAB VII PENUTUP.....97
1. Kesimpulan 97
2. Rekomendasi 99
DAFTAR PUSTAKA viii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) pada tahun 2018 tercatat sebesar 5,06 persen. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 5,17 persen. PDRB mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 9,41 persen. Sedangkan pendapatan perkapita sebesar Rp.38,79 juta.

Struktur perekonomian yang menopang perekonomian Kalbar didominasi oleh 4 (empat) sektor lapangan usaha, yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (20,33 persen), Industri Pengolahan (16,08 persen), Perdagangan Besar-Eceran serta Reparasi Mobil-Sepeda Motor(14,09 persen) dan Konstruksi (12,50 persen).

Inflasi tahunan Kalbar pada tahun 2018 sebesar 3,99 persen atau meningkat dibanding periode yang sama pada tahun 2017 yang mencapai 3,83 persen, tetapi masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat inflasi secara nasional yang mencapai 3,13 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni 1,44 persen dan bulan Desember sebesar 1,28 persen. Kenaikan pada bulan-bulan tersebut disebabkan oleh kenaikan bahan makanan dan transportasi. Seiring dengan perayaan keagamaan Imlek dan Cap Go Meh, serta bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar termasuk kategori sedang, dan berada di bawah angka IPM Nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik, sampai dengan saat ini IPM Kalbar meningkat dari 65,88 di tahun 2016 menjadi 66,26 di tahun 2017. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat agar dapat memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan diantaranya pembangunan infrastruktur jalan serta sarana pendidikan dan kesehatan, sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk membangun dari pinggiran dan memperkuat daerah dan desa.

Jumlah penduduk miskin di Kalbar pada bulan September 2018 tercatat sebanyak 369.730 orang. Jumlah ini lebih rendah dari periode yang sama tahun 2017, dimana penduduk miskin mencapai 388.810 orang.

Gini Ratio (ketimpangan pemerataan pendapatan) Kalbar tahun 2018 sebesar 0,325 atau turun jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 0,329. *Koefisien Gini* berfluktuatif dari tahun ketahun, namun masih berada pada kisaran antara 0,3 hingga 0,4; dan masih dibawah *Koefisien Gini* Nasional. Hal ini menunjukkan distribusi pendapatan masyarakat dalam kategori sedang dan walaupun masih terdapat ketimpangan distribusi pendapatan.

Angkatan kerja tahun 2018 mencapai 2.451.000 orang, mengalami kenaikan sebesar 43.000 orang dari tahun 2017. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, 95,76 persen bekerja sedangkan sisanya sebesar 4,21 persen menganggur.

Realisasi penerimaan perpajakan di Kalimantan Barat tahun 2018 sebesar Rp6,82 triliun naik 13,32 persen jika dibandingkan penerimaan tahun sebelumnya. Penerimaan pajak dalam negeri memberikan kontribusi Rp6,41 triliun atau 94 persen sedangkan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp409,75 miliar atau 6 persen. Seiring dengan perekonomian yang tumbuh positif Pajak Pertambahan Nilai (PPn) merupakan penyumbang penerimaan yang terbesar yakni Rp3.05 triliun atau 47.59 persen, dan selanjutnya Pajak Penghasilan (PPh) yakni Rp3,02 triliun atau 47.15 persen. Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama tahun 2018 mencapai Rp861,57 miliar naik Rp240,36 miliar atau 38,69 persen dibanding penerimaan tahun sebelumnya. PNBP tersebut bersumber dari Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp474,26 miliar dan PNBP lainnya. Sebesar Rp387,30 miliar.

Dari sisi belanja negara, alokasi anggaran untuk Provinsi Kalimantan Barat TA 2018 yaitu sebesar Rp30,73 triliun yang terbagi dalam belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp11,13 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp19,60 triliun. Realisasi Belanja pemerintah pusat sebesar Rp10,36 triliun. Sedangkan untuk transfer ke Daerah dan dana desa terealisasi Rp19,28 triliun.

Selain penggunaan instrumen Dana Desa, Pemerintah pusat juga berupaya untuk mendorong laju perekonomian Kalimantan Barat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tahun 2018 penyaluran KUR mencapai sebesar Rp1.615,08 miliar dengan jumlah debitur 41.511 orang, yang terdiri dari debitur Usaha Mikro sebesar Rp712,88 miliar (34.623 debitur), Ritel sebesar Rp897,64 miliar (6.042 debitur), TKI sebesar Rp397,97 juta (6 debitur), dan Kredit Ultra Mikro (UMI) sebesar Rp4,15 miliar (817 debitur). Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan lembaga terbesar penyalur KUR yakni sebesar Rp797,47 miliar. Sebagian besar investasi didominasi oleh tiga sektor terbesar antara lain: sektor perdagangan besar dan eceran, sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, dan industri pengolahan.

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah seluruh wilayah Kalbar Tahun 2018 secara total meningkat dibandingkan dengan tahun 2017, realisasi pendapatan sebelumnya Rp23,216,40 miliar menjadi Rp23.458,17 miliar Sementara itu realisasi belanja mengalami kenaikan dari Rp23.140,82 miliar menjadi Rp23.458,17 miliar..

BAB I
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

TUGU KHATULISTIWA – KOTA PONTIANAK

BAB I

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. INDIKATOR MAKROEKONOMI FUNDAMENTAL

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 (ADHK) Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 sebesar Rp130,58 triliun, sedangkan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai sebesar Rp194,03 triliun dengan PDRB per kapita mencapai sebesar Rp38,79 juta. Sementara itu PDB Indonesia tahun 2018 mencapai Rp14.837,4 triliun dan kontribusi PDRB Provinsi Kalimantan Barat hanya sebesar 1,31 persen terhadap pembentukan PDB nasional.

Tabel.1
PDRB Atas Dasar Berlaku dan Harga Konstan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2018 (triliun rupiah)

No	PDRB	Tahun 2017				Tahunan	Tahun 2018				Tahunan
		I	II	III	IV	2017	I	II	III	IV	2018
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	42,92	42,49	45,62	46,44	177,47	46,92	46,43	49,86	50,95	194,03
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	30,58	29,81	31,69	32,22	124,31	32,15	31,36	33,28	33,85	130,58
3	Laju Pertumbuhan Kalbar	4,77	4,92	5,13	5,80	5,17	5,11	5,18	5,01	5,07	5,06
4	Laju Pertumbuhan Nasional	5,01	5,01	5,06	5,19	5,07	5,06	5,27	5,17	5,18	5,17

Sumber :data BPS Kalbar 2018 (diolah)

a. *Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)*

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 mengalami perlambatan yaitu hanya 5,06 persen apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,17 persen, dan lebih rendah jika dibandingkan dengan kinerja perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 5,17 persen hal ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan pada sektor konstruksi dan sektor informasi dan komunikasi.

Grafik I.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2018

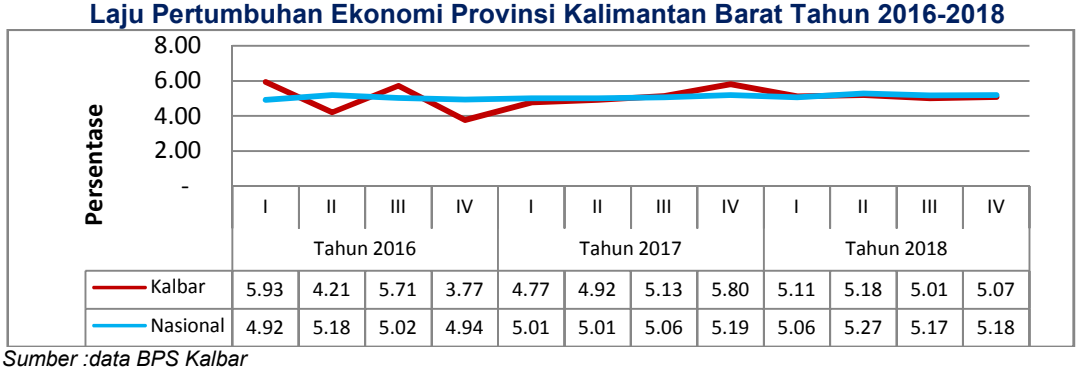

Sumber :data BPS Kalbar

Tren pertumbuhan ekonomi per-triwulanan Kalimantan Barat tahun 2018 relatif stabil dan sedikit tumbuh terutama pada triwulan II sebesar 5,18 persen seperti halnya pertumbuhan ekonomi nasional yang juga cenderung stabil mengalami peningkatan pada triwulan II yang mencapai 5,27 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV utamanya didorong oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,86 persen sedangkan sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai Komponen Pengeluaran LNRT sebesar 8,94 persen.

b. *Nominal PDRB*

PDRB Kalimantan Barat atas dasar harga yang berlaku tahun 2018 adalah sebesar Rp194,03 triliun atau naik 9,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya dimana pertumbuhan yang dominan adalah sektor pembentuk Jasa Keuangan dan Asuransi serta sektor Transportasi dan Pergudangan sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2018 adalah sebesar Rp130,58 triliun atau naik 4,72 persen dibandingkan tahun 2017.

1) *PDRB Sisi Permintaan*

Perkembangan PDRB dari sisi permintaan ADHK secara triwulanan pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan pada triwulan III dan IV, khusus untuk triwulan IV dibandingkan dengan triwulan sebelumnya terjadi peningkatan pada komponen impor sebesar 122,30 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 115,26 persen.

Tabel I.2
PDRB Sisi Permintaan Kalimantan Barat atas dasar Harga Konstan (ADHK)

No	Komponen	Tahun 2018 (triliun Rp)			
		I	II	III	IV
1	Konsumsi Rumah Tangga	16,87	17,43	17,58	17,77
2	Konsumsi LNRT	0,37	0,39	0,40	0,40
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,22	3,50	3,80	4,38
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,51	9,92	10,44	10,54
5	Perubahan Inventori	0,40	(0,60)	0,68	0,67
6	Ekspor	4,14	3,46	3,44	3,82
7	Impor	2,37	2,74	3,05	3,73
	PDRB	32,15	31,36	33,28	33,38

Sumber: data BPS Kalbar 2018 (diolah)

Laju pertumbuhan PDRB (ADHK) sisi permintaan selama tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.3
Laju Pertumbuhan PDRB Sisi Permintaan atas dasar Harga Konstan (ADHK)

No	Komponen	2017		2018	
		(triliun Rp)	(%)	(triliun Rp)	(%)
1	Konsumsi Rumah Tangga	65,90	4,56	69,65	5,64
2	Konsumsi LNPRT	1,43	12,45	1,56	9,68
3	Konsumsi Pemerintah	14,32	5,21	14,90	3,82
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	39,30	2,33	40,41	2,82
5	Perubahan Inventori	(0,04)	-	1,15	-
6	Ekspor Barang Jasa	14,34	43,65	14,86	3,66
7	Impor Barang dan Jasa	10,93	(1,97)	11,89	28,64
	PDRB	124,31	5,17	130,58	5,06

Sumber: data BPS Kalbar 2018 (diolah)

Laju pertumbuhan PDRB ADHK Kalimantan Barat 2018 yang tertinggi adalah komponen Impor Barang dan Jasa yaitu 28,64 persen dengan nominal kenaikan sebesar Rp0,96 triliun selanjutnya adalah Konsumsi LNRT sebesar 9,68 persen. Peningkatan impor barang dan jasa utamanya berasal dari kenaikan komoditas impor utama yaitu Bahan Bakar Mineral, Mesin-Mesin/Pesawat Mekanik dan Bahan Kimia An Organik.

Perkembangan PDRB dari sisi permintaan ADHB secara triwulanan tahun 2018 cenderung meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, kecuali triwulan II terjadi penurunan sebesar Rp 0,49 triliun.

Tabel I.4
PDRB Sisi Permintaan Kalimantan Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

No	Komponen	Tahun 2018 (triliun Rp)			
		I	II	III	IV
1	Konsumsi Rumah Tangga	25,67	26,01	26,01	27,09
2	Konsumsi LNRT	0,55	0,59	0,59	0,60
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,73	5,31	6,04	6,51
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	14,85	15,70	15,78	16,79
5	Perubahan Inventori	0,49	(0,54)	0,72	1,90
6	Ekspor	5,50	4,43	4,76	4,85
7	Impor	4,88	5,08	5,69	6,85
	PDRB	46,92	46,43	49,86	50,95

Sumber: data BPS Kalbar 2018 (diolah)

Distribusi PDRB (ADHB) sisi permintaan selama tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.5
Distribusi PDRB Sisi Permintaan Kalimantan Barat
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

No	Komponen	2017		2018	
		(triliun Rp)	(%)	(triliun Rp)	(%)
1	Konsumsi Rumah Tangga	96,51	54,38	104,78	54,36
2	Konsumsi LNPRT	2,05	1,15	2,33	1,22
3	Konsumsi Pemerintah	20,59	11,60	22,59	11,61
4	Modal Tetap Bruto	59,82	33,74	63,12	33,02
5	Perubahan Inventori	(0,37)	0,41	2,57	0,91
6	Ekspor Barang dan Jasa	15,99	7,96	19,54	10,09
7	(-) Impor Barang dan Jasa	18,23	5,81	22,50	11,01
	PDRB	177,47	100,00	194,03	100,00

Sumber: data BPS Kalbar 2018 (diolah)

PDRB (ADHB) Kalbar tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp16,69 triliun (9,41 persen) menjadi sebesar Rp194,03 triliun dibandingkan tahun 2017 .Konsumsi rumah tangga memiliki porsi hingga 54,36 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 33,02 persen dan konsumsi Pemerintah hanya sebesar 11,61 persen. Sebagai komponen utama PDRB, konsumsi rumah tangga meningkat sebesar Rp8,27 triliun (8,57 persen) seiring dengan membaiknya tingkat pendapatan per kapita masyarakat Kalimantan Barat meningkat menjadi sebesar 38,79 juta atau 7,1 persen dari tahun yang lalu, begitu juga kontribusinya mengalami kenaikan sebesar 1,08 persen.

a) Konsumsi

Laju pertumbuhan komponen mengalami peningkatan sebesar 1,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya, terutama dipengaruhi oleh pergeseran pola konsumsi masyarakat akibat perkembangan teknologi, yakni pergeseran jenis konsumsi masyarakat dari barang-barang konsumsi (makanan, minuman, barang-barang lainnya) kepada kebutuhan lainnya (jasa kesehatan/pendidikan/rekreasi).

Tabel I.6
Pengaruh Komponen Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB Kalbar 2016-2018

No.	Komponen	2016	2017	2018
1	Kontribusi Komponen terhadap PDRB Kalbar	54,58	54,38	54,36
2	Nilai Komponen ADHB (triliun Rp)	88,14	96,51	104,78
3	Nilai Komponen ADHK (triliun Rp)	63,05	65,90	69,65
4	Laju Pertumbuhan Komponen (%)	5,02	4,56	5,64

Sumber : data BPS Kalbar 2018 (diolah)

b) Investasi

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMBT) kontribusinya terhadap PDRB tahun 2018 adalah sebesar 33,02 persen, sementara itu secara nominal nilainya naik sebesar Rp3,30 triliun dan laju pertumbuhan komponen naik sebesar 0,49 persen dibandingkan dengan tahun 2017.

Tabel I.7
Pengaruh Komponen PMTB terhadap PDRB Kalimantan Barat 2016-2018

No	Komponen	2016	2017	2018
1	Kontribusi Komponen terhadap PDRB Kalbar (%)	34,15	33,71	33,02
2	Nilai Komponen ADHB (triliun Rp)	55,15	59,82	63,12
3	Nilai Komponen ADHK (triliun Rp)	38,40	39,30	40,41
4	Laju Pertumbuhan Komponen (%)	0,52	2,33	2,82

Sumber : data BPS Kalbar 2017 (diolah)

Dana Investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Luar Negeri (PMA) di Kalimantan Barat pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat tajam hanya sebesar Rp13,18 triliun menurun sebesar 33,97 persen dibandingkan dengan tahun 2018. Realisasi investasi PMDN dan PMA belum sesuai dengan target RPJMD Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan sebesar sebesar Rp19,51 triliun.

Sumber dana investasi tahun 2018 yang bersumber dari modal asing sebesar Rp6,59 triliun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp0,99 triliun, sedangkan realisasi investasi PMDN sebesar Rp6,59 triliun juga mengalami penurunan sebesar Rp5,79 triliun. Hal ini disebabkan adanya fluktuasi nilai tukar USD yang dipicu oleh kenaikan suku bunga AS dan penguatan US$ di pasar global, dan terjadinya negatif neraca perdagangan sedangkan sisi lain bahwa proyek-proyek strategis nasional di Kalimantan Barat sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga tambahan realisasi investasi tidak terlalu besar pada tahun 2018.

Grafik I.2
Perkembangan Investasi Kalimantan Barat Tahun 2016-2018

Sumber:BPMPTSP Prov. Kalbar

c) Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah pada tahun 2018 memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kalimantan Barat sebesar 11,61 persen meningkat dibanding tahun sebelumnya yakni 11,60 persen, dilihat secara nominal mengalami kenaikan sebesar Rp2,00 triliun. Laju pertumbuhan mengalami penurunan yaitu hanya sebesar 3,82 persen, kebijakan pemerintah yang cenderung meningkatkan Belanja Negara hingga sekitar 5,30 persen dan juga transfer ke daerah khususnya Dana Desa sekitar 4,88 persen, maka Pemda diharapkan semakin kreatif dalam menentukan kebijakan yang tepat untuk pembangunan di daerah dalam rangka stabilitas pertumbuhan ekonominya.

Tabel I.8
Pengaruh Komponen Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB Kalbar 2016-2018

No	Komponen	2016	2017	2018
1	Kontribusi Komponen terhadap PDRB Kalbar (%)	11,92	11,6	11,61
2	Nilai Komponen ADHB (triliun Rp)	19,24	20,59	22,59
3	Nilai Komponen ADHK (triliun Rp)	13,55	14,32	14,90
4	Laju Pertumbuhan Komponen (%)	-7,68	5,21	3,82

Sumber : data BPS Kalbar 2018 (diolah)

d). Ekspor dan Impor

Kontribusi ekspor terhadap perekonomian Kalimantan Barat tahun 2018 sebesar 10,09 persen mengalami kenaikan 2,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya, secara nominal terjadi kenaikan sebesar Rp3,33 triliun namun laju pertumbuhan komponen mengalami kontraksi tajam sebesar 39,99 persen dibandingkan tahun 2017.

Tabel I.9
Pengaruh Komponen Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Kalbar 2016-2018

No	Komponen	2016	2017	2018
1	Nilai Kontribusi Terhadap PDRB Kalbar (%)	6,90	7,96	10,09
2	Nilai Komponen ADHB (triliun Rp)	11,14	15,99	19,54
3	Nilai Komponen ADHK (triliun Rp)	10,66	14,34	14,86
4	Laju Pertumbuhan Komponen (%)	12,48	43,65	3,66

Sumber : data BPS Kalbar 2018 (diolah)

Kinerja ekspor Kalimantan Barat tahun 2018 mencapai US$1.000,96 juta mengalami kenaikan US$179,66 juta dibandingkan dengan tahun 2017, seiring dengan membaiknya harga minyak mentah maka harga CPO dan karet ikut membaik, hal ini berpengaruh terhadap peningkatan volume dan nilai ekspor yang CPO dan karet yang berimbas pada perekonomi Kalbar.

Komoditas ekspor utama adalah Bahan Kimia Anorganik mencapai US$457,69 juta selanjutnya Biji, Kerak, dan Abu Logam sebesar US$253,55 juta dengan negara tujuan ekspor utama yaitu Tiongkok sebesar US$308,53, Malaysia sebesar US$238,04 dan India sebesar US$145,35

Kontribusi impor terhadap perekonomian Kalimantan Barat tahun 2018 sebesar 11,01 persen mengalami kenaikan 5,20 persen dibandingkan tahun sebelumnya, secara nominal terjadi kenaikan sebesar Rp4,27 triliun demikian juga laju pertumbuhan komponen mengalami kenaikan mencapai 28,64 persen atau tumbuh 30,61 persen dibandingkan tahun 2017, peningkatan kebutuhan impor utamanya didukung oleh besarnya permintaan barang dan bahan baku untuk mendukung kegiatan industri pengolahan.

Tabel I.10
Pengaruh Komponen Impor Barang dan Jasa terhadap PDRB Kalimantan Barat Tahun 2016-2018

No	Komponen	2016	2017	2018
1	Nilai Kontribusi Terhadap PDRB Kalbar (%)	9,49	5,81	11,01
2	Nilai Komponen ADHB (triliun Rp)	15,32	18,23	22,50
3	Nilai Komponen ADHK (triliun Rp)	9,85	10,93	11,89
4	Laju Pertumbuhan Komponen (%)	(21,89)	-1,97	28,64

Sumber : data BPS Kalbar 2017 (diolah)

Impor Kalimantan Barat tahun 2018 sebesar US$463,07 juta naik US$194 juta dibandingkan dengan tahun 2017, komoditas impor utama adalah Bahan Bakar Mineral sebesar US$224,73 juta, Mesin-Mesin/Pesawat Mekanik sebesar US$59,41 juta dan Bahan Kimia An Organik sebesar US$35,285 juta. Adapun impor berasal dari negara Malaysia sebesar US$144,55 juta, Tiongkok sebesar US$141,58 juta dan Singapura US$124,17 juta

Perekonomian Kalimantan Barat selama tahun 2018 menunjukan perkembangan yang signifikan dalam konteks neraca perdagangan dengan surplus sebesar US$537,89 juta namun lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang mengalami surplus sebesar US$558,23.

c. PDRB per kapita

PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 (ADHB) mencapai Rp38,79 juta terjadi peningkatan sebesar 7,81 persen dibandingkan tahun 2017, namun masih jauh dibawah PDB per kapita nasional yaitu sebesar Rp56,00 juta. Peningkatan PDRB per kapita tersebut ternyata belum dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat karena masih terdapat beberapa masyarakat

yang berada dibawah garis kemiskinan hal ini ditunjukan oleh koefisien gini rasio Kalimantan Barat 2018 sebesar 0,325 yang menunjukan terjadinya ketimpangan pendapatan masyarakat

Tabel I.11
PDRB Per Kapita Kalimantan Barat Tahun 2016-2018

PDRB Per Kapita Kalimantan Barat			
Tahun 2016-2018			
Uraian	2016	2017	2018
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku			
Nilai (Juta Rupiah)	33,19	35,98	38,79
Nilai (US $)	2.494,72	2.689,29	2.619,53

Sumber: Berita Resmi Statistik Kalimantan Barat tahun 2018 (diolah)

2. Suku Bunga

Berdasarkan sumber data Bank Indonesia periode Januari 2018 s.d Mei 2018 *BI Rate* berada pada level 4,25 – 4,75 persen kemudian bulan Juni sd Oktober naik pada level 5,25 – 5,75 persen selanjutnya pada bulan Oktober s.d Desember 2018 meningkat hingga level 6,00 persen. Tren peningkatan BI Rate tersebut merupakan antisipasi terhadap kondisi perekonomian nasional yang masih mengalami stagnan oleh karena itu kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate selain akan berdampak menjaga defisit transaksi berjalan tetap di bawah 3 persen, juga mampu menahan arus keluar modal asing dan menghimpun kembali dana masyarakat untuk mengurangi defisit, serta menjaga nilai tukar rupiah karena investor asing akan tertarik untuk menaruh modalnya di Indonesia.

Grafik I.3
BI Rate Tahun 2018

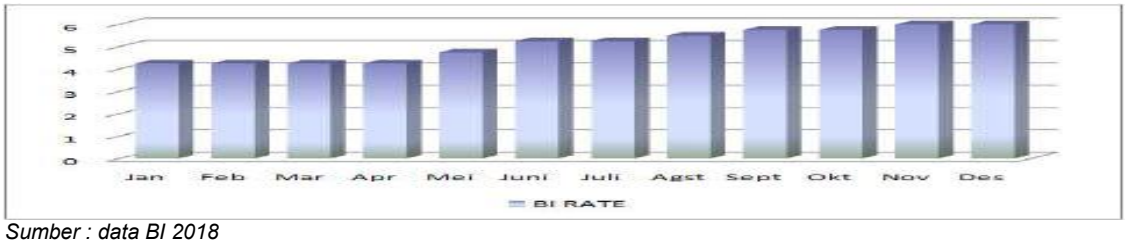

Sumber : data BI 2018

3. Inflasi

Secara umum laju inflasi Kalimantan Barat tahun 2018 adalah 3,99 persen diatas laju inflasi nasional yaitu 3,13 persen, laju inflasi tahun 2018 ini lebih rendah dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yaitu 3,83 persen (tahun 2017) dan 3,88 persen (tahun 2016).

Grafik I.4
Inflasi Kalimantan Barat dan Nasional (yoy) 2016-2018

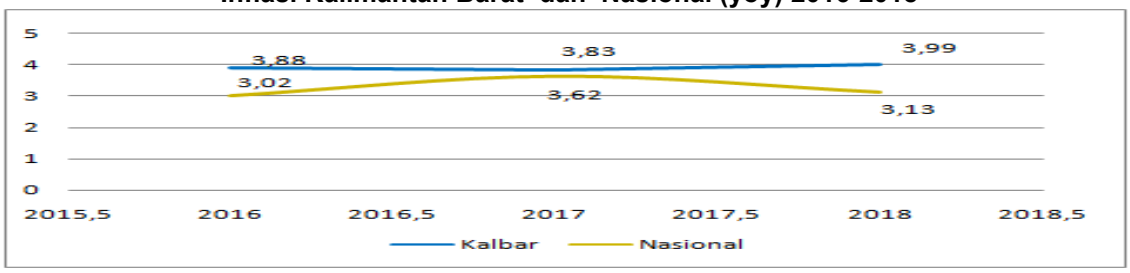

Sumber: Berita Resmi Statistik Kalimantan Barat, BPS

Sepanjang tahun 2018 tingkat Inflasi bulanan Kalimantan Barat relatif lebih tinggi dari inflasi nasional kecuali bulan Januari dan Agustus lebih rendah dari inflasi nasional. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar 1,44 persen dan Desember mencapai 1,28 persen terutama dipicu oleh peningkatan tarif angkutan udara pada akhir tahun sebagaimana pola historisnya sebagai dampak peningkatan jumlah penumpang, adapun kenaikan harga komoditas bahan makanan antara lain disumbang oleh daging ayam ras dan telur ayam ras. Kenaikan harga kedua komoditas ini lebih dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan, di tengah pasokan yang relatif normal. Terdapat beberapa risiko inflasi yang perlu diperhatikan yaitu relatif tingginya tarif angkutan udara menjelang akhir masa liburan sekolah, serta ekstremnya kondisi cuaca yang dapat menghambat pasokan bahan makanan, pergerakan inflasi bulanan seperti pada tabel dibawah ini :

Grafik I.5
Laju Inflasi bulanan dan tahunan Kalimantan Barat dan Nasional (yoy) 2017-2018

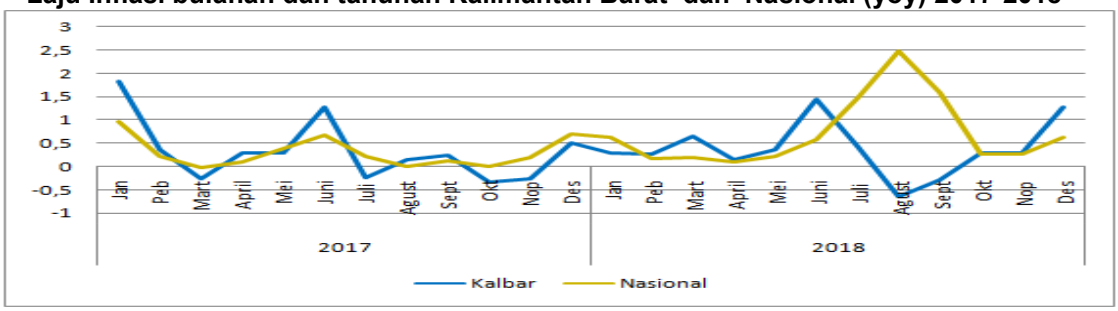

Sumber: Berita Resmi Statistik Kalimantan Barat, BPS tahun 2018 (diolah)

Terkendalinya laju inflasi tidak terlepas dari keberadaan forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalbar yang dibentuk sebagai wadah koordinasi guna menjaga kestabilan dan keterjangkauan harga di seluruh wilayah Provinsi Kalbar. Sampai dengan tahun 2018 di Kalimantan Barat telah terbentuk 15 TPID dan juga telah diluncurkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Enggang tingkat Provinsi dan GENCIL Kota Pontianak secara online guna memudahkan masyarakat

mengetahui informasi harga pangan di berbagai pasar di kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

4. Nilai Tukar

Menurut data Bank Indonesia (berdasarkan kurs tengah bulanan) nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS bergerak melemah, puncaknya pada bulan Oktober 2018 dan selanjutnya terjadi koreksi pada akhir tahun (November dan Desember) berangsur-angsur kembali menunjukan perbaikan.

Grafik I.6
Nilai Tukar US Dolar Terhadap Rupiah Tahun 2018

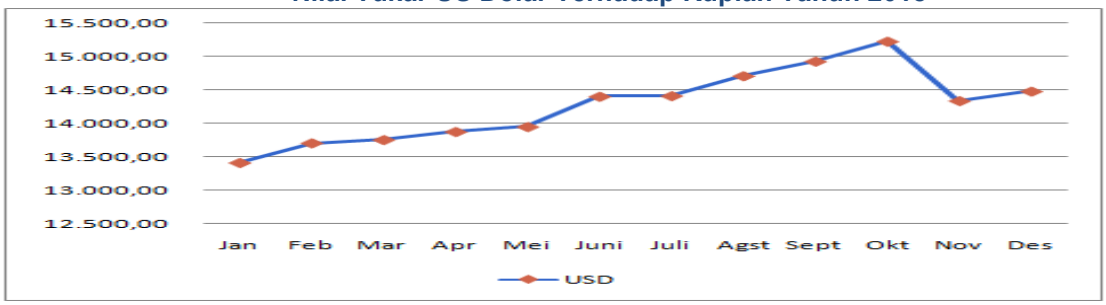

Sumber: data BI 2018

Pergerakan nilai tukar rupiah pada awal tahun 2018 melemah pada angka Rp13.413,- per *US Dollar* dan terus menunjukan pelemahan sampai dengan bulan Oktober hingga menyentuh pada level Rp15.227,- per *US Dollar*, namun kembali menguat pada akhir tahun 2018 pada Rp14.339,-per *US Dollar.* Pelemahan nilai tukar Rupiah ini disebabkan oleh kondisi ekonomi global dari pada dalam negeri, situasi ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian AS terkait kenaikan suku bunga acuan The Fed Fun Rate sebanyak dua kali di tahun 2018.

Untuk melindungi fundamental ekonomi domestik, pemerintah mengambil beberapa keputusan atau kebijakan salah satunya adalah upaya menyelamatkan defisit neraca perdagangan dengan cara mengurangi impor agar rupiah bisa kembali terdongkrak. Adapun kebijakan tersebut berupa penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) barang impor.

B. INDIKATOR KESEJAHTERAAN

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index* (HDI)

IPM Provinsi Kalimantan Barat termasuk kategori sedang, terjadi peningkatan dari 65,88 pada tahun 2016 menjadi 66,26 tahun 2017 namun berada di bawah IPM Nasional 70,81 dan berada pada urutan ke-30 dari 34 Provinsi.

Grafik I.7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2012 s.d. 2017

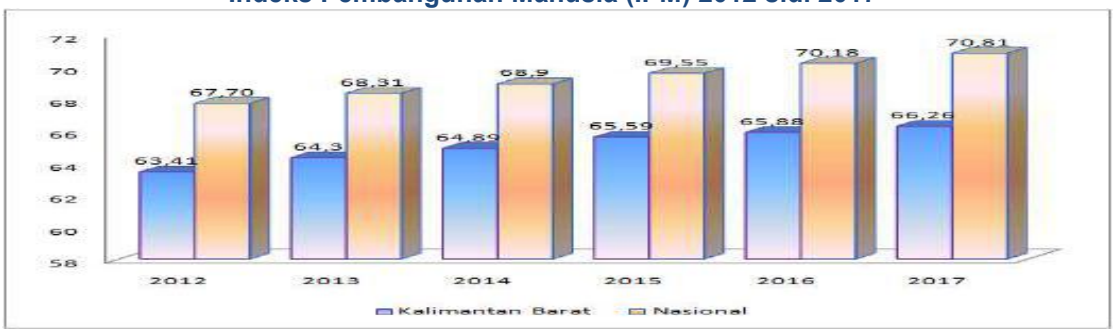

Sumber: Kalimantan Barat dalam Angka 2018, BPS

Rendahnya IPM Kalimantan Barat jika dibandingkan dengan IPM provinsi lain karena keterbatasan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.

Tabel I.12
Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2015 s.d. 2017

No	Keterangan	2015	2016	2017
1	Angka harapan hidup (tahun)	69,87	69,90	69,92
2	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	6,93	6,98	7,05
3	Pengeluaran per Kapita Rp (000) Disesuaikan	8.279	8.348	8.472
4	IPM (indek)	65,59	65,88	66,26
5	Peringkat IPM	28	29	30

Sumber: Kalimantan Barat dalam Angka 2018, BPS

Pembangunan Manusia Kalimantan Barat pada tahun 2017 terus mengalami kemajuan hal ini disebabkan telah berhasil meningkatan 3 aspek esensial diantaranya angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Pada periode tahun 2017 terdapat 3 (tiga) kab/kota dengan pembangunan manusia yang paling cepat yaitu Kab. Sambas (1,51 persen), Kab. Ketapang (1,50 persen), dan Kab. Kubu Raya (1,17 persen) hal tersebut didorong oleh meningkatnya dimensi pendidikan di wilayah tersebut. sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel I.13
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalbar dan Kabupaten/kota 2014-2017

No.	Kab/Kota	2014	2015	2016	2017
1	Sambas	63,28	64,14	64,94	65,92
2	Bengkayang	64,4	64,65	65,45	65,99
3	Landak	63,59	64,12	64,58	64,93
4	Pontianak	62,78	63,37	63,84	64,00
5	Sanggau	62,06	63,05	63,9	64,61
6	Ketapang	63,27	64,03	64,74	65,71

No.	Kab/Kota	2014	2015	2016	2017
7	Sintang	63,19	64,18	64,78	65,15
8	Kapuas Hulu	62,90	63,73	63,83	64,18
9	Sekadau	61,98	62,34	62,52	63,04
10	Melawai	62,89	63,78	64,25	64,43
11	Kayong Utara	58,52	60,09	60,87	61,52
12	Kubu Raya	64,52	65,02	65,54	66,31
13	Kota Pontianak	76,63	77,52	77,63	77,93
14	Kota Singkawang	69,84	70,03	70,1	70,25
15	KALIMANTAN BARAT	64,89	65,59	65,88	66,26

Sumber: Berita Resmi Statistik Kalimantan Barat tahun 2018 BPS

Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengalokasikan Dana Transfer khususnya DAK Fisik dan Dana Desa yang diharapkan penggunaan dan hasil program pembangunannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Tingkat Kemiskinan

Penurunan terjadi karena penduduk miskin di pedesaan berkurang sebanyak 5.160 orang, sedangkan penduduk miskin di perkotaan berkurang sebanyak 12.190 orang, hal ini menunjukan kemampuan perekonomian masyarakat pedesaan mulai membaik.

Grafik I.8
Jumlah Penduduk Miskin

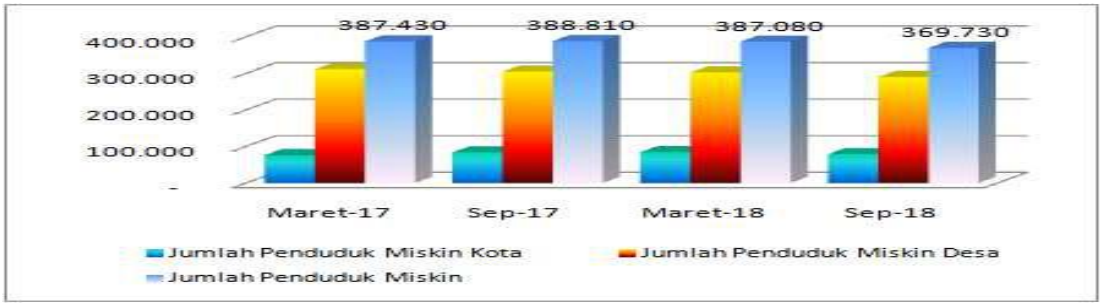

Sumber: Berita Resmi Statistik Kalimantan Barat, BPS

Adapun tingkat kemiskinan Kalimantan Barat bulan September 2018 sebesar 7,37 persen menurun jika dibandingkan dengan Maret 2018 sebesar 7,77 persen, namun masih di bawah tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,66 persen sebagaimana tabel berikut :

Grafik I.9
Tingkat Kemiskinan

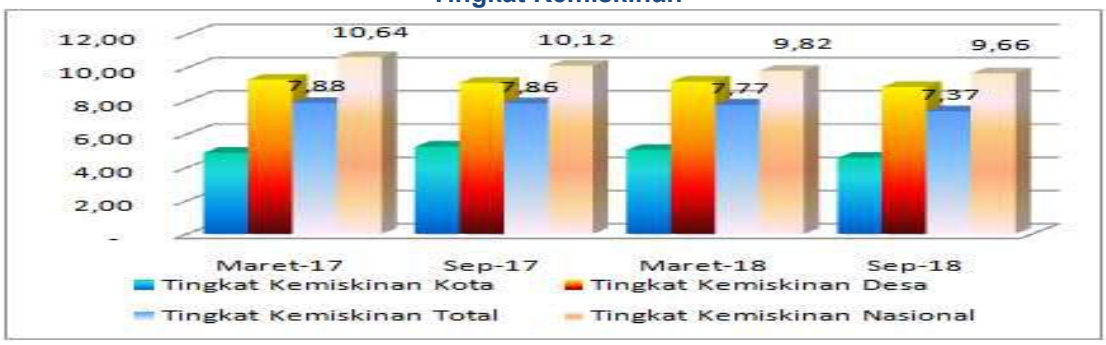

Sumber: Berita Resmi Statistik Kalimantan Barat, BPS

Garis kemiskinan Kalimantan Barat cenderung meningkat setiap periode, pada bulan September 2018 sebesar Rp420.831 per kapita/bulan meningkat Rp11.546 dibandingkan bulan Maret 2018 sebesar Rp409.287. Garis Kemiskinan Makanan memiliki peranan 77,97 persen, sedangkan selebihnya 22,03 persen adalah Garis Kemiskinan Bukan Makanan. Apabila dilihat secara regional Kalimantan Garis Kemiskinan Kalbar adalah yang terendah yaitu sebesar Rp420.831,- per kapita/bulan sementara itu yang tertinggi adalah Kalimantan Utara sebesar Rp620.501,- perkapita/bulan sementara itu nasional adalah sebesar Rp410.670,- perkapita/bulan

3. Ketimpangan (*Gini Ratio*)

Gini Rasio Kalimantan Barat periode September 2018 sebesar 0,325 lebih baik apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yaitu 0,329. Dan masih lebih baik dari pada distribusi pendapatan secara Nasional (0,384). Ketimpangan pendapatan terjadi karena perbedaan kepemilikan sumber daya dan faktor produksi sehingga pihak-pihak yang memiliki faktor produksi akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak.

Grafik I.10
Koefisien Gini Rasio Kalimantan Barat Tahun 2017-2018

Sumber: Berita Resmi Statistik Kalimantan Barat, BPS

Pemerintah memiliki peranan penting dalam melakukan distribusi pendapatan melalui kebijakan fiskal. Usaha yang dapat dilakukan adalah meratakan kepemilikan faktor produksi dengan menetapkan pajak progresif atas

pendapatan dan kekayaan masyarakat berpenghasilan tinggi, sedangkan masyarakat berpenghasilan rendah dapat diberikan kredit lunak sebagai modal usaha, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan, pelatihan, dan peningkatan layanan kesehatan.

4. Kondisi Ketenagakerjaan

Angkatan kerja Kalimantan Barat tahun 2018 mencapai 2.451 ribu orang, meningkat 43 ribu orang dibandingkan tahun 2017. Dari jumlah tersebut, 95,76 persen bekerja sedangkan 4,24 persen menganggur. Kenaikan angkatan kerja pada tahun 2018 belum sepenuhnya terserap pada lapangan kerja yang tersedia. sebagaimana grafik berikut ini:

Grafik I.11
Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2018

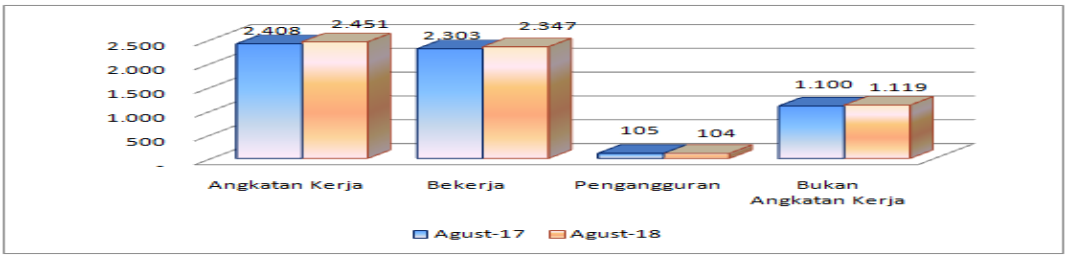

Sumber: Berita Resmi Statistik Kalimantan Barat 2018, BPS

Persentase penduduk di atas 15 tahun sebagian besar bekerja pada sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan (50,94 persen), selanjutnya sektor Perdagangan dan sektor Rumah Makan dan Jasa Akomodasi (16,11 persen). Struktur lapangan pekerjaan secara umum mengalami perubahan, jika dilihat kondisi bulan Agustus 2018 dari 9 (sembilan) sektor terdapat 8 (delapan) sektor mengalami peningkatan diantaranya yang tertinggi dalam penyerapan tenaga kerja adalah sektor Industri sebesar 18.982 ribu orang dan Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi sebesar 15.875 ribu orang, sementara itu yang mengalami penurunan adalah sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan 13.632 ribu orang.

Tabel I.14
Prosentase Penduduk > 15 Tahun Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2018

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama (Jiwa)					Persentase
		2014	**2015**	2016	2017	2018	
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	1.285.973	1.292.542	1.113.000	1.192.196	1.195.545	0,28%
2	Pertambangan dan Penggalian	84.622	37.312	51.000	35.799	36.230	1,20%
3	Industri	81.591	86.893	125.000	127.325	146.307	14,91%
4	Listrik, Gas dan Air	5.454	4.127	5.000	9.612	9.883	2,82%
5	Konstruksi	118.559	104.753	144.000	144.758	151.211	4,46%
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	311.441	351.887	412.000	362.134	378.009	4,38%
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	50.975	55.686	68.000	66.982	76.523	14,24%
8	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	34.960	34.874	50.000	41.164	43.577	5,86%
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	252.935	267.813	321.000	323.228	309.596	-4,22%
	Total	2.226.510	2.235.887	2.289.000	2.303.198	2.346.881	1,90%

Sumber: Berita Resmi Statistik Kalimantan Barat, BPS

Salah satu indikator penting dalam ketenagakerjaan adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Keraja). Yaitu rasio dalam persen antara jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun). TPAK Kalimantan Barat periode Agustus 2018 sebesar 68,65 persen dan jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 69 persen, amangka tersebut adanya kenaikan. Indikator lain yang cukup penting adalah TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) yaitu rasio dalam persen antara jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Angka TPT Kalimantan Barat sebesar 4,26 persen atau turun 0,10 persen terhadap periode Agustus 2017 sebesar 4,36 persen. Kondisi ini menunjukan ke arah perbaikan, namun tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penduduk usia kerja yang bukan merupakan angkatan kerja.

C. EFFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI DAN PEMBANGUNAN REGIONAL

Pemda Provinsi Kalimantan Barat melalui RPJMD 2013 – 2018 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) telah menetapkan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Makro melalui penetapan serangkaian sasaran indikator makro pembangunan perekonomian Kalimantan Barat.

Prospek pembangunan ekonomi Kalimantan Barat diharapkan selalu mengalami pertumbuhan dalam arti luas dan berkualitas, yaitu:

1) Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong mengatasi kesenjangan seperti kesenjangan antar wilayah (kabupaten/kota) dan kesenjangan antar sektor pembangunan.
2) Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong pengurangan Angka Kemiskinan.
3) Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong membuka kesempatan kerja sekaligus upaya Pengurangan Angka Pengangguran.

Tabel I.15
Perkembangan Capaian Indikator Sasaran Ekonomi Kalbar Tahun 2018

No	INDIKATOR	TARGET 2016	REALISASI 2016	TARGET 2017	REALISASI 2017	TARGET 2018	REALISASI 2018
1	Angka Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,97	5,22	5,12	5,17	5,94	5,06
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,71	65,88	67,17	66,26	66,56	n.a
3	Angka Kemiskinan (%)	8,24	7,88	8,00	7,88	6,72	7,37
4	Angka Pengangguran (%)	4,66	4,58	4,63	4,36	3,41	4,26

Sumber : RKPD Prov. Kalimantan Barat Tahun 2018 dan BPS Kalbar (diolah)

a). Asumsi dasar penetapan sasaran pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2018 adalah peningkatan investasi sehingga sektor riil semakin tumbuh dan berkembang termasuk peran pemerintah dalam mendorong Pembentukan Modal tetap Bruto melalui pembangunan proyek infrastruktur dan selanjutnya adalah upaya peningkatan berbagai komoditas utama ekspor menjadi fokus utama paska larangan ekspor hasil tambang mentah, selanjutnya pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,94 persen.

Berdasarkan data dari BPS maka laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tahun 2018 adalah sebesar 5,06 persen lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 5,94 persen, capaian ini bertolak belakang dengan capaian tahun 2017 yang berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa dalam menentukan target didalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) belum sesuai asumsi dasar, dalam hal ini yang perlu mendapat perhatian adalah kemungkinan dari pergerakan harga komoditas utama Kalbar yaitu produk karet dan CPO

b) Pencapaian sasaran indikator makro pembangunan perekonomian Kalimantan Barat tahun 2018 secara umum belum mencapai target yang telah disepakati. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemda Prov Kalbar dalam menentukan target pencapaian makro ekonomi hendaknya berdasarkan pertimbangan yang realistis serta berupaya menggali potensi ekonomi demi pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB II

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN DI TINGKAT REGIONAL

Pelabuhan Pontianak

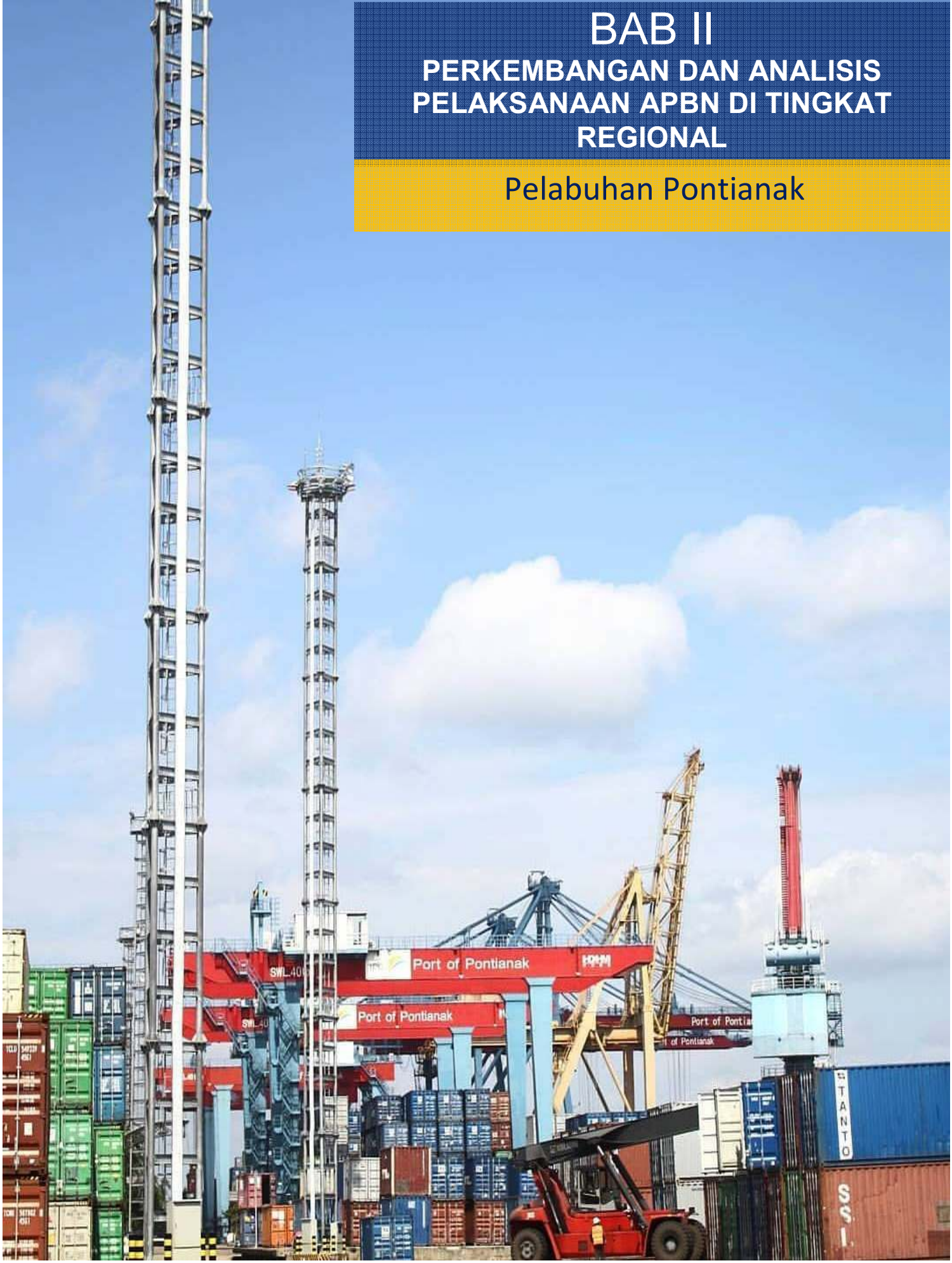

BAB II
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN DI TINGKAT REGIONAL

A. APBN TINGKAT PROVINSI

Untuk mendukung tercapainya program pembangunan tahun 2018, Provinsi Kalimantan Barat memperoleh alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp11,13 triliun atau meningkat 19,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan alokasi belanja transfer ke daerah sebesar Rp20,63 triliun, turun 4,96 persen dibanding alokasi tahun 2017.

Tabel II.1
Alokasi Dana APBN pada Prov. Kalimantan Barat TA 2017-2018 (Miliar rupiah)

Uraian	Pagu Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017		Pagu Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	%
Pendapatan Negara	7,295.20	6,788.68	93%	8.632,61	8.234,35	95%
a. Pendapatan Perpajakan	6,730.56	6,021.38	89%	7,628.42	6,823.67	89%
- Pajak dalam negeri	6,677.22	5,877.90	88%	7,302.89	6,413.92	88%
- Pajak perdagangan internasional	53.34	143.48	269%	325,53	409,75	126%
b. PNBP	354.44	621.21	175%	455.08	861.57	189%
c. Hibah	146.09	146.09	100%	549,11	549,11	100
Belanja Negara	29.926,00	28.240,53	94%	30.739,21	29.654,81	96%
Belanja Pemerintah Pusat	9.293,92	8.768,36	94%	11,131.42	10,366.01	93%
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	20,632.08	19,472.17	94%	19.607,79	19.288,80	98%

Sumber: OMSPAN, Monev Pa, Mebe (diolah)

Dari data diatas dapat diketahui pendapatan negara terealisasi Rp8,23 triliun atau 95 persen dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat 1,44 triliun atau 21,30 persen dibanding pendapatan tahun 2017. Penerimaan perpajakan masih menjadi sumber utama pendapatan negara dengan kontribusi sebesar 82,87 persen. Realisasi pajak tahun 2018 sebesar Rp6,82 triliun terdiri pajak dalam negeri sebesar Rp6,41 triliun dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp409,75 miliar.

Dari sisi belanja negara, alokasi anggaran untuk Provinsi Kalimantan Barat TA 2018 yaitu sebesar Rp30,73 triliun yang terbagi dalam belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp11,13 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp19,60 triliun. Realisasi Belanja pemerintah pusat sebesar Rp10,36 triliun. Sedangkan untuk transfer ke Daerah dan dana desa terealisasi Rp19,28 triliun.

B. PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT PROVINSI

Pendapatan pemerintah pusat yang dihimpun di Provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

1. Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi

Salah satu sumber penerimaan negara terbesar berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan adalah penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Tabel II.2
Penerimaan Pajak Dalam Negeri di Kalimantan Barat Tahun 2018

(miliar Rp)

No	Pendapatan Perpajakan	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018
	Pajak Dalam Negeri	6,677.22	5,877.90	7,302.89	6,413.92
1	Pajak Penghasilan (PPh)	3,599.87	2,641.20	3,737.69	3,024.13
2	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	2,799.34	2,924.66	3,283,96	3,052.61
3	Pajak Bumi Bangunan (PBB)	194.70	237.46	166,06	252,58
4	Pajak lainnya	72.95	71.02	106,38	74,23
5	Cukai	10.36	3.56	8,80	10,37
	Pajak Perdagangan Internasional	53.34	143.48	325,53	409,75
6	Bea Masuk	50.65	39.36	32,89	38,65
7	Bea Keluar	2.69	104.12	292,64	371,10
	Total Perpajakan	6,730.56	6,021.38	7,628.42	6,823.67

Sumber:SPAN (diolah)

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa total realisasi penerimaan perpajakan di Kalimantan Barat tahun 2018 sebesar Rp6,82 triliun naik 13,32 persen jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2017. Dari total penerimaan perpajakan tahun 2018 tersebut pajak dalam negeri memberikan kontribusi sebesar 94 persen sedangkan pajak perdagangan internasional sebesar 6,0 persen. Untuk penerimaan Pajak Dalam Negeri tahun 2018 sebesar Rp6,41 triliun mengalami kenaikan Rp536,02 miliar atau 9.12 persen jika dibandingkan penerimaan tahun sebelumnya. Seiring dengan perekonomian yang tumbuh positif Pajak Pertambahan Nilai (PPn) merupakan penyumbang penerimaan yang terbesar yakni Rp3.05 triliun atau 47.59 persen, dan selanjutnya Pajak Penghasilan (PPh) yakni Rp3,02 triliun atau 47.15 persen

Meskipun secara nominal terjadi peningkatan penerimaan pajak di Kalimantan Barat namun ada beberapa hambatan/tantangan pencapaian target penerimaan antara

lain adanya ketentuan dibidang pertambangan tentang larangan ekspor mineral mentah sehingga berpengaruh terhadap omset perusahaan di bidang pertambangan dan sektor pendukungnya, penurunan harga sawit yang berpengaruh pada omset dan laba perusahaan di sektor perkebunan dan industri pengolahan serta penurunan produksi karet olahan dikarenakan sulitnya memperolah pasokan karet mentah yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan industri.

Realisasi pajak perdagangan internasional meningkat signifikan 186 persen dibanding realisasi tahun 2017. Kenaikan tersebut salah satunya merupakan imbas positif kenaikan kinerja ekspor komoditas alumina dengan tujuan utama ekspor ke Malaysia dan India.

Jika diurai berdasarkan lokasi, penerimaan pajak paling banyak disumbangkan oleh Kota Pontianak sebagai pusat aktivitas perdagangan dan jasa dengan kontribusi penerimaan sebesar 43 persen dari total penerimaan pajak di Provinsi Kalimantan, kemudian Kab. Ketapang yang didukung dengan keberadaan kawasan industri Ketapang memberikan kontribusi penerimaan terbesar kedua sebesar 11 persen. Sedangkan daerah dengan kontribusi penerimaan pajak terkecil adalah Kab. Kayong Utara dengan kontribusi sebesar 1,14 persen dari total realisasi tahun 2018.

Grafik II.1
Penerimaan Pajak Dalam Negeri per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2018
(miliar Rp)

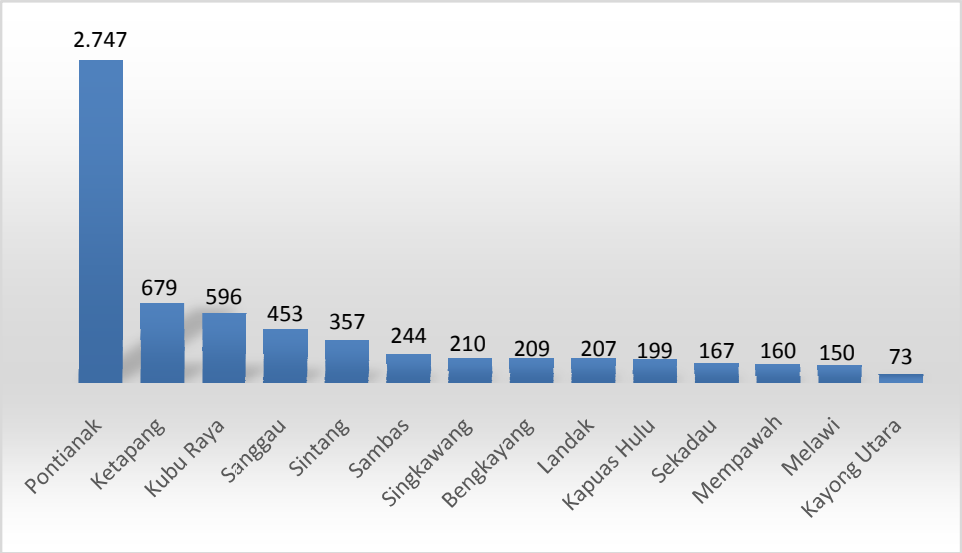

Sumber : Kanwil Pajak Prov. Kalbar

Untuk melihat kinerja perpajakan selain dari total realisasi pajak juga dilhat dari perkembangan PDRB daerah tersebut, hal ini terwujud dalam tax ratio.

Tabel II.3
Perkembangan Tax Ratio Prov. Kalbar

Tahun	PDRB ADHB (miliar Rp)	Penerimaan Perpajakan (miliar Rp)	Tax ratio
2017	177.468,60	5.874,34	3,31%
2018	194.032,51	6.403,55	3,30%

Sumber : BPS, Kanwil Pajak Prov. Kalbar

Dari tabel diatas terlihat bahwa meskipun realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun *tax ratio* mengalami penurunan, ini terjadi karena rasio penerimaan pajak yang semakin kecil terhadap pertumbuhan PDRB kalbar. Untuk itu perlu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak diantaranya identifikasi dan penggalian potensi WP sektor pertambangan, optimalisasi penggalian potensi pajak, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Bendahara Pemerintah Pusat maupun Daerah.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi

Sebagai langkah penguatan kebijakan fiskal maka penerimaan PNBP harus dioptimalkan dan penerimaan PNBP di wilayah Kalbar dalam kurun waktu 2 tahun terakhir telah menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan.

a. Perkembangan PNBP per Jenis PNBP

Penerimaan PNBP berdasarkan jenis PNBP di wilayah Provinsi Kalimantan Barat hanya terdiri atas PNBP lainnya dan PNBP BLU. Tidak terdapat penerimaan PNBP dari sumber daya alam (SDA), meskipun di wilayah Kalimantan Barat terdapat usaha pertambangan, hal ini dikarenakan penerimaan PNBP sumber daya alam merupakan penerimaan terpusat dan langsung masuk ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (999.99)

Tabel III. 4
Penerimaan PNBP Pemerintah Pusat tingkat di Provinsi Kalimantan Barat (Miliar Rp)

Penerimaan PNBP	2017		2018	
	Estimasi	Realisasi	Estimasi	Realisasi
PNBP Lainnya	301.08	552.63	117,27	387.30
Pendapatan BLU	53.36	68.58	337,81	474.26
Pendapatan SDA	-	-	-	-
Bagian Pemerintah atas laba BUMN	-	-	-	-
Jumlah PNBP Kalbar	354.44	621.21	455.08	861.57

Sumber : SPAN (diolah)

Secara keseluruhan penerimaan PNBP selama tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp240,36 miliar atau 38.69 persen. Pendapatan PNBP BLU memberikan kontribusi 55.05 persen dari total penerimaan PNBP. Penerimaan PNBP BLU meningkat cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 592 persen dikarenakan telah ditetapkannya Universitas Tanjungpura Pontianak sebagai satker BLU

b. Perkembangan PNBP Fungsional

PNBP dapat dibedakan sesuai dengan fungsi Kementerian/Lembaga yang disebut dengan PNBP Fungsional. PNBP Fungsional adalah penerimaan yang berasal dari pungutan kementerian Negara/lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Tabel II.5
Penerimaan PNBP Fungsional terbesar Provinsi Kalbar (miliar Rp)

URAIAN	2017		2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pendapatan Kepolisian	3,75	131,46	3,59	140,04
Pendapatan jasa bandara, kepelabuhan & kenavigasian	35,54	37,63	37,17	57,72
Pendapatan pendidikan	128,68	246,36	49,64	49,90

Sumber: OMSPAN 2019

Tahun 2018 pendapatan PNBP Kepolisian merupakan penyumbang terbesar PNBP fungsional di Kalimantan Barat sebesar Rp140,04 miliar, meningkat 6,53 persen dibanding tahun sebelumnya. Sebagian besar pendapatan PNBP Kepolisian di peroleh dari pendapatan BPKB, pendapatan STNK, pendapatan TNKB (Tanda Kendaraan Bermotor) dan pendapatan SIM. Pendapatan fungsional terbesar selanjutnya adalah pendapatan jasa bandara, kepelabuhan dan kenavigasian yang menyumbangkan penerimaan sebesar Rp57,72 miliar, meningkat cukup signifikan sebesar 53,37 persen dibanding penerimaan tahun sebelumnya. Sebagian besar penerimaan PNBP pendapatan jasa bandara, kepelabuhan dan kenavigasian diperoleh dari pendapatan kepelabuhan yang menyumbang angka sebesar Rp27,34 miliar atau 47,38 persen, disusul pendapatan jasa kebandar udaraan sebesar Rp10,84 miliar atau 18,79 persen.

Pendapatan kepelabuhan berpotensi untuk meningkat ditahun tahun selanjutnya dengan rencana pengembangan kapasitas pelabuhan Pontianak yang di mulai

dengan pembangunan pelabuhan (terminal) Kijing yang berlokasi di wilayah Kabupaten Mempawah dan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Sedangkan penerimaan PNBP yang mengalami penurunan adalah PNBP Pendidikan sebesar 79,75 persen, penurunan ini disebabkan adanya satker PNBP yang telah ditetapkan menjadi satker BLU yakni Universitas Tanjungpura Pontianak sehingga untuk selanjutnya penerimaan yang diperoleh akan masuk sebagai penerimaan BLU.

c. Analisis Kontribusi Pendapatan Terhadap Ekonomi Regional

Tabel II.6
Rasio Pendapatan Perpajakan (pajak,bea masuk,bea keluar), PNBP, PAD terhadap PDRB Prov. Kalbar

Tahun	Perpajakan (pajak, bea masuk,bea keluar)	PNBP (miliar Rp)	PAD (miliar Rp)	PDRB (miliar Rp)	Perpajakan /PDRB	PNBP/PDRB	PAD/PDRB
2018	6.823,67	861,57	4.047,53	194.032,51	0,035	0,0044	0,021
2017	5.648,01	621,21	3.464,42	177.468,60	0,032	0,0035	0,020

sumber : SPAN (diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan perpajakan (Pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional) memberikan kontribusi sebesar 0,035 terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Kalbar, sedangkan PAD terhadap PDRB sebesar 0,021 dan PNBP terhadap PDRB sebesar 0,0044. Hal ini berarti penerimaan Perpajakan masih lebih dominan dibandingkan dengan PAD maupun PNBP. Tahun 2018 ratio Perpajakan, ratio PAD dan ratio PNBP mengalami peningkatan dibandingkan dengan ratio tahun sebelumnya.

C. BELANJA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT PROVINSI

Belanja pemerintah pusat adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pengeluaran pemerintah pusat.Belanja pemerintah pusat meliputi belanja pemerintah pusat menurut organisasi, belanja pemerintah pusat menurut fungsi, dan belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja.

Belanja pemerintah merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk melakukan stimulus fiskal.Salah satunya yang populer pada saat krisis ekonomi adalah instrumen ekonomi berupa stimulus fiskal.Secara garis besar, komposisi dari stimulus fiskal adalah berupa pengurangan beban pajak dan tambahan belanja pemerintah *(increased spending)*.

1. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Organisasi (Bagian Anggaran/Kementerian/Lembaga

Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah belanja yang dialokasikan kepada kementerian/lembaga dan bagian anggaran Bendahara Umum Negara, alokasi dan realisasi untuk tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.7
Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Bagian Anggaran
Di Provinsi Kalimantan Barat (miliar Rp)

Kementerian/Lembaga	2017		2018		
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	%
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	0.34	0.33	0.19	0.19	100
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	46.48	41.90	89.86	67.76	75.41
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	0.50	0.50	0.63	0.58	92.06
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	15.96	15.47	16.56	14.89	89.92
BADAN NARKOTIKA NASIONAL	17.50	14.51	18.09	16.88	93.31
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	8.04	7.38	8.93	8.69	97.31
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	22.34	21.78	23.37	22.69	97.09
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	52.53	34.77	259.96	205.80	79.17
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	18.82	18.90	22.67	22.49	99.21
BADAN PUSAT STATISTIK	79.36	74.45	99.29	93.30	93.97
BADAN SAR NASIONAL	22.60	21.99	25.96	24.96	96.15
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	87.90	81.49	117.33	107`09	91.27
KEMENTERIAN AGAMA	1,008.76	947.46	1055.28	994.85	94.27
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	170.12	150.42	221.91	194.97	87.86
KEMENTERIAN DALAM NEGERI	56.53	53.15	53.05	51.82	97.68
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	179.18	156.11	118.78	100.18	84.34
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	128.64	128.07	197.60	195.20	98.79
wKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	98.13	87.61	99.12	89.47	90.26
KEMENTERIAN KESEHATAN	153.21	136.28	189.12	155.85	82.42
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	3.96	3.48	4.77	4.65	97.48
KEMENTERIAN KEUANGAN	172.88	159.92	197.22	183.40	92.99
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.51	7.24	7.86	7.62	96.95
KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	3.97	3.95	4.14	4.11	99.28
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	131.15	115.40	210.53	175.21	83.22
KEMENTERIAN PARIWISATA	1.16	1.16	2.34	2.04	87.18

Kementerian/Lembaga	2017		2018		
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	%
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	2,597.60	2,511.10	2,954.02	2,704.19	91.54
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08	1.97	2.08	2.01	96.63
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	4.49	3.94	4.19	3.82	91.17
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	107.09	103.64	90.04	86.09	95.61
KEMENTERIAN PERDAGANGAN	25.74	25.03	37.93	30.74	81.04
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	0.75	0.70	0.95	0.74	77.89
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	416.17	377.50	566.37	524.11	92.54
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	26.22	24.27	31.56	28.42	90.05
KEMENTERIAN PERTAHANAN	1,063.02	1,025.29	1,239.99	1,215.77	98.05
KEMENTERIAN PERTANIAN	597.76	548.43	453.15	400.40	88.36
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	500.25	473.17	675.56	653.60	96.75
KEMENTERIAN SOSIAL	17.93	17.80	19.54	19.44	99.49
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1,109.08	1,101.82	1,232.74	1,231.85	99.93
KOMISI PEMILIHAN UMUM	157.51	98.44	617.42	561.10	90.88
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	5.63	5.60	6.83	6.61	96.78
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	15.28	13.81	21.35	20.60	96.49
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	12.68	12.22	13.80	13.75	99.64
MAHKAMAH AGUNG	121.23	116.00	118.37	117.16	98.98
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	1.04	1.04	0.97	0.92	94.85
BENDAHARA UMUM NEGARA	4,615.54	4,410.10	4,152.95	3.975.82	95.73
	13,909.47	13,178.47	15,284.37	14,341.83	94.74

Sumber : e-monev , MEBE (diolah)

Dibandingkan tahun 2017 terdapat kenaikan pagu sebesar 13.75% untuk tahun 2018, dan terdapat penurunan realisasi sebesar 0,9% dibandingkan tahun 2017. Berdasarkan tabel diatas, Kementerian PUPR mendapat alokasi pagu anggaran yang paling tinggi dengan persentase sebesar 26,54% diluar dari pagu BA 999. Hal ini menunjukan di Provinsi Kalimantan Barat prioritas pembangunan masih dititik beratkan pada sektor infrastruktur. Dari dana APBN 2018 pada Provinsi Kalimantan Barat, satuan kerja (satker) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belanja modal sebesar Rp 2,12 triliun naik sebesar 0,03% dari tahun 2017. Belanja modal pada satker lingkup Kementerian PUPR tersebut memberikan kontribusi sebesar 72,18% dari belanja modal yang dikelola satuan kerja lainnya di

wilayah pembayaran KPPN se-Kalbar. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di Kalbar.

Terdapat 10 K/L yang memperoleh alokasi anggaran belanja terbesar dengan total mencapai Rp9,27 triliun (60,70%) yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat, Kemenhan, Polri, , Kemenag, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Kementerian Agraria & Tata Ruang. Berikut ini adalah sepuluh kementerian dengan pagu terbesar **:**

Tabel II.8
Tingkat Penyerapan 10 K/L Pagu Terbesar 2018 (miliar Rp)

No	Nama KL (BA)	Pagu	Realisasi	%
1	Kementerian PUPR (033)	2.954,02	2.704,19	91,54%
2	Kemenhan (012)	1.239,99	1.215,77	98,05%
3	Kepolisian RI (060)	1.232,74	1.231,85	99,93%
4	Kemenag (025)	1.055,28	994,85	94,27%
5	Kementerian Ristekdikti (042)	675,56	653,6	96,75%
6	KPU (076)	617,42	561,1	90,88%
7	Kementerian Perhubungan (022)	566,37	524,11	92,54%
8	Kementerian Pertanian (018)	453,15	400,4	88,36%
9	Bawaslu (115)	259,96	205,8	79,17%
10	Kementerian Agraria & Tata Ruang (056)	221,91	194,97	87,86%

Sumber : e-monev , MEBE (diolah)

Dibandingkan dengan tahun 2017, terdapat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang masuk dalam 10 K/L terbesar. Hal ini disebabkan pada tahun 2018 terdapat Pilkada serentak di Provinsi Kalimantan Barat. Jika diperhatikan, jumlah alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat di 10 K/L dengan pagu terbesar dimaksud mencapai lebih dari 61% terhadap semua pagu anggaran K/L. Untuk itu, capaian realisasinya tentu akan mempengaruhi keseluruhan realisasi penyerapan K/L yang ada di Kalbar sehingga perkembangan pelaksanaan anggaran satker-satker 10 K/L dengan pagu tertinggi tersebut harus memperoleh pengawasan yang lebih intensif dari Kanwil DJPB.

2. Perkembangan pagu dan realisasi berdasarkan Fungsi

Belanja Pemerintah Pusat terbagi menjadi 11 fungsi, yaitu Pelayanan Umum, Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Lingkungan Hidup, Perumahan dan Fasilitas Umum, Kesehatan, Pariwisata dan Budaya, Agama, Pendidikan, serta Perlindungan Sosial dengan perbandingan pagu dan realisasi dalam tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut:

Tabel II.9
Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Fungsi (Miliar Rp)

NAMA FUNGSI	Pagu 2017	Realisasi 2017	Pagu 2018	Realisasi 2018
PELAYANAN UMUM	5,158.83	4,855.89	5,418.46	5,108.82
EKONOMI	3,502,87	3,318.97	3,771.15	3,407.51
PENDIDIKAN	1,575.54	1,492.04	1,853.85	1,752.08
KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1,464.34	1,441.89	1,684.13	1,668.21
PERTAHANAN	1,063.02	1,025.29	1,239.99	1,215.78
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	493.44	459.56	506.67	471.85
LINGKUNGAN HIDUP	276.76	247.92	371.00	332,30
AGAMA	193,30	175.97	222.38	173.74
KESEHATAN	160.20	140.01	192.63	188.08
PERLINDUNGAN SOSIAL	20.01	19.77	21.62	21.45
PARIWISATA DAN BUDAYA	1.16	1.16	2.49	2.16
TOTAL	13,909.47	13,178.47	15,284.37	14,341.83

Sumber: Monev PA, diolah

Pada tahun 2018 alokasi anggaran didominasi oleh fungsi pelayanan Umum, Ekonomi dan Pendidikan. Pengelompokan anggaran menurut Fungsi memiliki pengertian, perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Pengelompokan ini juga bertujuan untuk melihat besaran alokasi anggaran menurut organisasi Kementerian/Lembaga, tugas-fungsi pemerintah, dan belanja Kementerian/Lembaga, termasuk menciptakan penganggaran yang lebih tepat sasaran. Pada tahun 2018 alokasi untuk fungsi pelayanan umum sebesar Rp5,42 triliun (35 persen), ekonomi sebesar Rp3,77 triliun (25 persen) dan fungsi Pendidikan sebesar Rp1,85 triliun (12 persen). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan APBN di Kalimantan Barat lebih terkonsentrasi pada bidang pelayanan umum, ekonomi dan pendidikan, yang secara keseluruhan jumlah alokasi ketiga fungsi tersebut sebesar Rp11,04 triliun atau 72 persen.

3. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan jenis belanja di provinsi Kalimantan Barat terdapat 6 alokasi anggaran belanja TA 2017, yaitu Belanja Pegawai (51), Belanja Barang (52), Belanja Modal (53), Belanja Bantuan Sosial (57), Dana Alokasi Khusus Fisik (63) dan Dana Desa (66). Untuk Dana Alokasi Khusus Fisik (63) dan Dana Desa (66) baru ada pada tahun 2017 dan tahun 2018. Jenis belanja 63 dan 66, baru TA 2017 muncul dikarenakan pencairan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sekarang berada di KPPN daerah. Perkembangan pagu dan realisasi berdasarkan jenis belanja dalam tahun 2016 dan 2017 sebagai berikut:

Tabel II.10
Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja (Miliar Rp)

JENIS BELANJA	Pagu 2017	Realisasi 2017	Pagu 2018	Realisasi 2018
51 Belanja Pegawai	3,138.09	3,044.14	3,380.30	3,300.72
52 Belanja Barang	3,352.11	3,042.83	4.387,37	4,001.68
53 Belanja Modal	2,781.16	2,659.34	3,351.40	3,051.46
57 Belanja Bantuan Sosial	22.56	22.05	12.35	12.15
63 Dana Alokasi Khusus Fisik	2,998.81	2,794.24	2,457.10	2,281.91
66 Dana Desa	1,616.73	1,615.86	1,695.85	1,693.91
	13,909.47	13,178.47	15,284.37	14,341.83

Sumber: Monev PA, diolah

Kenaikan pagu anggaran terjadi untuk jenis belanja Pegawai, belanja Barang, belanja Modal dan belanja dana desa. Belanja barang mendapatkan kenaikan paling terbesar yaitu 10,3 persen disusul belanja modal sebesar 5,7 persen, belanja pegawai naik 2.42 persen, dan belanja dana desa sebesar 0,79 persen. Jenis Belanja sosial mengalami penurunan sebesar 0,10 persen dan belanja alokasi khusus fisik turun sebesar 5,41 persen. Selama TA 2018, Belanja Pegawai telah terserap Rp3,30 triliun (97,65%). Belanja barang terserap Rp4,00 triliun (91,21%), belanja modal terserap Rp3,05 triliun (91,05%), belanja bantuan sosial terserap Rp12,15 miliar (98,38%), dana alokasi fisik terserap Rp2.28 triliun (92,87%), dan yang paling tinggi adalah penyerapan anggaran dana desa sebesar Rp1,69 triliun (99.89%) hal ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa yang diharapkan akan berdampak langsung untuk pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Pada belanja modal terdapat penyerapan paling terendah dibandingkan jenis belanja lain.

Grafik II.2
Perkembangan Pagu dan Realisasi Jenis Belanja Tahun 2018

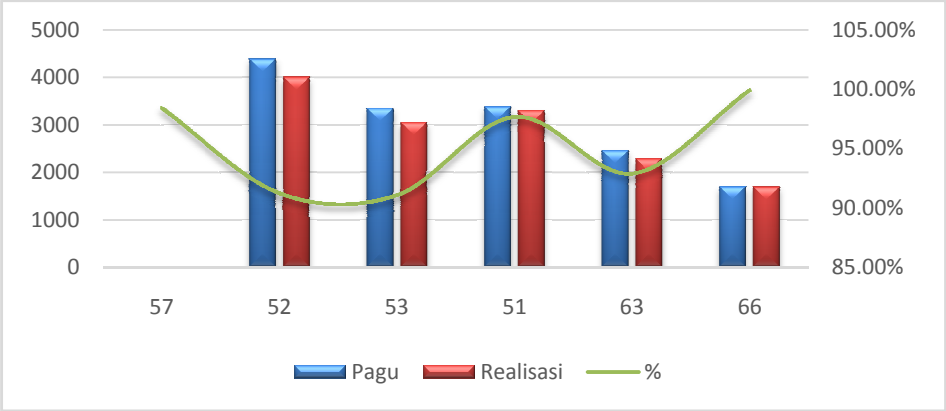

Sumber: Monev PA, MEBE, diolah

4. Analis belanja pemerintah pusat

1.1. Belanja pemerintah pusat

Perbandingan antara alokasi belanja untuk sektor konsumtif dan produktif. Sektor konsumtif merupakan belanja pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai administrasi dan kebutuhan birokrasi seperti gaji, tunjangan, honor, belanja operasional kantor, pengadaan kendaraan dinas. Sedangkan sektor produktif antara lain peningkatan mutu jalan, jaringan, irigasi, intensifikasi dan ektensifikasi pertanian, pengadaan traktor untuk masyarakat.

Tabel II.11
Proporsi jenis Belanja Terhadap Total Pagu

Jenis Belanja	Pagu (miliar Rp)	%
Belanja Pegawai	3,380,30	22.12%
Belanja Barang	4,387.37	28.70%
Belanja Bansos	12.35	0.08%
belanja modal	3,351.40	21.93%
Dak fisik	2,457.11	16.08%
Dana desa	1,695.85	11.10%
Total	15,284.37	

Sumber: Monev PA, MEBE, diolah

Terlihat dari tabel diatas bahwa belanja pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai sektor produktif yang diantaranya untuk belanja Modal, Dak Fisik, Dana Desa mencapai Rp 7.50 triliun atau 49,09 persen sedangkan

belanja administrasi dan kebutuhan birokrasi sebesar Rp 7,78 triliun atau 50,90 persen.

Untuk belanja produktif terbesar terdapat pada belanja program penyelenggaraan jalan sebesar Rp2,03 triliun. Disusul belanja program pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp265,25 miliar. Terlihat dari alokasi ini prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat di fokuskan pada pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan peningkatan pengelolaan sumber daya air. Hal ini sesuai dengan fungsi terbesar yaitu Pelayanan Umum yang didominasi oleh belanja modal Jalan dan jembatan.

1.2. Analis Belanja Menurut Fungsi

a. Belanja Fungsi Kesehatan

Tabel II.12
Rasio Alokasi Fungsi Kesehatan dengan pagu Belanja APBN 2018

Uraian	2017	2018
Alokasi Fungsi Kesehatan	160,20	192,63
Pagu Belanja APBN	13.909,47	15.284,37
Rasio	0,012	0,013

Sumber: Monev PA, MEBE, diolah

Anggaran berdasarkan fungsi kesehatan merupakan anggaran belanja negara dimana dana anggaran akan diarahkan untuk melaksanakan program-program dalam rangka meningkatkan derajat tingkat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Ketentuan pasal 171 undang undang nomor 36 tahun 2009 menjadikan alokasi di bidang kesehatan mutlak dipenuhi (*mandatory spending*). Salah satu kebijaksanaan pemerintah di bidang kesehatan adalah dengan menyediakan berbagai infrastruktur dan pengadaan tenaga-tenaga kesehatan dalam usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan umum. Usaha ini ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, sekaligus dalam rangka peningkatan mutu fisikal sumber daya manusia dan Indonesia Sehat. Alokasi belanja pemerintah pusat Fungsi Kesehatan tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp192,63 miliar lebih besar Rp32,43 miliar jika dibandingkan alokasi fungsi kesehatan tahun 2017. Rasio Fungsi Kesehatan di tahun 2018 mencapai 0,013 naik bila dibanding rasio Fungsi Kesehatan tahun sebelumnya.

Meningkatnya alokasi fungsi kesehatan tersebut diharapkan semakin meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

b. Belanja Fungsi Pendidikan

Tabel II.13
Rasio Alokasi Fungsi Pendidikan dengan pagu Belanja APBN 2018

Uraian	2017	2018
Alokasi Fungsi Pendidikan	1575,54	1.853,85
Pagu Belanja APBN	13.909,47	15.284,37
Rasio	0,113	0,121

Sumber: Monev PA, MEBE, diolah

Pendidikan merupakan sarana dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Penyelenggaraan pendidikan di daerah akan mampu menjembatani kesenjangan budaya di masyarakat melalui budaya belajar di sekolah. Untuk memenuhi hal tersebut tentunya harus dialokasikan anggaran belanja pendidikan. Belanja Pendidikan merupakan belanja wajib (*mandatory spending*) yang mutlak harus dipenuhi. yang ditentukan batas minimal pengalokasian anggaran dalam APBN sebesar 20 persen. Alokasi belanja pemerintah pusat Fungsi Pendidikan tahun 2018 sebesar Rp1.85 triliun meningkat 278,31 miliar atau 17,66 persen dibanding alokasi tahun sebelumnya. Rasio fungsi Pendidikan di tahun 2018 mencapai 0,121 naik bila dibandingkan dengan rasio fungsi pendidikan tahun sebelumnya. Peningkatan alokasi fungsi kesehatan ini diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

D. Analisis *Cash Flow* Pemerintah Pusat :

Arus kas masuk (*cash in flow*) Pemerintah Pusat adalah semua penerimaan yang diterima oleh Pemerintah pusat di provinsi / daerah tertentu. sedangkan arus kas keluar *(cash out flow*) adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah. Yang termasuk arus kas masuk adalah semua penerimaan negara yang diterima oleh Pemerintah Pusat seperti penerimaan pajak, PNBP dan hibah. Sedangkan yang termasuk dalam arus kas keluar Pemerintah Pusat adalah semua belanja pemerintah dalam APBN yang terdiri dari belanja KP/KD/DK/TP/UB dan dana transfer.

Selisih antara kontribusi penerimaan Negara pada suatu daerah dengan pengeluaran pemerintah pusat tersebut akan menghasilkan kondisi surplus/defisit.

Kondisi surplus mengindikasikan bahwa daerah tersebut memberikan subsidi silang kepada daerah lain di Indonesia, sementara kondisi defisit mengindikasikan bahwa daerah tersebut menerima subsidi silang dari daerah lain di Indonesia. Tabel dibawah ini merupakan *cash flow* Pemerintah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel II.14
***Cash Flow* Pemerintah Pusat di Kalimantan Barat TA 2018 (miliar Rp)**

DEFISIT : 21,420.46			
Cash in Flow		**Cash Out Flow**	
Penerimaan Pajak Dalam negeri	6.413,92	Belanja Pemerintah Pusat	10.366,01
Bea Masuk/Bea Keluar	409,75	Transfer ke daerah & dana desa	19.288,79
PNBP	861,57		
Hibah	549,11		
	8.234,35		29.654,81

Sumber : SPAN, LRA, OM SPAN,Monev Pa diolah

Dari Tabel *cash flow* tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018, *cash in flow* di Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari penerimaan pajak, PNBP dan hibah berjumlah Rp8.234,35 miliar sedangkan *cash out flow* yang terdiri belanja pemerintah pusat dan belanja transfer ke daerah dan dana desa berjumlah Rp29.654 miliar. Apabila *cash in flow* diperbandingkan dengan *cash out flow* maka akan menghasilkan defisit sebesar Rp21.420,46 miliar. Kondisi defisit ini mengindikasikan bahwa Provinsi Kalimantan Barat menerima subsidi silang dari daerah lain di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Untuk ,mengurangi potensi defisit di tahun mendatang perlu kiranya mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak termasuk kepabeanan cukai serta PNBP.

E. TRANSFER KE DAERAH

Dana transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan. DAK, DAU DBH. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga antar pemerintah daerah.

1. Perkembangan Pagu dan Realisasi Dana Transfer dan Dana Desa

Pada tahun 2018, alokasi dana transfer dan Dana Desa ke wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp19.6 triliun dan terealisasi Rp19.2 triliun

atau 98,37 persen. Pada tabel II.15 Disajikan perkembangan Realisasi Dana Transfer pada tahun 2017 dan 2018 untuk Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel II.15
Perkembangan Dana Perimbangan di Kalimantan Barat (miliar Rp)

Dana Transfer	2017		2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
DBH	1.626,87	803,77	748,72	747,46
DAU	11.794,43	11.794,43	11.820,60	11.820,60
DAK	5.534,05	5.198,11	5.199,61	4.902,19
DID	60,00	60,00	143,00	124,63
Dana Desa	1.616,73	1.615,86	1.695,86	1.693,92
	20.632,08	19.472,17	19.607,79	19.288,79

Sumber: OMSPAN (diolah)

Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Kalbar pada tahun 2018 sebesar Rp19,60 triliun turun -4,96 persen dibandingkan tahun 2017. Meskipun secara agregat Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa mengalami penurunan namun terdapat peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Prov. Kalbar sebesar 0,22 persen sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian alokasi DAU agar tidak lebih rendah dibanding APBN-P 2017. Selain itu terdapat peningkatan alokasi Dana Desa Kalbar tahun 2018 sebesar 4,89 persen sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan program pembangunan Indonesia dari pinggiran.

Alokasi Dana Desa di Prov. Kalbar sebesar Rp1,69 triliun yang terbagi untuk 2031 Desa. Terdapat 3 (tiga) daerah dengan alokasi pagu dana desa diatas 200 miliar yakni Kab. Sintang Rp294,87miliar, Kab. Kapuas Hulu Rp228,93 miliar dan Kab. Ketapang Rp217,29 miliar. Selanjutnya 9 (sembilan) daerah lainnya mendapatkan alokasi pagu dana desa dibawah 200 miliar dengan pagu dana desa terendah pada Kab. Kayong Utara sebesar Rp39,85 miliar. Alokasi dana desa tersebut diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian di desa dan menekan kesenjangan pendapatan antara Desa dan Per Kotaan.

Grafik II.3
Realisasi Dana Transfer & Dana Desa Kab/Kota di Kalbar

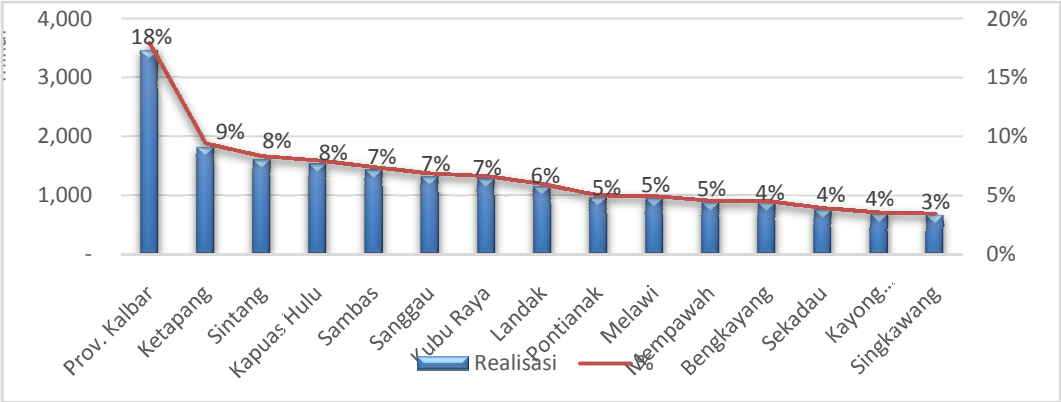

Sumber: OMSPAN (diolah)

Berdasarkan grafik II.3 terlihat perbandingan realisasi dana transfer dan Dana Desa per Kab di Prov. Kalbar. Dari total alokasi dana transfer sebesar Rp19,6 triliun telah terealisasi sebesar 19,28 triliun dengan realisasi terbesar oleh Pemda Prov. Kalbar yakni Rp3,45 triliun, selanjutnya Kab. Ketapang Rp1,81 triliun dan yang terkecil adalah Kota Singkawang Rp659 miliar.

2. Analisa Kemandirian Daerah

Untuk menilai tingkat kemandirian daerah dilakukan dengan cara membandingkan Rasio PAD dengan Rasio dana transfer. Apabila rasio PAD lebih besar dari pada rasio dana transfer berarti semakin mandiri dan sebaliknya semakin besar rasio dana transfer berarti tingkat ketergantungan semakin tinggi.

Tabel II.16
Rasio Kemandirian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 (miliar Rp)

Daerah	Dana Transfer	PAD	Pendapatan APBD	Ratio Dana Transfer thd Pendapatan APBD	Ratio PAD thd Pendapatan APBD
Prov. Kalbar	3.452,23	2.264,95	5.752,80	60%	39%
Ketapang	1.811,82	127,1	1.988,81	91%	6%
Sintang	1.600,29	206,92	1805,65	89%	11%
Kapuas Hulu	1.530,82	76	1.617,28	95%	5%
Sambas	1.425,14	83,92	1.578,13	90%	5%
Sanggau	1.315,62	103,75	1.387,39	95%	7%
Kubu Raya	1.277,09	163,64	1.828,75	70%	9%
Landak	1.143,97	80,47	1.310,56	87%	6%
Pontianak	959,31	413,47	1.666,74	58%	25%
Melawi	944,39	212,7	1.652,56	57%	13%

Daerah	Dana Transfer	PAD	Pendapatan APBD	Ratio Dana Transfer thd Pendapatan APBD	Ratio PAD thd Pendapatan APBD
Mempawah	874,15	76,98	1.060,33	82%	7%
Bengkayang	866,77	30,79	928,7	93%	3%
Sekadau	751,25	54,64	881,77	85%	6%
Kayong Utara	676,42	22,52	861,76	78%	3%
Singkawang	659,51	129,69	855,02	77%	15%

Sumber: OMSPAN, Monev PA, LRA Pemda diolah

Dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah terhadap Pendapatan APBD, dapat dilihat bahwa daerah di wilayah Kalimantan Barat memiliki ketergantungan yang relatif tinggi

F. PENGELOLAAN BLU PUSAT

Definisi Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam mengelola keuangannya, BLU menerapkan pola keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya

1. Profil dan jenis layanan satker BLU pusat

Dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, tahun 2018 terdapat 3 (tiga) Satker BLU, yang terdiri 2 (dua) satker BLU layanan Pendidikan dan 1 (satu) satker BLU layanan kesehatan. Dua satker BLU layanan pendidikan yaitu Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Pontianak dan Universitas Tanjungpura Pontianak, sedangkan satker BLU layanan kesehatan adalah Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Pontianak.

Tabel II.17
Profil BLU di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 (miliarRp)

No	Jenis Layanan	Satker BLU	Nilai Aset	Pagu PNBP	Pagu RM	Jumlah Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan	Poltekkes Pontianak	221,74	44,80	45,04	89,84
		Universitas Tanjungpura	22.177,89	317,7	208.76	526,46
2	Kesehatan	RS Bhayangkara Pontianak	67,34	42,82	7,01	49,83

Sumber: SPAN, LRA, Neraca, e-rekon

a. Poltekkes Pontianak berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor: 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001 dan ditetapkan menjadi Satker BLU berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.05/2011 tanggal 1 Desember 2011. Dengan visi "Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Bermutu dan Mampu Bersaing di Tingkat Regional pada Tahun 2020 (2016-2020)", Poltekkes Kemenkes Pontianak memberikan pelayanan kesehatan meliputi Jurusan Kesehatan Lingkungan, Jurusan Gizi, Jurusan Kebidanan, Jurusan Keperawatan, Jurusan Analis Kesehatan, dan Jurusan Perawat Gigi.

   Pada tahun 2018 BLU ini mendapatkan pagu dalam DIPA sebesar Rp 89.838.606.000 dengan pagu PNBP sebesar Rp44.795.440.000 dan pagu RM sebesar Rp45.043.166.000. Sementara aset yang dimiliki sebesar Rp221.739.353.865 yang terdiri dari aset lancar Rp7.935.200.471, aset tetap Rp213.595.215.894, dan aset lainnya Rp208.937.500.

b. RS Bhayangkara Pontianak telah menjadi satker BLU sejak tahun 2015 sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor 501/KMK.05/2015. RS Bhayangkara ini telah beroperasi sejak tahun 2002 dan memberikan layanan kesehatan, meliputi rawat jalan (Poli Umum, Poli Gigi, IGD, Poli Kebidanan, Spesialis Bedah Orthopedi, Spesialis Bedah Umum, Spesialis Obstetric dan Gynekologi, Spesialis Penyakit Dalam), kompartemen Dokpol, fungsi penunjang (apotek, laboratorium, fisioterapi, radiologi, USG, EKG, *ambulance*, kamar operasi) dan pusat pelayanan terpadu. RS yang terletak di Jalan K.S. Tubun No. 14 Pontianak ini memiliki layanan unggulan meliputi DVI (*Disaster Victim Identification*), pembuatan VER (*Visum et Repertum*), dan pelayanan kedokteran kepolisian.

   Pagu DIPA RS Bhayangkara Pontianak di tahun 2018 adalah sebesar Rp49.831.176.000 dengan pagu PNBP sebesar Rp42.820.391.000 dan pagu RM

sebesar Rp7.010.785.000. Sementara aset yang dimiliki sebesar Rp67.345.413.869 yang terdiri dari aset lancar Rp9.339.327.728 dan aset tetap Rp58.006.086.141.

c. Universitas Tanjungpura menjadi BLU layanan pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 830/KMK.05/2017 dan mulai mendapatkan DIPA BLU pada tahun 2018. Dengan visi "Menjadi institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah di Kalimantan Barat, serta menghasilkan lulusan yang bermoral Pancasila dan mampu berkompetisi di tingkat dunia, baik ditingkat daerah, nasional, regional maupun internasional", Untan memiliki tujuan sebagai perguruan tinggi yang mampu menjadi Pembelajaran Unggul Menuju Peningkatan Daya Saing Untan dalam rangka merealisasikan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH/BLU). Untan mempunyai layanan dalam sembilan fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kehutanan, Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

   Pagu DIPA universitas ini di tahun 2018 adalah sebesar Rp526.461.013.000 dengan pagu PNBP sebesar Rp317.705.556.000 dan pagu RM sebesar Rp208.756.457.000. Sementara total aset yang dimiliki sebesar Rp22.177.885.662.019 yang terdiri dari aset lancar Rp254.320.807.008, aset tetap Rp21.921.253.928.386, dan aset lainnya sebesar Rp2.300.926.625.

2. Perkembangan Pengelolaan Aset, Pagu PNBP dan Pagu RM Satker BLU

a. Perkembangan Pengelolaan Aset Satker BLU

   Perkembangan pengelolaan aset satker BLU dalam jangka waktu dua tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.18
Perkembangan Pengelolaan Aset Satker BLU di Provinsi Kalimantan Barat
(miliar Rp)

No	Satker BLU	Aset tahun 2017	Aset tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Politeknik Kesehatan Pontianak	230,56	221,74
2	Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak	48,48	67,34
3	Universitas Tanjungpura	Belum sbg BLU	22.177,89

sumber: SPAN. LRA, Neraca, E-rekon

Nilai aset pada satker BLU Poltekkes Pontianak mengalami penurunan sebesar 3,82 persen dari Rp230,56 miliar di tahun 2017 menjadi Rp221,74 miliar di tahun 2018. Sedangkan di RS Bhayangkara nilai asetnya meningkat dari Rp48,48 miliar menjadi 67,34 miliar atau 38,9 persen. Sedangkan nilai aset satker BLU Untan pada tahun 2018 sebesar Rp22.177,89 miliar.

b. Perkembangan Pagu PNBP dan Pagu RM Satker BLU

Satker BLU di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 mendapatkan pagu PNBP dan pagu RM sebagaimana tercantum dalam DIPA. Ada pun perkembangan pagu tahun 2018 dan tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.19
Perkembangan Pagu PNBP dan Pagu RM Satker BLU Provinsi Kalimantan Barat (miliar Rp)

No	Satker BLU	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Pagu PNBP	Pagu RM	Pagu PNBP	Pagu RM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Politeknik Kesehatan Pontianak	49,66	52,79	44,80	45,04
2	Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak	34,60	7,009	42,82	7,010
3	Universitas Tanjungpura	Belum sbg Satker BLU		317,7	208.76

Sumber: SPAN, LRA, Neraca, E-rekon

Pada tahun 2018 baik pagu PNBP maupun pagu RM Satker BLU Politekes Pontianak mengalami penurunan dari pagu yang diterima pada tahun 2017. Pagu PNBP mengalami penurunan dari Rp49,66 miliar di tahun 2017 menjadi Rp44,80 miliar pada tahun 2018 atau turun sebesar Rp4,86 miliar atau 10,85 persen. Sedangkan pagu RM mengalami penurunan sebesar Rp7,75 miliar atau 17,21 persen dari Rp52,79 miliar di tahun 2017 menjadi Rp45,04 miliar pada tahun 2018.

Selanjutnya untuk satker BLU layanan kesehatan yakni RS Bhayangkara Pontianak perkembangan pagu PNBP meningkat dari Rp34,60 miliar menjadi Rp42,82 miliar atau 23,76 persen, sedangkan untuk pagu RM mengalami penurunan sebesar Rp 1,7 juta atau 0,024 persen.

Universitas Tanjungpura, di tahun 2018 ini baru menjadi satker BLU setelah sebelumnya adalah satker PNBP. Di tahun 2018 Untan mendapat pagu PNBP sebesar Rp317,7 miliar dan pagu RM sebesar Rp208,76 miliar. Pada tahun 2017 Untan mendapat DIPA dengan pagu sebesar Rp366,80 miliar.

3. Kemandirian BLU

Salah tujuan diberikannya status BLU kepada satuan kerja adalah untuk mewiraswastakan pemerintah (*enterprising the government*), oleh karena itu satker BLU didorong untuk dapat menciptakan kemandirian dirinya sendiri. Kemandirian tersebut dapat dilihat dari berkurangnya porsi alokasi pagu rupiah murni (RM) dari APBN dan bertambahnya alokasi pagu PNBP dari hasil layanan satker. Semakin tinggi porsi pagu PNBP dibanding pagu RM maka satker BLU dianggap memiliki tingkat kemandirian yang lebih baik. Di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat terdapat satu satker BLU yang telah memiliki porsi pagu PNBP di atas 65 persen dari pagu totalnya yaitu RS Bhayangkara Pontianak. Sedangkan satker BLU Poltekkes Pontianak memiliki tingkat kemandirian 49,87 persen dan Untan 60,35 persen.

Tabel.II.20
Tingkat Kemandirian BLU di Provinsi Kalimantan Barat
(miliar Rp)

No	Satker BLU	Nilai aset	Tahun 2017				Tahun 2018			
			Pagu PNBP	%	Pagu RM	%	Pagu PNBP	%	Pagu RM	%
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Politeknik Kesehatan Pontianak	221,74	49,66	48,47	52,79	51,53	44,80	49,87	45,04	50,13
2	Rumkit Bhayangkara Pontianak	67,34	34,6	83,16	7,009	16,84	42,82	85,93	7,010	14,07
3	Univ. Tanjungpura	Belum menjadi Satker BLU					317,7	60,35	208.76	39,65

Sumber: SPAN, LRA, Neraca, e-rekon diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 dan 2018 alokasi pagu PNBP pada Satker Politeknik Kesehatan Pontianak masih dibawah 50 persen. Sedangkan untuk Satker BLU Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak alokasi pagu PNBP pada tahun 2017 sudah mencapai 83.16 persen dan di tahun 2018 menjadi 85,93 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak pada tahun 2017 memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dan meningkat di tahun 2018. Dari besarnya persentase pagu PNBP tersebut dapat dilihat bahwa dalam kegiatan operasional RS Bhayangkara Pontianak lebih ditunjang oleh PNBP yang dikelolanya dan bisa disimpulkan mempunyai tingkat kemandirian yang baik.

Universita Tanjungpura pada tahun 2018 sebagai satker BLU yang baru memiliki tingkat kemandirian di atas 50 persen.

4. Profil dan Jenis Layanan Satker PNBP

Pada Provinsi Kalimantan Barat terdapat 114 satker yang mengelola dana PNBP dengan alokasi pagu tahun 2018 sebesar Rp347,13 miliar. Dari 114 satker PNBP tersebut terdapat 3 satker yang mempunyai alokasi pagu PNBP terbesar, antara lain tersebut dibawah ini :

Tabel II.21
Profil dan Jenis layanan Satker PNBP di Provinsi Kalimanatan Barat Tahun 2018
(miliar Rp)

No	Jenis Layanan	Satker PNBP	Nilai Aset	Pagu PNBP	Pagu RM	Jumlah Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kesehatan	Rumkit TK II Kartika Husada	19.05	48.72	13.94	62.66
2	Pendidikan	Politeknik Negeri Pontianak	898.89	21.97	59.04	81.01
4	Pendidikan	IAIN Pontianak	867.62	17.75	42.97	60.72

Sumber: SPAN, LRA, Neraca, e-rekon diolah

Tabel II.22
Perkembangan Pagu PNBP dan Pagu RM Satker PNBP di Provinsi Kalimantan Barat
(miliar Rp)

No	Satker PNBP	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Pagu PNBP	Pagu RM	Pagu PNBP	Pagu RM
1	Rumkit TK II Kartika Husada	45.93	10.71	48.72	13.94
2	Politeknik Negeri Pontianak	17.10	`53.37	21.97	59.04
3	IAIN Pontianak	15.72	49.11	17.75	42.97

Sumber: SPAN, LRA, Neraca, e-rekon diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa Satker Rumkit Tk II Kartika Husada mengalami peningkatan persentase pagu PNBP sebesar 6.07 persen. Politeknik Negeri Pontianak juga mengalami peningkatan persentase pagu PNBP sebesar 28.48 persen. Demikian juga IAIN Pontianak pagu PNBP meningkat 12,91 persen. Dari ke tiga satker PNBP tersebut Rumkit Tk II Kartika Husada yang paling berpotensi untuk menjadi satker BLU karena sumber dana PNBP lebih besar dari pada RM sedangkan Politeknik Negeri Pontianak dan IAIN Pontianak. meskipun mempunyai potensi menjadi satker BLU belum menunjukan kemandirian karena sumber dana yang mereka gunakan lebih banyak dari dana APBN dibandingkan PNBP mereka.

5. Analisis terkait pengelolaan BLU

1. Analisis Kemandirian BLU

a. Rasio Antara Sumber Dana PNBP dan RM

Tujuan pembentukan BLU adalah tanpa mengutamakan mencari keuntungan, namun diharapkan dengan pelayanan yang meningkat maka secara langsung juga pendapatannya meningkat. Lebih jauh lagi diharapkan persentase belanja satker BLU yang bersumber dari rupiah murni semakin menurun digantikan dengan sumber belanja dari pendapatan BLU.

Tabel II.23
Rasio Sumber Dana BLU (PNBP dengan RM)
(miliar rupiah)

Satker BLU	2016			2017			2018		
	PNBP	RM	PNBP/ RM	PNBP	RM	PNBP/ RM	PNBP	RM	PNBP/ RM
Politeknik Kesehatan Pontianak	27,11	108,63	0,25	49,66	52,79	0,94	44,80	45,04	0,99
RS Bhayangkara Pontianak	35,25	7,05	5,00	34,6	7,00	4,87	42,82	7,01	6,11
Universitas Tanjungpura	Belum Menjadi Satker BLU						317,7	208,76	1,52

Sumber: SPAN,LRA, e-rekon diolah

Perbandingan nilai pagu PNBP dengan nilai RM secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menandakan tingkat kemandirian BLU di Kalimantan Barat semakin meningkat, kinerja BLU semakin membaik.

Pada satker BLU Poltekkes Pontianak tingkat kemandiriannya terus meningkat, Hal ini dapat dilihat dari pagu RM yang terus menurun dari tahun ke tahun. Pada RS Bhayangkara tingkat kemandirian dari tahun 2016 ke tahun 2018 semakin meningkat. Walaupun sempat menurun di tahun 2017, namun satker BLU ini mampu meningkatkan kemandiriannya di tahun 2018. Sedangkan pada Untan tingkat kemandirian di tahun 2018 ini mencapai 1,52 persen. Untan memiliki potensi pendapatan yang besar yang diharapkan mampu menurunkan pagu RM pada periode selanjutnya.

b. Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional

Kemandirian Satker BLU selain dapat dilihat dari Rasio Antara Sumber Dana PNBP dan RM sebagaimana pada poin a, dapat pula dinilai dari Rasio

PNBP terhadap biaya operasional BLU. Untuk rasio ini, BLU di Kalimantan Barat memiliki rasio yang cukup baik.

Tabel II.24
Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional (persen) (PB)

Satker BLU	2017			2018		
	Pendapatan PNBP	Biaya Operasional	%	Pendapatan PNBP	Biaya Operasional	%
Politekkes Pontianak	35.701,46	61.188,41	58	30.387,20	63.609,58	48
RS Bhayangkara Pontianak	32.878,48	33.867,61	97	30.342,74	36.165,90	84
Universitas Tanjungpura	Belum Menjadi Satker BLU			413.716,03	453.559,03	91

Sumber: SPAN, LRA, Neraca, e rekon diolah

Berdasarkan tabel di atas, di tahun 2017 pada Satker BLU Politeknik Kesehatan Pontianak perbandingan antara pendapatan BLU dengan biaya operasional didapat hasil 58 persen (rasio PNBP terhadap biaya operasional 58 persen). Sedangkan untuk tahun 2018 rasio kemandirian Satker BLU Poltekkes Pontianak menurun menjadi 48 persen. Penurunan ini disebabkan jumlah pendapatan PNBP yang menurun sedangkan biaya operasional meningkat. Penurunan pendapatan karena penurunan jumlah mahasiswa baru.

RS Bhayangkara Pontianak dari hasil perhitungan rasio pendapatan BLU dengan biaya operasional didapat hasil 97 persen di tahun 2017 dan mengalami penurunan menjadi 84 persen. Penurunan rasio disebabkan penurunan pendapatan dan sebaliknya belanja meningkat. Penurunan pendapatan disebabkan pendapatan yang berasal dari rawat inap berkurang. Hal ini disebabkan penghapusan gedung layanan lama yang disertai dengan renovasi (pembangunan) gedung rawat inap baru. Namun secara rasio, RS Bhayangkara masih memiliki tingkat kemandirian yang sangat baik, yaitu 84 persen. Universitas Tanjungpura ditahun 2018 sebagai satker BLU baru memiliki rasio 91 persen. Ini menandakan Untan sebagai satker BLU memiliki kemandirian yang sangat baik..

2. Analisis Efektifitas BLU

Analisa efektifitas BLU adalah analisis untuk mengetahui efektifitas dibentuknya BLU yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan

prinsip ekonomi, produktifitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Peningkatan layanan antara lain juga dapat dilihat dari pendapatan yang dihasilkan dari layanan BLU. Analisis efektifitas BLU didapat dari rasio pendapatan operasional terhadap asset tetap atau rasio perputaran asset tetap Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui kemampuan BLU untuk menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya.

Tabel II.25
Analisis Efektifitas BLU (ribu Rp)

Satker BLU	2017			2018		
	Pendapatan Operasional	Aset Tetap	%	Pendapatan Operasional	Aset Tetap	%
Politeknik Kesehatan Pontianak	34.991.563	211.819.515	16.99	30.387.204	212.867.785	14,28
RS Bhayangkara Pontianak	32.878.479	26.260.756	125	30.342.738	48.326.558	62,79
Universitas Tanjungpura	Belum Menjadi Satker BLU			413.716.032.	21.754.105.948	1,90

Sumber: SPAN, LRA, neraca, e-rekon diolah

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa perputaran aset tetap satker BLU Politekkes Pontianak tahun 2017 sebesar 16.9 persen dan mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 14,28 persen. Dari rasio tersebut artinya kemampuan Poltekkes Pontianak memperoleh pendapatan berdasarkan aset tetap yang dimilikinya adalah sebesar 14,28 persen. Penurunan rasio ini disebabkan pendapatan BLU yang menurun di tahun 2018.

Perputaran aset untuk Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak pada tahun 2018 mengalami penurunan dari 125 persen di tahun 2017 menjadi 62,79 persen di tahun 2018. Penurunan rasio ini disebabkan penurunan pendapatan BLU dan juga kenaikan aset tetap. Kemampuan RS Bhayangkara Pontianak tahun 2018 untuk memperoleh pendapatan BLU berdasarkan aset tetap yang dimilikinya adalah 62,79 persen.

Kemampuan Untan memperoleh pendapatannya berdasarkan asset tetap yang dimilikinya di tahun 2018 sebesar 1,90 persen.

3. Analisis Legal BLU

Pemberian fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Satker BLU adalah tetap dalam koridor penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Satker BLU tetap

mempunyai kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang telah diatur di dalam undang-undang

Tabel II.26
Kepatuhan BLU terhadap peraturan pengelolaan Keuangan

Kewajiban	Politeknik Kesehatan Pontianak		RS Bhayangkara Pontianak		Universitas Tanjungpura	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Penyusunan & Penyampaian Rencana Bisnis Anggaran	Ya	-	Ya	-	Ya	-
Penyusunan & penyampaian Lap. Keu (standar akuntansi Keu)	Ya	-	Ya	-	Ya	-
Penyampaian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU	Ya	-	Ya	-	Ya	-
Persetujuan Tarif Layanan oleh Menteri Keuangan	Ya	-	Ya	-	-	-
Persetujuan Pembukaan Rekening	Ya	-	Ya	-	Ya	-
Penyusunan SOP pengelolaan keuangan BLU	Ya	-	Ya	-	-	-

Sumber: PPK BLU dan KPPN diolah

Pengelolaan keuangan Saker BLU Politekkes Pontianak dan Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak sudah memenuhi ketentuan (peraturan perundang-undangan), sedangkan Universitas Tanjungpura Pontianak untuk persetujuan tarif layanan serta SOP pengelolaan keuangan BLU telah diajukan dan sedang menunggu penetapan dari Menteri Keuangan.

G. PENGELOLAAN MANAJEMEN INVESTASI PUSAT

Dalam rangka peningkatan pembangunan di Wilayah Kalimantan Barat, Pemerintah berusaha memperdayakan potensi yang ada guna mendukung pembangunan ekonomi di daerah, diantaranya berupa Dana Invstasi Pusat yang diberikan kepada Pemda melalui pinjaman dan Investasi Kredit Program (KUR) kepada UMKM di Wilayah Kalimantan Barat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat berkewajiban menatausahakan investasi pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi khususnya penerusan pinjaman (*Subsidary Loan Agreement*) dan Kredit Program.

a. Penerusan Pinjaman (*Subsidary Loan Agreement)*

Penerusan Pinjaman Pemerintah Pusat (*Subsidiary Loan Agreement*) kepada Pemerintah Daerah/Perusahaan Daerah/BUMD. Penerusan pinjaman yang diberikan kepada PDAM maupun Pemda dimaksudkan untuk meningkatkan atau memperbaiki

tata kelola penyediaan air minum kepada masyarakat baik dari segi infrastruktur maupun percepatan penyedian air minum.

Pada tahun 2018 masih terdapat 1 (satu) pinjaman BUMD dan Pemda menunggu penyelesaian penghapusan, yaitu Pemerintah Kota Singkawang dengan sisa hutang sebesar Rp17.666.354.370,24 yang diselesaikan melalui proses pelaksanaan *debt swap* sebesar Rp13.986.919.287,15 dan penghapusan utang murni Rp3.679.435.083,09. Pemerintah Kota Singkawang telah mengalokasikan program *debt swap* pada APBD tahun anggaran 2017 melalui DPPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa kegiatan Pembangunan Bangsal Ruang Inap Kelas I RSUD Abdul Aziz di Singkawang dengan realisasi pembangunan sebesar Rp14.407.200.000 dan telah dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat.

Tabel II.27
Profil Oustanding Penerusan Pinjaman BUMD dan PEMDA di Prov. Kalbar Tahun 2018

No.	Instansi	No. Perjanjian	No. Loan	Sisa Pinjaman	Keterangan
1	Pemerintah Kota Singkawang	RDA-236/DP3/1996	2094101	17.666.354.370,24	Diselesaikan melalui program restrukturisasi sesuai surat Walikota Singkawang Nomor: 900/983/BKD tanggal 11 Oktober 2017, berdasarkan surat Direktur SMI nomor S-11978/PB/2017 tanggal 29 Desember 2017 persetujuan rencana pelaksanaan *debt swap* telah dilakukan penilaian oleh BPKP

Sumber: Data Kanwil, Data Pemda/BUMN/BUMD Penerima SLA, Dit SMI

b. Kredit Program

Investasi Pemerintah Pusat lainnya adalah Program Kredit Program berupa pemberian tambahan modal usaha kepada UMKM (KUR) Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dalam tahun 2018 telah mencapai sebesar Rp1.615,08 miliar (41.511 UMKM/debitur), jika dibandingkan dengan periode tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar Rp129,22 miliar atau 11,53 persen.

Tabel II.28
Penyaluran KUR Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Akad	Outstanding	Debitur	Akad	Outstanding	Debitur
1	Kalimantan Barat	1.070.000.000	860.050.414	34	1.650.000.000	1.322.551.044	29
2	Kab. Sambas	106.061.227.800	75.741.618.281	3.963	172.012.480.000	131.171.405.423	5.063
3	Kab. Mempawah	92.628.821.200	69.138.102.939	3.872	117.141.764.400	85.088.553.814	3.853
4	Kab. Sanggau	93.413.500.000	76.096.468.968	3.391	137.303.602.000	109.034.348.387	3.683
5	Kab. Ketapang	92.304.700.000	60.810.184.544	3.046	134.775.029.932	100.518.761.192	3.445
6	Kab. Sintang	127.052.840.000	90.115.458.983	2.909	169.583.544.950	129.329.399.488	3.539
7	Kab. Kapuas Hulu	62.871.500.000	52.057.913.072	2.383	74.602.388.591	59.237.568.985	2.755
8	Kab. Bengkayang	46.932.401.600	34.892.843.423	1.879	62.169.980.000	49.169.721.450	1.909
9	Kab. Landak	37.107.178.000	30.447.918.612	1.191	84.971.200.000	67.210.075.906	2.710
10	Kab. Sekadau	56.915.000.000	47.006.227.008	1.426	82.259.245.000	65.721.832.439	1.715
11	Kab. Melawi	35.905.500.000	29.424.535.803	977	60.856.245.000	48.355.874.650	1.378
12	Kab. Kayong utara	16.898.925.400	9.451.721.911	709	24.188.290.000	19.159.203.813	826
13	Kab. Kubu Raya	123.339.411.688	91.634.161.682	3.258	151.025.480.000	121.428.241.648	3.883
14	Kota Pontianak	176.990.064.000	129.084.363.890	4.221	256.541.689.000	198.050.513.135	4.730
15	Kota Singkawang	50.988.701.600	34.219.388.944	1.445	85.998.890.400	64.897.718.967	1.993
	Total	1.120.479.771.288	830.980.958.474	34.704	1.615.079.829.273	1.249.695.770.341	41.511

Sumber: Dit SMI 2018

Penyaluran KUR tersebar di beberapa Lembaga Keuangan di wilayah Kalimantan Barat, melalui aplikasi *online system* data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), untuk wilayah Kalbar terdapat 16 lembaga keuangan yang ditunjuk sebagi penyalur. Sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel II.29
Penyaluran KUR per Bank Provinsi Kalbar Tahun 2018

No.	Bank	Jumlah	
		Rupiah	Debitur
1	Bank Rakyat Indonesia	797.470.243.932,00	32.135
2	Bank Mandiri	281.552.510.800,00	3.629
3	Bank Negara Indonesia	334.998.614.541,00	2.243
4	Bank Central Asia	1.580.000.000,00	22
5	BPD Kalimantan Barat	175.692.000.000,00	2.025
6	BPD Jawa Tengah	500.000.000,00	1
7	Bank Arta Graha	800.000.000,00	32
8	Bank Maybank	450.000.000,00	1
9	BPD Papua	40.000.000,00	1
10	Bank Sinarmas	925.000.000,00	4
11	Bank Tabungan Pensiunan	300.000.000,00	2
12	BRI Syariah	14.046.000.000,00	582
13	Bank Bukopin	2.460.000.000,00	9
14	CTBC Bank	29.490.000,00	2
15	TKI-992	81.470.000,00	6
16	UMI 990	4.154.500.000,00	817
		1.615.079.829.273,00	41.511

Sumber: Dit SMI 2018

Tahun 2018 sesuai dengan catatan dalam aplikasi SIKP penyaluran KUR mencapai sebesar Rp1.615,08 miliar dengan jumlah debitur 41.511 orang, yang terdiri dari debitur Usaha Mikro sebesar Rp712,88 miliar (34.623 debitur), Ritel sebesar Rp897,64 miliar (6.042 debitur), TKI sebesar Rp397,97 juta (6 debitur), dan Kredit Ultra Mikro (UMI) sebesar Rp4,15 miliar (817 debitur). Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan lembaga terbesar penyalur KUR yakni sebesar Rp797,47 miliar. Sebagian besar investasi didominasi oleh tiga sektor terbesar antara lain: sektor perdagangan besar dan eceran, sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, dan industri pengolahan.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit / pembiayaan modal kerja dan investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup untuk meningkat kesejahteraan masyarakat dengan tingkat bunga yang terjangkau oleh masyarakat. Hasil monitoring Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalbar terhadap penyaluran kredit program dapat dikatakan bahwa Pemerintah sangat memperhatikan dan mengharapkan adanya perkembangan usaha serta peningkatan ekonomi bagi UMKM di wilayah Kalimantan Barat, hal ini menunjukan bahwa program KUR sangat bermanfaat dan berdampak terhadap perkembangan kegiatan usaha bahkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Dalam perkembangannya, hasil survey yang diambil secara sampling terhadap 86 debitur program KUR di wilayah Kalbar, rata-rata kegiatan usaha yang dilakukan debitur menunjukan adanya peningkatan omzet dan keuntungan rata-rata sebesar 16,67 persen.

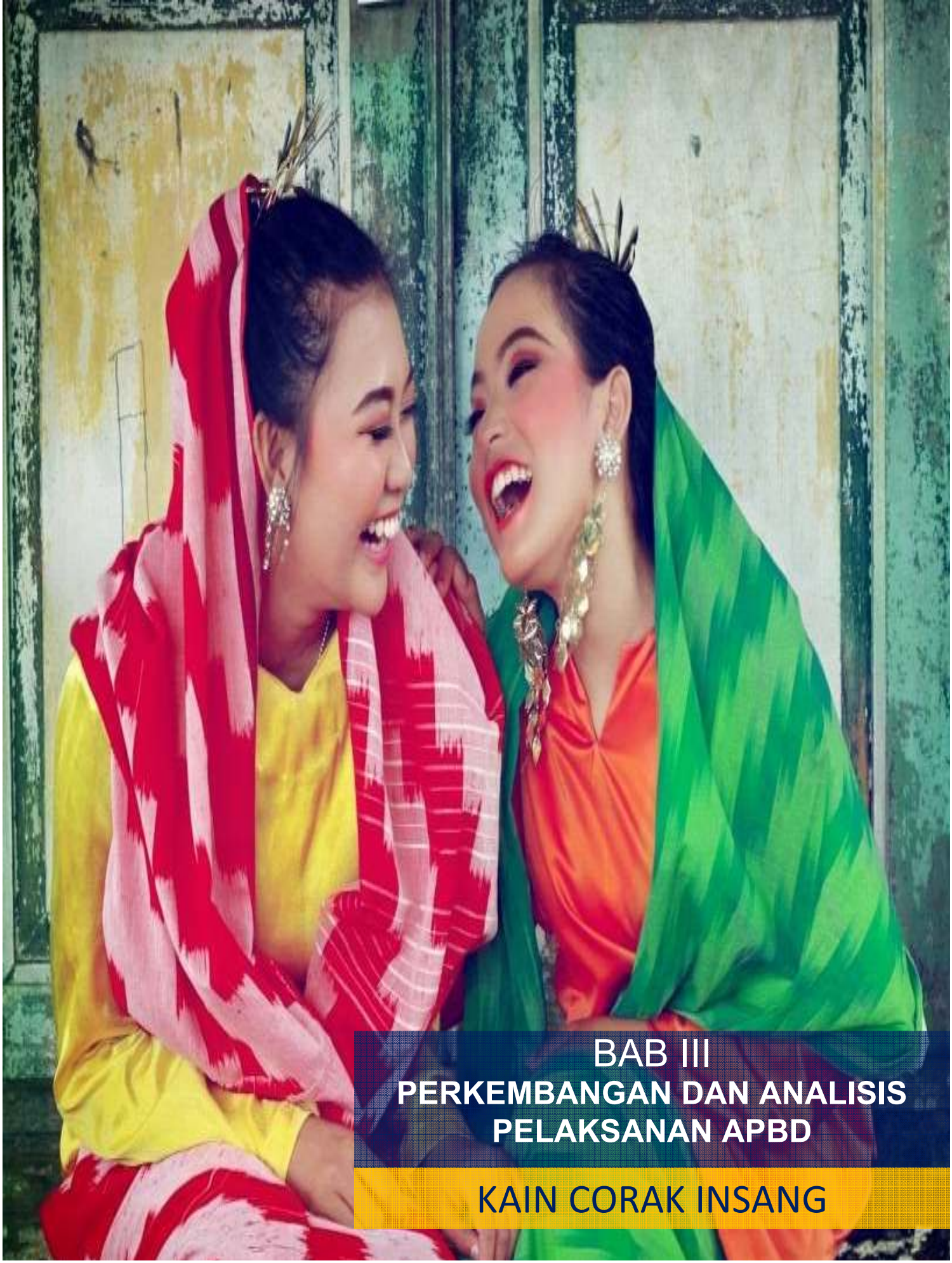

BAB III
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAN APBD

KAIN CORAK INSANG

BAB III

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAN APBD

A. APBD TINGKAT PROVINSI

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan faktor pendorong utama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah.Selain itu, tingginya kinerja pelaksanaan APBD juga merupakan salah satu penentu tercapainya target sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat sejahtera dan mandiri. Pemerintah daerah menggunakan APBD sebagai instrumen utama bagi kebijakan publik di daerahnya.

Tabel III.1
Profil APBD Kalimantan Barat Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi
Tahun Anggaran 2018

Uraian	2017		%	2018		%
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
Pendapatan	**23,353.93**	**23,216.40**	**99.41**	**24,433.26**	**24,229.52**	**99.17**
PAD	3,075.83	3,464.42	112.63	3,606.21	3,909.03	108.40
Pendapatan Transfer	19,710.97	19,303.18	97.93	19,768.97	19,854.33	100.43
Lain-lain Pendapatan yang sah	430.13	448.80	104.34	1,058.09	466.16	44.06
Belanja dan Transfer	**23,743.97**	**23,140.82**	**97.46**	**24,998.29**	**23,458.17**	**93.84**
Belanja Operasi	15,129.31	14,458.84	93.58	16,490.05	15,098.51	91.56
Belanja Modal	5,318.18	5,326.76	106.63	5,056.28	4,700.16	92.96
Transfer	3,296.48	3,328.88	100.94	3,451.97	3,659.50	106.01
Pembiayaan Netto	**442.00**	**342.05**	**73.92**	**591.65**	**445.75**	**75.34**
Penerimaan Pembiayaan	820.30	719.52	87.71	1,002.29	856.28	85.43
Pengeluaran Pembiayaan	456.86	377.47	90.80	410.64	410.54	99.98
Sisa Lebih (Sisa Kurang)		**417.63**			**1,217.10**	

Sumber: Pemda Kab/Kota Prov. Kalbar, diolah (data unaudited)*

Anggaran pendapatan pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi tahun 2017. Anggaran pendapatan naik sebesar Rp 1.079,4 miliar menjadi 24.433,26 miliar atau 4,62%. Anggaran belanja juga mengalami kenaikan sebesar 5.28% menjadi sebesar Rp 24.998,29 miliar. Kondisi APBD pada tahun 2018 menunjukkan kinerja yang baik, dengan menghasilkan surplus Rp 1.217,10 miliar di wilayah Kalimantan Barat sebagai indikasi dukungan terhadap kebijakan fiskal ekspansif yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Selain sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat, kondisi ini menunjukkan kemauan pemerintah daerah dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing.

B. JENIS PENDAPATAN DALAM APBD

Sebagaimana terlihat pada Tabel III.2, jenis pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan serta Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.2
Jenis Pendapatan APBD di Propinsi Kalimantan Barat (Miliar Rp)

Uraian	2017			2018		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
PAD	**3,075.83**	**3,464.42**	**112.63**	**3,606.21**	**3,909.03**	**108.40**
Pajak Daerah	2,106.39	2,430.39	115.38	2,316.63	2,866.88	123.75
Retribusi Daerah	147.96	147.98	100.01	138.15	133.84	96.88
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	146.97	152.99	104.10	162.27	171.61	105.76
Lain-lain PAD yang sah	674.51	733.06	108.68	989.17	736.71	74.48
Pendapatan Transfer	**19,710.97**	**19,303.18**	**97.93**	**19,768.97**	**19,854.33**	**100.43**
Dana Bagi Hasil	839.75	629.82	75.00	778.44	786.54	101.04
Dana Alokasi Umum	11,995.99	11,794.43	98.32	11,820.60	11,819.89	99.99
Dana Alokasi Khusus	5,104.04	4,825.36	94.54	5,186.71	4,890.24	94.28
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	967.17	1,349.79	139.56	1,200.05	1,225.27	102.10
Transfer Pemerintah Provinsi	804.02	703.78	87.53	783.17	1,132.39	144.59
Lain-lain pendapatan yang Sah	**430.13**	**448.80**	**104.34**	**848.76**	**466.16**	**54.92**
Pendapatan Hibah	9.83	77.41	787.30	366.06	142.66	38.97
Pendapatan Dana Darurat	-					
Pendapatan Lainnya	420.30	371.39	88.36	482.69	323.50	67.02

Sumber: Pemerintah Kab/Kota Prov. Kalbar, diolah(data unaudited)*

Pada tahun 2018 realisasi Pendapatan Asli Daerah se-Kalimantan Barat mengalami peningkatan sebesar Rp 444.61 miliar atau 12.83% dibandingkan tahun 2017 dengan realisasi melebihi target, yaitu 108,40% dari pagu yang dianggarkan. Kenaikan pendapatan ini terutama ditopang oleh Pajak Daerah yang terealisasi 123.75% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipsihkan yang mencapai 105.76%.

Realisasi pendapatan APBD Pemda se-Provinsi Kalimantan Barat didominasi oleh Pendapatan transfer sebesar 81,94%, kemudian PAD sebesar 16.13% dan Lain-lain

Pendapatan yang Sah sebesar 1.92%, Dari data ini dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih bergantung dana dari pemerintah pusat.

Grafik III.1
Komposisi Realisasi APBD Prov.Kalbar 2017

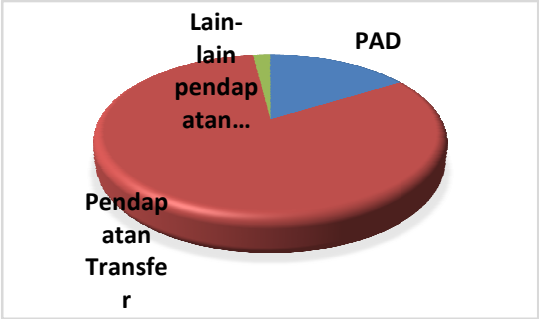

Sumber: Pemerintah Kab/Kota Prov. Kalbar, diolah(data unaudited)*

Kontribusi komponen PAD diharapkan dapat terus meningkat di masa mendatang dan diharapkan menjadi sumber utama pendapatan bagi pemerintahan daerah. Apabila PAD sudah menjadi sumber utama pendapatan pemerintah daerah, berarti bahwa pemerintah daerah tersebut telah mandiri secara finansial.

1. **Analisis Komposisi Pendapatan Daerah**

Rasio Pendapatan dan Belanja APBD merupakan rasio yang mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendanai belanja daerah.

Grafik III.2
Rasio Realisasi Pendapatan Terhadap Realisasi Belanja APBD Kalbar 2017-2018

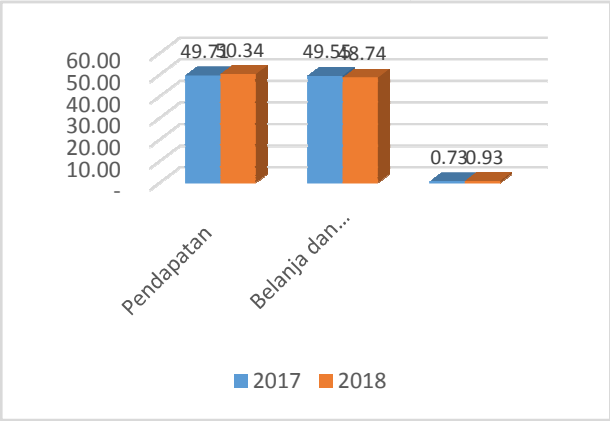

Sumber: Pemerintah Kab/Kota Prov. Kalbar, diolah(data unaudited)*

Jika dilihat pada grafik diatas pada tahun 2017 hingga 2018 realisasi APBD mengalami peningkatan kualitas, di mana tahun 2018 rasio pendapatan lebih besar nilainya dibandingkan dengan realisasi belanjanya, yaitu 50.34 : 48.74. Angka ini lebih besar daripada tahun 2016 yaitu 49.71 : 49.55.

2. **Analisis Mobilisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan transfer pemerintah pusat (non PAD) sifatnya

lebih terikat. Dengan penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Pada tahun 2018 realisasi PAD mencapai 108.40% dari target yang ditetapkan dan mengalami kenaikan sebesar Rp 444.61 miliar atau 12.83% dibandingkan tahun 2017. Realisasi Pajak Daerah tahun 2018 mengalami kenaikan 17.96% (yoy), Restribusi Daerah turun sebesar 15,45% (yoy), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan naik sebesar 12.17% (yoy) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah naik sebesar 0.50% (yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017. Dengan meningkatnya PAD maka pemerintah daerah akan lebih mudah menjalankan fungsinya secara efesien dan efektif sehingga dapat secara leluasa dan mandiri memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Grafik III.3
Komposisi Realisasi PAD Pemda se-Kalbar Tahun 2018

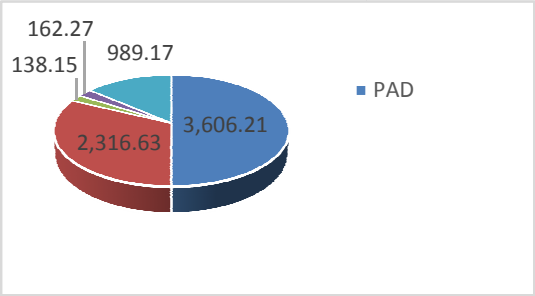

Dari grafik disamping terlihat Pajak Daerah mendominasi sebesar 64.24%, kemudian Restribusi Daerah sebesar 3.8%, Lain-lain PAD yang Sah sebesar 27.42% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 4.49%.

C. JENIS BELANJA DALAM APBD

1. Berdasarkan Klasifikasi Urusan

APBD diklasifikasikan menjadi 35 urusan daerah, yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, Kesatuan Bangsa dan Politik, Perencanaan Pembangunan, Penataan Ruang, ESDM, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sosial, KUKM, Perdagangan, Kebudayaan, Kependudukan dan Catatan Sipil, dan seterusnya.

Tahun 2018 total belanja terjadi peningkatan 1,37% dibanding tahun sebelumnya yaitu dari Rp 23.140,82 miliar, menjadi Rp 23.458,16 miliar. Dari ke-35 urusan daerah tersebut diatas yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah secara berturut-turut adalah pemerintahan umum (30,57%), pendidikan (22,00%), pekerjaan umum (16,25%) dan kesehatan (13.57%). Sementara itu urusan pertanian hanya mendapatkan alokasi pagu sebesar (2.72%) atau sebesar Rp 678.85 miliar padahal pertanian merupakan penggerak

utama perekonomian di Kalimantan Barat. Alokasi APBD berdasarkan urusan pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.3
Anggaran Kalimantan Barat Berdasarkan Klasifikasi Urusan

No	APBD Berdasarkan Urusan	2017		2018	
		Anggaran	Porsi (%)	Anggaran	Porsi (%)
	Urusan Wajib				
1	Pendidikan	5,545.64	23.36	5,499.63	22.00
2	Kesehatan	2,972.73	12.52	3,391.45	13.57
3	Pekerjaan Umum	4,089.85	17.22	4,062.30	16.25
4	Perumahan	425.68	1.79	506.38	2.03
5	Penataan Ruang	14.11	0.06	114.43	0.46
6	Perencanaan Pembangunan	70.56	0.30	68.05	0.27
7	Perhubungan	261.05	1.10	253.64	1.01
8	Lingkungan Hidup	176.39	0.74	204.31	0.82
9	Pertanahan	119.94	0.51	87.64	0.35
10	Kependudukan dan Catatan Sipil	96.43	0.41	100.94	0.40
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47.04	0.20	38.98	0.16
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	35.28	0.15	56.01	0.22
13	Sosial	141.11	0.59	140.81	0.56
14	Ketenagakerjaan	75.26	0.32	64.57	0.26
15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	105.83	0.45	81.95	0.33
16	Penanaman Modal	70.56	0.30	84.24	0.34
17	Kebudayaan	23.52	0.10	30.54	0.12
18	Kepemudaan dan Olah Raga	117.59	0.50	119.62	0.48
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	202.26	0.85	106.58	0.43
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	7,257.78	30.57	8,193.25	32.78
21	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	87.02	0.37	62.49	0.25
22	Statistik	2.35	0.01	1.82	0.01
23	Kearsipan	18.81	0.08	21.00	0.08
24	Komunikasi dan Informatika	91.72	0.39	104.64	0.42
25	Ketahanan Pangan	166.98	0.70	160.03	0.64
26	Perpustakaan	77.61	0.33	69.65	0.28
	Urusan Pilihan				
27	Pertanian	799.63	3.37	678.85	2.72
28	Kehutanan	79.96	0.34	142.01	0.57
29	Energi dan Sumberdaya Mineral	56.44	0.24	41.65	0.17
30	Pariwisata	68.20	0.29	13.19	0.05
31	Kelautan dan Perikanan	112.89	0.48	140.77	0.56
32	Perdagangan	87.02	0.37	90.99	0.36

No	APBD Berdasarkan Urusan	2017		2018	
		Anggaran	Porsi (%)	Anggaran	Porsi (%)
33	Industri	14.11	0.06	16.31	0.07
34	Ketransmigrasian	9.41	0.04	4.95	0.02
35	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	223.22	0.94	244.63	0.98
		23,743.97	100,00	24,998.29	100,00

Sumber: Pemerintah Kab/Kota Prov. Kalbar, diolah(data unaudited)*

Pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017 mengalokasikan anggaran belanja cukup besar pada sektor pemerintahan umum, pendidikan dan pekerjaan umum, mengingat masih perlu penataan sumber daya manusia dan infrastruktur. Bidang Pendidikan dialokasikan hingga sebesar Rp 5499.63 miliar atau sebesar 22% masih memenuhi ketentuan alokasi minimal sebesar 20% dan bidang kesehatan sebesar Rp 3391,45 miliar atau sebesar 13.57% telah memenuhi ketentuan alokasi minimal sebesar 5%.

2. Rincian Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja (Sifat Ekonomi)

Struktur belanja daerah terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes, dan Belanja Tidak Terduga.

Belanja Pegawai tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 6,86% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp 5.318,17 miliar, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp 5.056,27 miliar.

Tabel III.4
APBD Kalimantan Barat Berdasarkan Klasifikasi Jenis Belanja *(miliar rupiah)*

Jenis Belanja	2017		%	2018		%
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	8,639.98	7.463,06	93,19	8,415.58	7,975.12	94.77
Belanja Barang	5,127.54	5.559,12	85,69	6,068.72	5,168.97	85.17
Belanja Modal	5,318.18	5.326,76	90,95	5,056.28	4,700.16	92.96
Belanja Bunga	28.17	0,93	100,00	2.94	3.23	110.02
Belanja Hibah	1,229.87	1.359,38	98,45	1,901.85	1,884.93	99.11
Belanja Bantuan sosial	46.53	74,04	87,88	69.87	66.25	94.82
Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	731.05	733,04	100,13	901.77	995.33	110.37
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	2,565.42	2.595,84	99,57	2,550.20	2,657.01	104.19
Belanja tidak terduga	57.21	26,35	56,37	31.10	7.16	23.03

Sumber: Pemerintah Kab/Kota Prov. Kalbar, diolah(data unaudited)*

D. Analisa Belanja Daerah

a) Alokasi Sektor Konsumtif dan Produktif

Tabel III.5
Alokasi Belanja untuk Sektor Konsumtif dan Produktif

Jenis Belanja	2017		%	2018		%
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	8,639.98	7463.06	93,19	8,415.58	7,975.12	94.77
Belanja Barang	5,127.54	5559.12	85,69	6,068.72	5,168.97	85.17
Belanja Modal	5,318.18	5326.76	90,95	5,056.28	4,700.16	92.96
Belanja Bunga	28.17	0.93	100,00	2.94	3.23	110.02
Belanja Hibah	1,229.87	1359.38	98,45	1,901.85	1,884.93	99.11
Belanja Bantuan sosial	46.53	74.04	87,88	69.87	66.25	94.82
Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	731.05	733.04	100,13	901.77	995.33	110.37
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	2,565.42	2595.84	99,57	2,550.20	2,657.01	104.19
Belanja tidak terduga	57.21	26.35	56,37	31.10	7.16	23.03

Sumber: Pemerintah Kab/Kota Prov. Kalbar, diolah(data unaudited)*

Dilihat dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa alokasi APBD masih didominasi untuk belanja yang bersifat konsumtif,yang mempunyai multiefek jangka pendek, dan didominasi untuk mencukupi kebutuhan belanja pegawai sebesar 34%. Sedang untuk alokasi Belanja Modal sebesar 20,04%, ini sangat berpengaruh terhadap peluang terbukanya lapangan pekerjaan untuk menambah kesejahteraan masyarakat, karena belanja modal mempunyai multiefek jangka panjang.

b) Alokasi Belanja Menurut Fungsi

Terdapat 9 fungsi dalam APBD suatu daerah.Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi pelayanan umum, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan dan fungsi perlindungan sosial. Dari fungsi-fungsi tersebut ada 2 fungsi yang menjadi priortas antara lain alokasi pendidikan dan kesehatan sebagai berikut:

Tabel III.6
Alokasi Belanja Pendidikan dan Kesehatan (Miliar rupiah)

APBD Menurut Fungsi	2015	2016	2017	2018
Pendidikan	4.948,88	4.858,51	5735,82	5,499.63
Kesehatan	2.116,22	2.611,70	3.046,70	3,391.45

Sumber: Pemda Kab/Kota Prov. Kalbar.

Infrastruktur Pendidikan menunjukkan pertumbuhan dari tahun ketahun. Hal ini menujukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap dunia Pendidikan tidak pernah berkurang. Pertambahan infrastruktur tersebut seperti ditunjukkan dalam table berikut:

Tabel III.7
Perkembangan Infrastruktur Fungsi Pendidikan tahun 2014 s.d 2017

Infrastruktur Pendidikan	2015	2016	2017	2018
Sekolah Dasar	4,336	4,367	4,396	4,419
Sekolah Menengah Pertama	1,209	1,278	1,311	1,323
Sekolah menengah Umum	364	410	425	436
Sekolah Menegah Kejuruan	179	195	205	221
Sekolah Luar Biasa	N/A	21	21	21

Sumber: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id

Tabel III.8
Perkembangan Infrastruktur Fungsi Kesehatan Tahun 2014 s.d 2017

Infrastruktur Kesehatan	2014	2015	2016	2017
Puskesmas	239	243	244	244
Puskesmas Pembantu	872	881	899	906
Puskesmas Keliling	272	289	277	207
Rumah Sakit	44	44	45	46

Sumber :*BPS, Kalbar*

E. PENGELOLAAN BLU DAERAH

1. Profil dan jenis layanan satker daerah

Provinsi Kalimantan Barat memiliki 8 (delapan) BLUD yang tersebar pada beberapa Kabupaten/Kota dan kesemuanya bergerak di bidang pelayanan kesehatan, seperti tabel dibawah ini:

Tabel III.9
Profil BLUD Kabupaten/Kota Tahun 2018

No	Jenis Layanan	Kabupaten/Kota	Satker BLUD
1	Kesehatan	Sintang	RSUD Dr. Ade M. Djoen
2	Kesehatan	Sambas	RSUD Pemangkat Sambas
3	Kesehatan	Sambas	RSUD Sambas
4	Kesehatan	Sambas	Puskesmas Selakau
5	Kesehatan	Sambas	Puskesmas Selakau Timur
6	Kesehatan	Sambas	Puskesmas Salatiga
7	Kesehatan	Sambas	Puskesmas Sebangkau
8	Kesehatan	Sambas	Puskesmas Pemangkat
9	Kesehatan	Sambas	Puskesmas Semparuk

No	Jenis Layanan	Kabupaten/Kota	Satker BLUD
10	Kesehatan	Sambas	Puskesmas Sungai Kelambu
11	Kesehatan	Sambas	Puskesmas Tebas
12	Kesehatan	Sambas	Puskesmas Segarau
13	Kesehatan	Sambas	Puskesmas Matang Suri
14	Kesehatan	Sambas	Puskesmas Sentebang
15	Kesehatan	Sambas	Puskesmas Tekarang
16	Kesehatan	Sambas	Puskesmas Sungai Baru
17	Kesehatan	Sambas	Puskesmas Sekura
18	Kesehatan	Sambas	Puskesmas Pimpinan
19	Kesehatan	Sambas	Puskesmas Sebawi
20	Kesehatan	Sambas	Puskesmas Terigas
21	Kesehatan	Sambas	Puskesmas Sambas
22	Kesehatan	Sambas	Puskesmas Semberang
23	Kesehatan	Sambas	Puskesmas Sejangkung
24	Kesehatan	Sambas	Puskesmas Sajad
25	Kesehatan	Sambas	Puskesmas Simpang Empat
26	Kesehatan	Sambas	Puskesmas Paloh
27	Kesehatan	Sambas	Puskesmas Galing
28	Kesehatan	Sambas	Puskesmas Sajingan Besar
29	Kesehatan	Sambas	Puskesmas Satai
30	Kesehatan	Sambas	Puskesmas Subah
31	Kesehatan	Sambas	RSUD Sanggau
32	Kesehatan	Ketapang	RSUD dr. Agusjam
33	Kesehatan	Singkawang	RSUD dr. Abdul Aziz
34	Kesehatan	Sekadau	RSUD Sekadau
35	Kesehatan	Pontianak	RSUD Dr. Soedarso

Sumber : *http://keuda.kemendagri.go.id/datin/index/3/2014*

2. Perkembangan pengelolaan aset, PNBP, dan RM BLU Daerah

Tingkat kemandirian BLUD dapat ditinjau dari beberapa indikator,di antaranya adalah perkembangan aset yang dikelolanya dan peningakatan pagu serta realisasi pendapatan PNBP. Aset mempunyai arti penting karena mencerminkan kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas, apabila terjadi peningkatan dapat diartikan bahwa tingkat kemandirian BLUD lebih terjaga dan sebaliknya apabila terjadi penurunan dapat diartikan BLUD tersebut kurang sehat secara finansial.

Tabel III.10
Perkembangan Pengelolaan Aset Satker BLUD di Provinsi Kalimantan Barat

No	Satker BLUD	Nilai Aset 2016	Nilai Aset 2017
1	RSUD Dr. Ade M. Djoen	N/A	N/A
2	RSUD Pemangkat Sambas	47.696.539.650,44	71.784.583.549,90
3	RSUD Sambas	32.846.025.171,98	36.819.020.554,00
4	RSUD Sanggau	16.856.301.236,49	19.786.598.776,48
5	RSUD Dr. Agusdjam Ketapang	74.988.538.288,00	82.487.392.116,00
6	RSUD Singkawang	73.931.412451,44	84.921.404.110,00
7	RSUD Sekadau	51.428.954.262,68	57.804.460.308,58
8	RSUD Dr. Soedarso	151.499.897.557,44	263.482.981.670,00

Sumber :*BPS, Kalbar*

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui secara umum bahwa telah terjadi peningkatan nilai asset yang cukup signifikan, peningkatan tertinggi dicapai oleh BLUD RSUD Pemangkat Sambas naik hingga 50,50% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel III.11
Perkembangan Pagu Satker BLUD di Provinsi Kalimantan Barat

No	Satker BLUD	2016	2017
1	RSUD Dr. Ade M. Joen Sintang	N/A	34.695.879.659,42
2	RSUD Pemangkat Sambas	51.767.869.950,00	35.574.656.912,12
3	RSUD Sambas	49.366.026.815,57	31.096.975.213,22
4	RSUD Sanggau	30.641.269.495,89	27.999.585.127,06
5	RSUD Dr. Agusdjam Ketapang	114.437.298.475,00	145.671.144.690,00
6	RSUD Singkawang	52.424.370.947,72	70.619.782.385,44
7	RSUD Sekadau	9.618.787.297,00	6.316.155.000,00
8	RSUD Dr. Soedarso	267.674.923.200,00	365.367.597.600,00

Sumber :*BPS, Kalbar*

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa perkembangan pagu BLUD bervariatif RSUD Pemangkat Sambas, RSUD Agusdjam Ketapang, RSUD Singkawang serta RSUD Soedharso Pontianak mengalami peningkatan pagu dan RSUD Sanggau dan RSUD Pemangkat Sambas, RSUD Sekadau terjadi penurunan pagu, hal ini mengindikasikan bahwa tingkat perkembangan BLUD di wilayah Kalimantan Barat masih perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut. Peningkatan tertinggi dicapai oleh BLUD RSUD Soedarso naik hingga 36,50% dibanding tahun sebelumnya dan penurunan pagu terendah dialami oleh BLUD RSUD Sekadau turun hingga 34,34% dibanding tahun sebelumnya.

3. Analisis Legal

Tata kelola keuangan BLUD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61/2007 tentang Pedoman TeknisPengelolaan Keuangan BLUD.Dalam pelaksanaannya pengelolaan BLUD juga mempedomani PP Nomor23/2006joPP Nomor74/2012 tentang Pengelolaan BLU. Secara umum pada prinsipnya,norma, standar, kriteria, dan prosedur yang berlaku pada BLU Pusat dapat diterapkan pada BLUD. Sebagai instansi lingkup pemerintah daerah dalam pelaksanaannya BLUD juga berpedoman pada peraturan daerah masing-masing kabupaten/kota.

Tabel III.12
Analisis Aspek Legal BLU Daerah Provinsi Kalbar

Satker BLUD	Aspek	Peraturan Bupati/Walikota
RSUD Dr. Ade M. Joen Sintang	Kelembagaan	Sesuai
	Tata Kelola	Sesuai
	SDM	Sesuai
	Pengendalian	Sesuai
RSUD Pemangkat Sambas	Kelembagaan	Sesuai
	Tata Kelola	Sesuai
	SDM	Sesuai
	Pengendalian	Sesuai
RSUD Sambas	Kelembagaan	Sesuai
	Tata Kelola	Sesuai
	SDM	Sesuai
	Pengendalian	Sesuai
RSUD Sanggau	Kelembagaan	Sesuai
	Tata Kelola	Sesuai
	SDM	Sesuai
	Pengendalian	Sesuai
RSUD Dr. Agusdjam Ketapang	Kelembagaan	Sesuai
	Tata Kelola	Sesuai
	SDM	Sesuai
	Pengendalian	Sesuai
RSUD Singkawang	Kelembagaan	Sesuai
	Tata Kelola	Sesuai
	SDM	Sesuai
	Pengendalian	Sesuai
RSUD Sekadau	Kelembagaan	Sesuai
	Tata Kelola	Sesuai
	SDM	Sesuai
	Pengendalian	Sesuai

Satker BLUD	Aspek	Peraturan Bupati/Walikota
RSUD Dr. Soedarso Pontianak	Kelembagaan	Sesuai
	Tata Kelola	Sesuai
	SDM	Sesuai
	Pengendalian	Sesuai

Sumber: Keuda Kemendagridan Satker BLUD

F. PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH

1. Bentuk Investasi Daerah

Penyertaan modal pemerintah daerah ditujukan untuk menambah belanja modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pada tahun 2018 terjadi penurunan investasi pemda dibandingkan tahun sebelumnya, turun Rp 79,22 miliar. Pemda Prov. Kalbar mengalokasikan investasi dengan jumlah yang tertinggi yaitu sebesar Rp 90 miliar dan terdapat 2 (dua) Pemda yang tidak melakukan investasi yaitu Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sambas.

Tabel III.13
Penyertaan Modal BUMD (Investasi Pemerintah Kabupaten /Kota)
(Milyar rupiah)

Pemda	2015	2016	2017	2018
Prov Kalbar	75	10	90	165,87
Melawi	32,99	3,5	2,5	2,00
Kapuas Hulu	4,88	15,88	19,88	19,88
Singkawang	9,83	6	12	16,00
Sanggau	0	6,5	13,5	11,50
Sekadau	7,14	7,14	0	1,00
Landak	11	4,88	7,5	8,00
Bengkayang	32,88	0,88	10	7,50
Pontianak	5,88	8,63	19,1	19,00
Sintang	0	17,24	12,5	10,40
Kayong Utara	5	2	2	2,00
Kubu Raya	35,6	36,62	5,5	1,00
Ketapang	2,5	1	5	5,00
Sambas	3	2	0	2,50
Mempawah	2,88	0	2	15,00

Sumber: Pemerintah Kab/Kota Prov. Kalbar, diolah(data unaudited)*

Penyertaan modal pemerintah daerah sebagian besar ditanamkan pada PT. Bank Kalbar dan PDAM Kabupaten /Kota.

2. Profil dan jenis Badan Usaha Milik Daerah

Terdapat 19 BUMD di wilayah provinsi Kalbar dengan rincian bidang usaha adalah 14 BUMD bergerak disektor penyediaan air minum, 3 (dua) BUMD disektor perbankan dan jasa keuangan, 2 (dua) BUMD bergerak di sektor lainnya yang dengan total aset Rp18,44 triliun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.14
Data Aset BUMD pada Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

No	Pemda	BUMD	2018
1	Provinsi Kalimantan Barat	Aneka Usaha	37,056.13
2		BPD Kalbar	17,572,867.00
3		Jamkrida	0.19
4	Kota Pontianak	PDAM Tirta Khatulistiwa	380,976.31
5		PD BPR Bank Pasar	27.544.89 *
6	Kabupaten Sintang	PDAM Tirta Senentang	48.147.19*
7	Kabupaten Bengkayang	PT. Bengkayang Mandiri	84.51*
8		PDAM Bengkayang	17.636.26*
9	Kabupaten Kapuas Hulu	PDAM Putussibau	46.232.35*
10		PD Uncak Kapuas	10.251.59*
11	Kabupaten Kubu Raya	PDAM Tirta Raya	20.143.05*
12	Kabupaten Sambas	PDAM Tirta Muare Ulakan	18.483.83*
13	Kabupaten Sanggau	PDAM Tirta Pancur Aji	4.711.88*
14	Kabupaten Melawi	PDAM Tirta Melawi	63.233.67*
15	Kabupaten Landak	PDAM Landak	9.088.68*
16	Kabupaten Mempawah	PDAM Mempawah	10.078.24*
17	Kabupaten Ketapang	PDAM Ketapang	10.210.62*
18	Kabupaten Sekadau	PDAM Sirin Meragun	35.180.98*
19	Kota Singkawang	PDAM Gunung Poteng	30.642.07*

*Sumber: Pemerintah Kab/Kota Prov. Kalbar,(diolah/data unaudited) *data tahun 2017*

G. SILPA DAN PEMBIAYAAN

1. Perkembangan surplus/defisit APBD

Pada tahun 2018 berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja daerah mengalami surplus sebesar Rp 771 miliar, hal ini dikarenakan beberapa program yang telah dianggarkan dalam APBD belum seluruhnya dapat direalisasikan oleh Pemda se-Provinsi Kalimantan Barat.

Grafik III.4
Perkembangan Realisasi Surplus/Defisit APBD se-Prov Kalbar Tahun 2017-2018

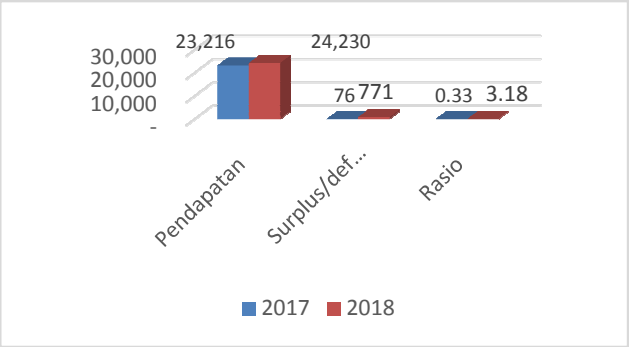

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa pada tahun 2018 terjadi surplus kenaikan surplus menjadi sebesar Rp 771 dari angka tahun sebelumnya yaitu 76 miliar.

Sumber: Pemerintah Kab/Kota Prov. Kalbar, diolah(data unaudited)*

2. Rasio Surplus terhadap realisasi dana transfer (Semester I)

Grafik III.5
Rasio Realisasi Surplus/Defisit Terhadap Realisasi Pendapatan Pemda Kalbar

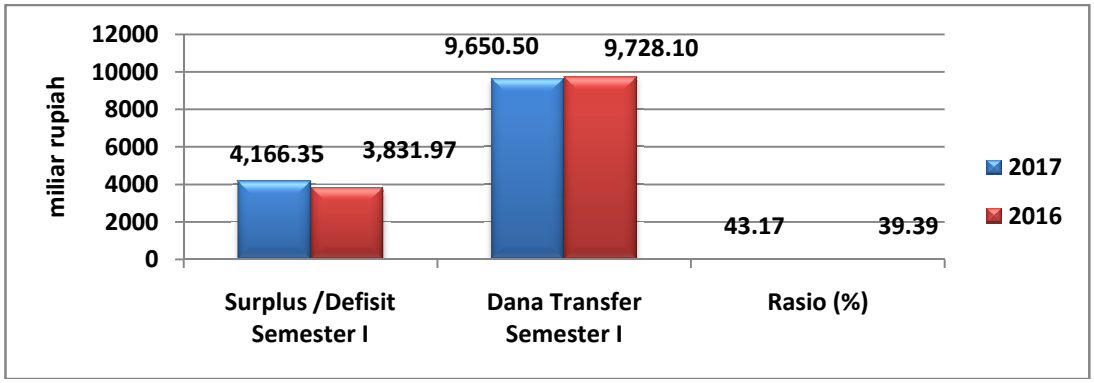

Sumber: Pemerintah Kab/Kota Prov. Kalbar, diolah(data unaudited)*

Rasio surplus/defisit terhadap pendapatan tahun 2017 menunjukkan kenaikan sebesar 3,78% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya jumlah dana APBD yang tersimpan di Kas Daerah (ekses likuiditas) hingga mencapai 43,17% dari total Dana Transfer, sementara itu perekonomian daerah sangat memerlukan stimulus guna menggerakan pertumbuhan ekonomi.

3. Rasio Surplus/Defisit terhadap PDRB

Merupakan indikator yang menggambarkan kesehatan ekonomi regional, dimana semakin kecil rasionya berarti daerah tersebut mampu memproduksi barang dan jasa yang cukup baik untuk membiayai hutang akibat defisit anggaran pemerintah daerah. Rasio Surplus/Defisit terhadap PDRB cenderung mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, sebagimana tabel berikut :

Grafik III.6
Rasio Realisasi Surplus/Defisit Terhadap PDRB Tahun 2016-2017

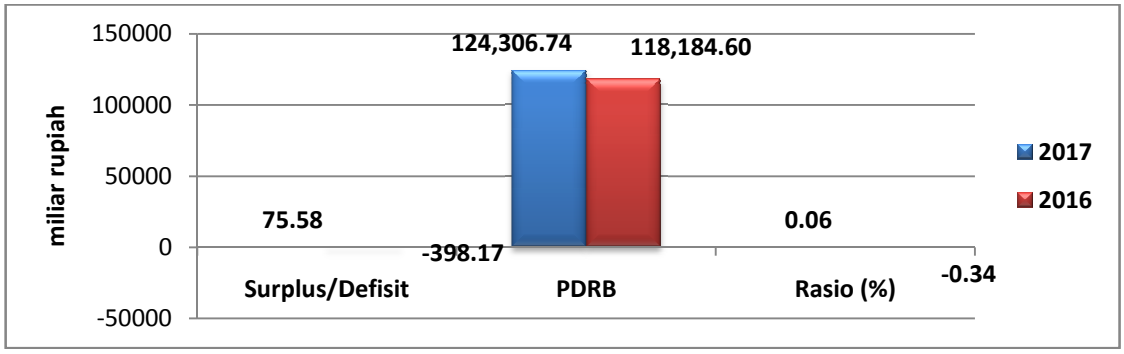

Sumber: Pemerintah Kab/Kota Prov. Kalbar, diolah(data unaudited)*

Pada tahun 2017 angka rasionya adalah 0,06 terjadi penurunan 0,28 dibandingkan tahun 2016, hal ini mengindikasikan bahwa kesehatan ekonomi di Kalimantan Barat menuju kearah perbaikan dengan semakin optimalnya penggunaan belanja daerah dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi regional yang ditandai dengan semakin meningkatnya produksi barang dan jasa.

4. Rasio SiLPA terhadap Alokasi Belanja

Merupakan rasio yang mencerminkan proporsi belanja atau kegiatan yang tidak digunakan dengan efektif oleh pemerintah daerah.Rasio selama dua tahun terakhir menunjukan kenaikan, sebagaimana grafik dibawah ini :

Grafik III.7
Rasio Realisasi SILPA Terhadap Alokasi Belanja Tahun 2016-2017

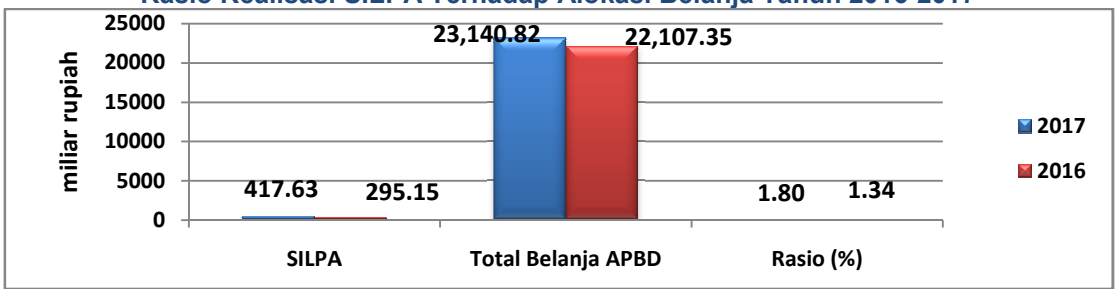

Sumber: Pemerintah Kab/Kota Prov. Kalbar, diolah(data unaudited)*

Pada tahun 2017 angka rasionya adalah 1,80 terjadi kenaikan 0,46 dibandingkan tahun 2016, hal ini mengindikasikan bahwa agregat belanja APBD tahun 2017 lebih tinggi daripada tahun 2016 sehingga lebih membawa kearah sebesar-besarnya tingkat kemakmuran masyarakat.

5. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik berupa penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam

penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkanuntuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan pemerintah daerah hamper diseluruh Indonesia pada umumnya sebagian besar berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Hanya sebagian kecil saja yang berasal dari pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, obligasi daerah, dan penerimaan kembali pemberianpinjaman

Terjadinya surplus pada tahun 2017 yang sebesar Rp342,05 miliar memerlukan adanya pembiayaan, sesuai dengan Agregat APBD tahun sebelumnya, Pemda se-Prov. Kalimantan Barat mengalokasikan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp719,52 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp377,47 miliar.

Grafik III.8
Perkembangan Pembiayaan APBD Pemda Prov.Kalbar Tahun 2016-2017

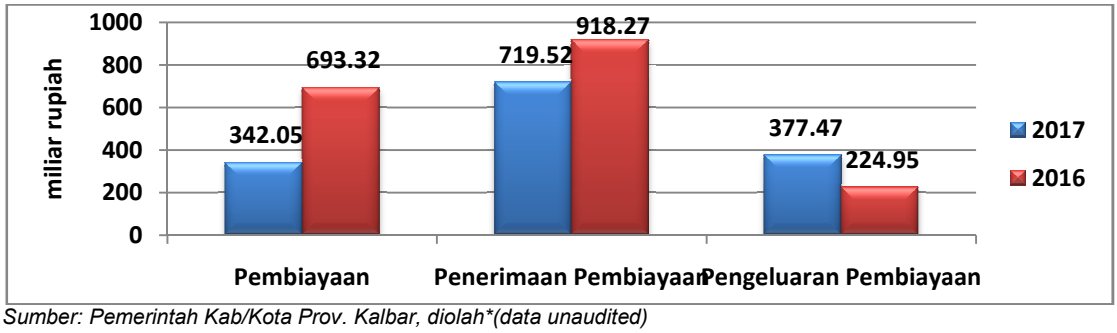

Sumber: Pemerintah Kab/Kota Prov. Kalbar, diolah(data unaudited)*

6. Rasio Pinjaman Daerah Atau Obligasi Daerah Terhadap Total Pembiayaan

Merupakan rasio untuk mengetahui proporsi pencairan pinjaman yang dilakukan daerah ataupun penerbitan obligasi daerah untuk membiayai defisit. Rasio pinjaman daerah pemda se-Provinsi Kalimantan Barat terjadi peningkatan yaitu sebesar 35,61 darat tahun 2016 sebesar 7,82 Kenaikan ini menambah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai defisit.

Grafik III.9
Perkembangan Rasio Pinjaman Daerah

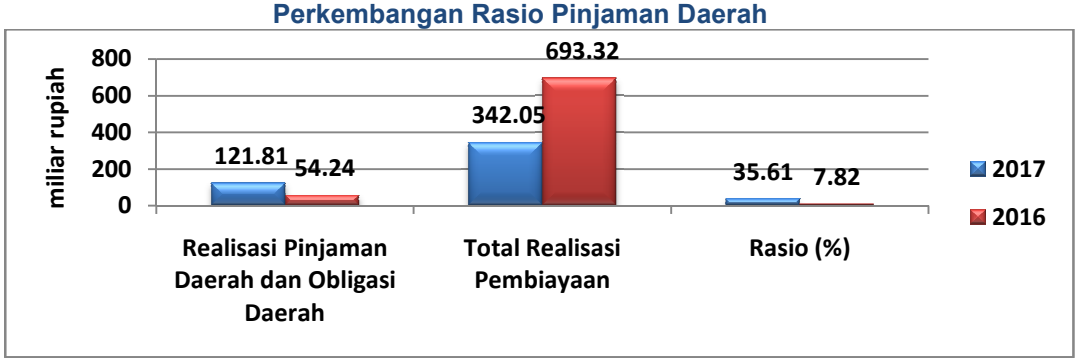

Sumber: Pemerintah Kab/Kota Prov. Kalbar, diolah(data unaudited)*

7. Keseimbangan Primer

Keseimbangan primer digunakan untuk mengetahui tingkat likuiditas keuangan Pemda, semakin besar keseimbangan primer maka semakin baik kemampuan daerah dalam membiayai deficit anggarannya.

Grafik III.10
Keseimbangan Umum Pemda Prov Kalbar Tahun 2016-2017

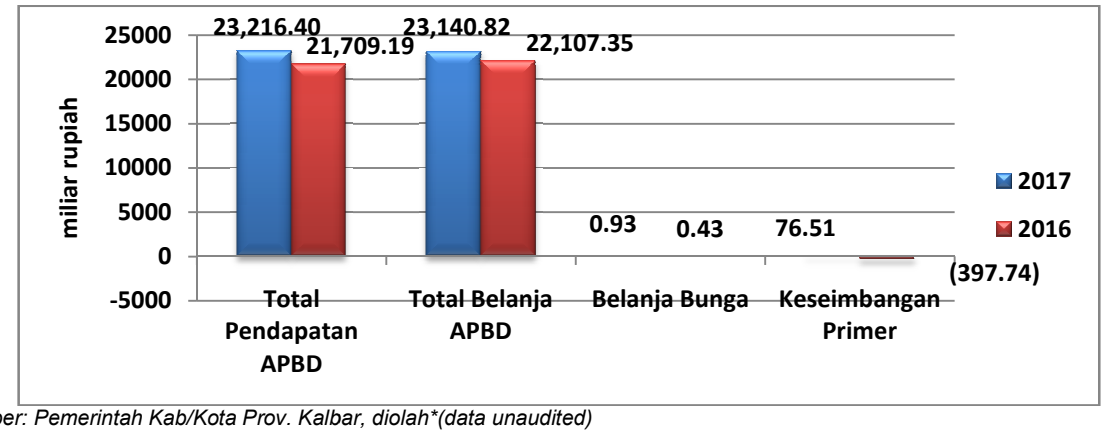

Sumber: Pemerintah Kab/Kota Prov. Kalbar, diolah(data unaudited)*

Keseimbangan primer pemda se-Provinsi Kalimantan Barat terjadi kenaikan dari tahun 2016 sebesar (-) Rp397,74 miliar menjadi Rp76,51 miliar. Kenaikan ini menunjukkan tingkat likuiditas semakin baik untuk membiayai defisit dalam artian Pemda tidak perlu menambah pinjaman atau obligasi yang baru untuk membayar cicilan bunga utang Daerah.

Grafik III.11
Keseimbangan Primer Pemda Prov Kalbar Tahun 2016-2017

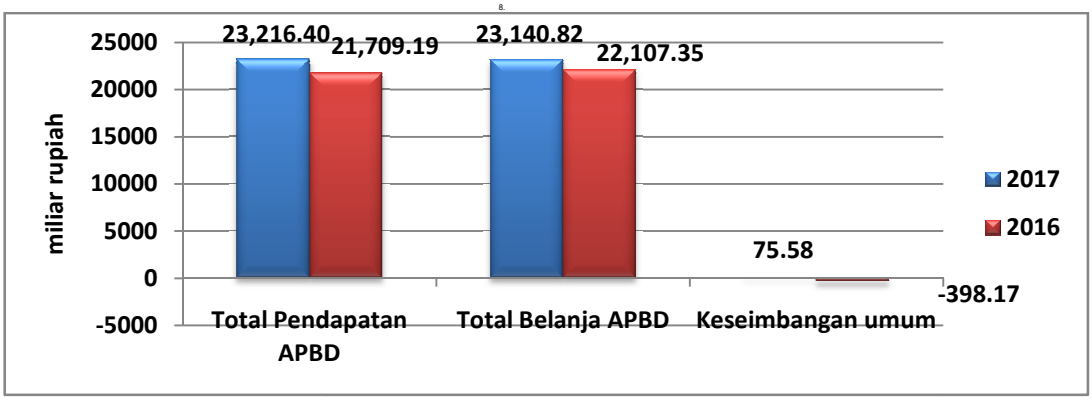

Sumber: Pemerintah Kab/Kota Prov. Kalbar, diolah(data unaudited)*

Keseimbangan Umum pemda se-Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 adalah Rp75,58 miliar terjadi kenaikan dari tahun 2016 yang sebesar (-) Rp398,17 miliar, atau terjadi surplus sehingga kebijakan anggaran APBD bersifat kontraktif dimana APBD memiliki kapasitas untuk menghambat laju inflasi hal ini selaras dengan penurunan tingkat inflasi 2017 sebesar 0,06% (yoy).

H. ANALISIS LAINNYA

1. Analisis Horizontal dan Vertikal

Analisis horizontal dan vertikal untuk menginformasikan dan menilai kinerja pelaksanaan APBD di Kalimantan Barat menggunakan *sample* 4 (empat) kabupaten yang dianggap merepresentasikan wilayah ini yaitu: 2 (dua) kabupaten induk yaitu Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sanggau, serta 2 (dua) kabupaten hasil pemekaran yaitu Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau. Data yang digunakan untuk perbandingan analisa horizontal adalah data realisasi PAD dan realisasi belanja modal, sedangkan analisa vertikal dilakukan dengan memperbandingkan PAD dengan pendapatan daerah dan belanja modal dengan total belanja.

a. Realisasi PAD dan Belanja Modal

Dari ke 4 (empat) sampel Kabupaten tersebut diatas , maka Kabupaten Melawi adalah yang terbesar pertumbuhan PADnya selama 2 (dua) tahun terakhir, yaitu sebesar Rp.12,31 Miliar (49%) selanjutnya yang terkecil pertumbuhannya adalah Kabupaten Sintang hanya sebesar Rp.4,90 Miliar (4,52%).

Realisasi Belanja Modal dari ke 4 (empat) sampel Kabupaten tersebut diatas , maka Kabupaten Melawi adalah yang terbesar pertumbuhan alokasi belanja modalnya selama 2 (dua) tahun terakhir, yaitu sebesar Rp.40,54 Miliar (12,20%) selanjutnya yang terkecil pertumbuhannya adalah Kabupaten Sekadau turun sebesar 30,79 Miliar (11,52%).

Grafik III.12
Realisasi PAD dan Belanja Modal Tahun 2016-2017

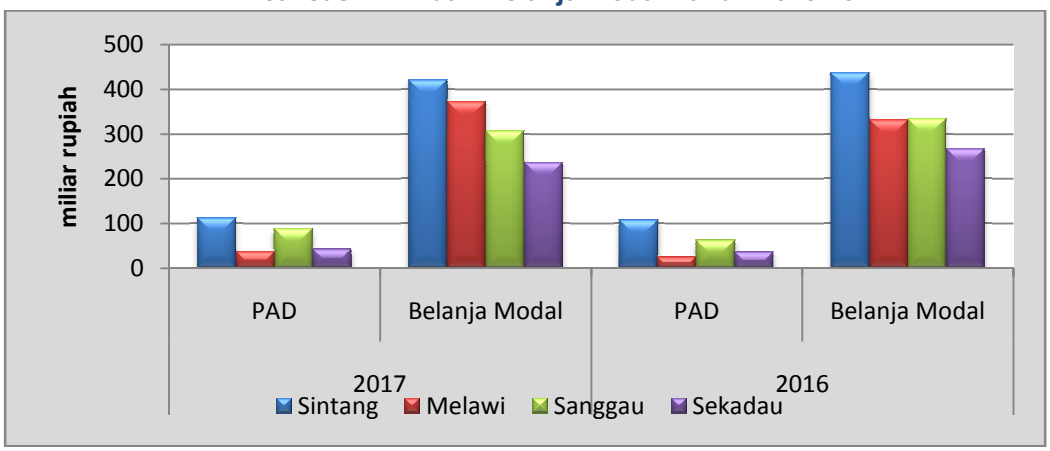

Sumber: Pemerintah Kab/Kota Prov. Kalbar, diolah(data unaudited)*

b. Rasio PAD dengan Pendapatan dan Belanja Modal dengan Total Belanja

Baik pada kabupaten induk maupun hasil pemekaran, pendapatan masih sangat tergantung pada dana perimbangan atau dana transfer. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kemandirian Pemerintah Daerah untuk membiayai dirinya sendiri.

Grafik III.13
Perbandingan PAD/Pendapatan dan Belanja Modal/Total Belanja Modal

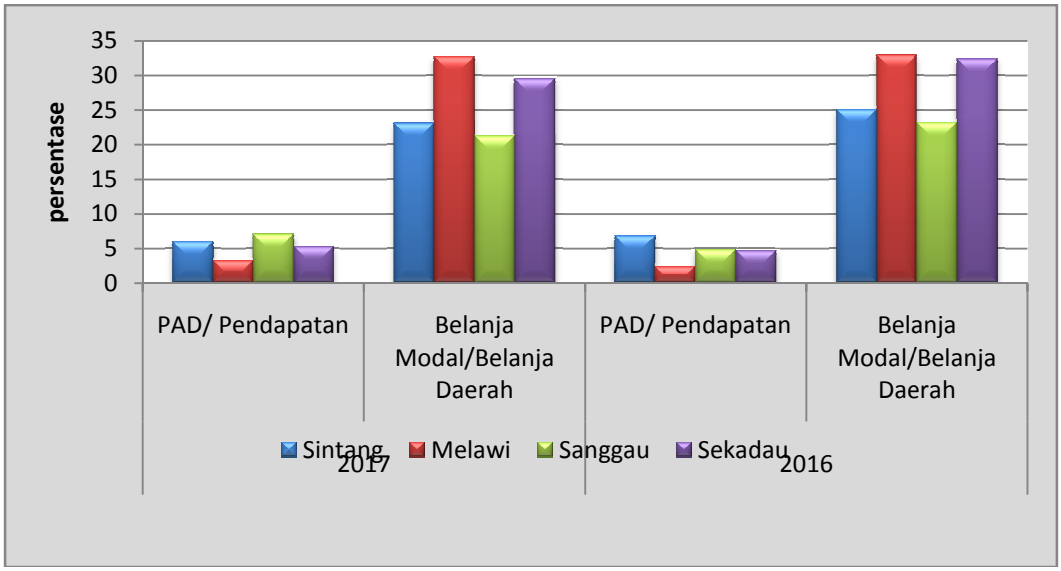

Sumber: Pemerintah Kab/Kota Prov. Kalbar, diolah(data unaudited)*

Secara rata-rata PAD Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat terjadi tren peningkatan. Dari ke 4 (empat) sampel Kabupaten tersebut diatas maka pada tahun 2017 Kabupaten Sanggau merupakan Pemda dengan prosentase PAD terhadap total Pendapatan yang terbesar yaitu sebesar 5,97% dan mempunyai peluang untuk dapat ditingkatkan terutama dari potensi bidang pertanian sebagai penghasil Padi dan Ubi Jalar dan Kacang Tanah di Kalbar. Sementara itu Kabupaten Melawi merupakan Pemda yang terkecil prosentase PAD terhadap total Pendapatan yaitu hanya sebesar 2,72%

Sementara itu untuk belanja modal prosentase alokasi terbesar dibandingkan total belanja adalah Kabupaten Melawi yaitu sebesar 33,62% dari sebesar Rp427,44 miliar dengan realisasi Rp372,88 miliar dimana alokasi terbesar adalah untuk bidang infastruktur jalan, irigasi dan jaringan yang akan memperlancar arus tranportasi sekaligus mempermudah pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan. Sementara itu Kabupaten Sanggau merupakan Pemda yang terkecil yaitu hanya sebesar 21,10%

2. Analisis Kapasitas Fiskal Daerah

Analisis kapasitas fiskal daerah adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman lama dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) yang digunakan untuk

membiayai tugas pemerintahan daerah setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Tabel IV.11
Kapasitas Fiskal Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 (Miliar rupiah)

Daerah	PAD	DBH	DAU	LLPD Yg Sah	Belanja Pegawai	Populasi Penduduk Miskin	Kapasitas Fiskal (Juta rupiah)	Indek Kapasitas Fiskal
1	2	3	4	5	6	7	8=((2+3+4+5)-6)/7	9
Prov. Kalbar	*1.964,62*	*166,15*	*1.720,70*	*71,55*	*1.240,10*	*44.880,00*	*59,78*	*2,52*
Melawi	37,44	16,51	604,54	2,56	356,62	10.890,00	27,96	1,18
Kapuas Hulu	*93,15*	*31,48*	*975,76*	*11,31*	*478,05*	*11.970,00*	*52,94*	*2,23*
Singkawang	132,12	15,42	492,49	4,31	368,58	38.135,00	7,23	0,30
Sanggau	88,81	37,64	824,22	5,77	511,65	53.070,00	8,38	0,35
Sekadau	43,03	20,75	503,19	7,66	229,89	25.050,00	13,76	0,58
Landak	132,45	31,08	669,29	3,73	444,42	14.610,00	26,84	1,13
Bengkayang	27,84	25,90	578,24	3,05	348,34	44.550,00	6,44	0,27
Pontianak	412,59	41,95	699,45	14,66	562,36	11.210,00	54,09	2,28
Sintang	113,17	42,91	909,41	11,21	574,45	24.490,00	20,51	0,86
Kayong Utara	12,73	17,28	464,06	2,12	177,15	27.830,00	11,46	0,48
Kubu Raya	134,70	20,14	779,06	3,34	508,81	34.130,00	12,55	0,53
Ketapang	118,64	118,74	1.122,27	5,39	718,36	40.360,00	16,02	0,67
Sambas	118,11	22,48	871,25	3,61	609,04	18.040,00	22,53	0,95
Mempawah	99,83	21,39	580,51	2,72	385,47	20.270,00	15,74	0,66

Sumber: Pemerintah Kab/Kota Prov. Kalbar, diolah(data unaudited*

Dalam wilayah regional Provinsi Kalimantan Barat dapat diketahui bahwa Indeks Kapasitas Fiskal yang tinggi adalah Pemda Provinsi Kalimantan Barat (2,52) disusul oleh Pemda Kabupaten Kapuas Hulu (2,23) dan Pemda Kota Pontianak (2,28), sementara itu Indeks Kapasitas Fiskal yang paling rendah adalah Kabupaten Bengkayang yaitu 0,27.

2. Analisis Kesehatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Analisis Kesehatan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan untuk menilai kesehatan fiskal setiap kabupaten/kota yang berada dalam Provinsi Kalimantan Barat.Penilaian dilakukan dengan menggunakan 9 (sembilan) indikator kesehatan pengelolaan keuangan daerah. Hasil penilaian kesehatan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota yang berada dalam Provinsi Kalimantan Barat adalah:

Tabel III.16
Indeks Kesehatan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Kalimantan Barat

No	Pemerintah Daerah	Indeks Kesehatan Keuangan Daerah	Keterangan
1	Melawi	63	Level III = Cukup
2	Kapuas Hulu	70	Level III = Cukup
3	Singkawang	58	Level II = Kurang
4	Sanggau	62	Level III = Cukup
5	Sekadau	56	Level II = Kurang
6	Landak	51	Level II = Kurang
7	Bengakayang	54	Level II = Kurang
8	Pontianak	65	Level III = Cukup
9	Sintang	52	Level II = Kurang
10	Kayong Utara	54	Level II = Kurang
11	Kubu Raya	60	Level II = Kurang
12	Ketapang	49	Level II = Kurang
13	Sambas	54	Level II = Kurang
14	Mempawah	64	Level III = Cukup

Sumber : LRA kabupaten/kota diolah

Berdasarkan indeks kesehatan keuangan daerah sesuai level, kabupaten/kota yang berada dalam Provinsi Kalimantan Barat dapat dibagi atas 2 (dua) cluster yaitu (1) daerah dengan indeks kesehatan keuangan cukup dan (2) daerah dengan indeks kesehatan keuangan kurang.Terdapat 5 kabupaten dengan indeks kesehatan keuangan daerah cukup dan 9 kabupaten/kota dengan indeks kesehatan keuangan daerah kurang.

Rasio kemandirian daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana di luar PAD (Suprapto, 2006:59). Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber pendapatan daerah selain PAD semakin rendah dan semakin tingginya tingkat pertisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan demikian pula sebaliknya.Tingginya tingkat pertisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Tabel III.17 Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian	Tingkat Kemandirian
0% - 25%	Sangat Rendah
25% - 50%	Rendah
50% - 75%	Sedang
75% - 100%	Tinggi

Sumber Suprapto, 2006:59

Tabel III.18
Rasio Pendapatan Asli Daerah

No	Pemerintah Daerah	Rasio PAD
1	Melawi	3.26%
2	Kapuas Hulu	5.66%
3	Singkawang	15.64%
4	Sanggau	7.04%
5	Sekadau	5.28%
6	Landak	5.50%
7	Bengakayang	2.62%
8	Pontianak	27.84%
9	Sintang	6.01%
10	Kayong Utara	1.67%
11	Kubu Raya	10.15%
12	Ketapang	6.11%
13	Sambas	7.61%
14	Mempawah	10.06%

Sumber : LRA kabupaten/kota diolah

Dari 14 kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Kalimantan Barat, hanya Kota Pontianak yang memiliki rasio kemandirian daerah dengan kategori kurang dengan rasio 27,84%, selebihnya memiliki rasio kemandirian daerah sangat kurang atau di bawah 25%. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang ada di dalam Provinsi Kalimantan Barat masih sangat tergantung dari sumber pendapatan di luar PAD. Sumber-sumber pendapatan ini mayoritas berasal dari transfer pemerintah pusat baik DAU, DAK, DBH, dan DBHP. Sebagai contoh Kabupaten Kayong Utara, dengan realisasi PAD sebesar Rp12,73 Milyar memiliki realisasi pendapatan sebesar Rp762,18 Milyar. Realisasi PAD hanya 1,67% dari total pendapatan. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena memiliki pola hubungan instruktif, yaitu pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

Pemerintah kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Barat harus berusaha meningkatkan kinerjanya guna meningkatkan perolehan PAD kabupaten/kota sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dalam kaitan dengan usaha peningkatan PAD, maka kebijakan yang dapat ditempuh ialah intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PAD, sehingga diharapkan PAD dapat lebih berperan, dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Kebijakan dan usaha intensifikasi PAD ialah usaha berupa peningkatan PAD dari sumber-sumber PAD yang telah ada atau telah berjalan selama ini.Sedangkan usaha ekstensifikasi PAD ialah berupa mencari dan menggali sumber-sumber PAD baru dalam batas peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KOSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

Tari Jepin

BAB IV
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KOSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Kalbar adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1
Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Lingkup Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 dan Tahun 2018

(Miliar rupiah)

Uraian	2018			2017	
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasi
Pendapatan Negara	**7,685.24**	**3,507.00**	**10,861.57**	**9.25%**	**9,942.14**
Pendapatan Perpajakan	6,823.67	2,866.88	9,690.55	**14.79%**	8,442.09
Pendapatan Bukan Pajak	861.57	637.08	1,167.98	**-1.60%**	1,186.94
Hibah	0.00	3.04	3.04	**-99.03%**	313.11
Transfer	0.00	18.958,12*	0	**0.00%**	0.00
Belanja Negara	**10,399.47**	**21,693.76**	**32,093.24**	**-1.11%**	**32,454.63**
Belanja Pemerintah	10,399.47	18,999.86	29,399.33	**-1.86%**	29,956.61
Transfer	19.288,79*	2,693.91	2,693.91	**7.84%**	2,498.03
Surplus/(Defisit)	**-2,714.23**	**-18,186.77**	**-21,231.67**	**-5.69%**	**-22,512.49**
Pembiayaan	**0.00**	**445.75**	**445.75**	**-21.21%**	**565.77**
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	856.28	856.28	**-6.15%**	912.40
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	410.54	410.54	**18.44%**	346.63
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	**-2,714.23**	**-17,741.02**	**-20,785.92**	**-5.29%**	**-21,946.72**

Catatan: Seluruh Pengeluaran Transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan Penerimaan Tranfer Pemerintah Daerah.
Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Pada tahun 2018 pendapatan konsolidasian pemerintah daerah provinsi Kalimantan barat mencapai 9.942,14 miliar. Angka ini naik 9,25 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Belanja Daerah sebesar 32.093,24 miliar. Angka ini turun 1.11 persen dari tahun 2017. Terjadi defisit pada LKPK tahun 2018 sebesar Rp 21.953,90 miliar.

B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

1. Analisa Proporsi dan Perbandingan

Grafik IV.1
Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 dan Tahun 2018

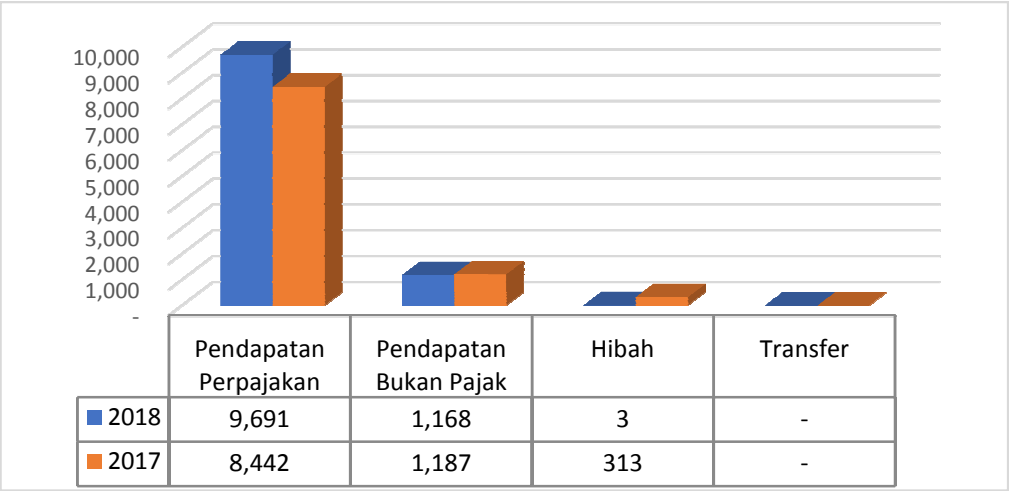

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Komposisi Pendapatan Konsolidasian terdiri atas Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Bukan Pajak, Hibah dan Transfer. Pendapatan Perpajakan Konsolidasian di Provinsi Kalimantan mengalami peningkatan sebesar 15 persen, PNBP mengalami penurunan sebesar 1,6 persen dan hibah turun sebesar 1 persen.

Grafik IV.2
Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap penerimaan Konsolidasian Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

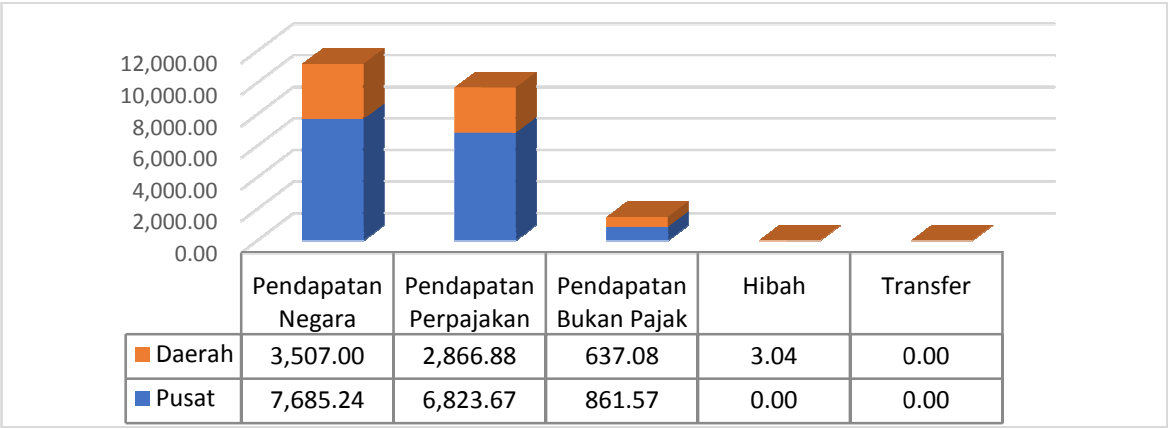

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Realisasi pendapatan konsolidasian pemerintah pusat lebih tinggi sebesar yaitu sebesar 7.685,24, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi

pendapatan konsolidasian pemerintah daerah yang mencapai 3.507 miliar. Pendapatan perpajakan pemerintah pusat sebesar 6.823,67 miliar, lebih besar daripada pendapatan perpajakan pemerintah daerah yang mencapai 2.866,88 miliar.

Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian penerimaan dari pemerintah pusat sebesar 861,57 miliar. Angka ini lebih besar dari penerimaan pemerintah daerah yang sebesar 637,08 miliar.

2. Analisa Perubahan

Realisasi pendapatan konsolidasian tahun 2018 mencapai Rp 10.861,57 miliar atau naik sebesar naik sebesar 9.25 persen dari periode yang sama tahun 2017, kenaikan itu ditunjang oleh kenaikan pendapatan perpajakan. Kondisi ini mengindikasikan tingginya tingkat pertumbuhan kegiatan perekonomian di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang dicerminkan oleh peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17%.

Grafik IV.3
Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Konsolidasian Provinsi Kalimantan Tahun 2018

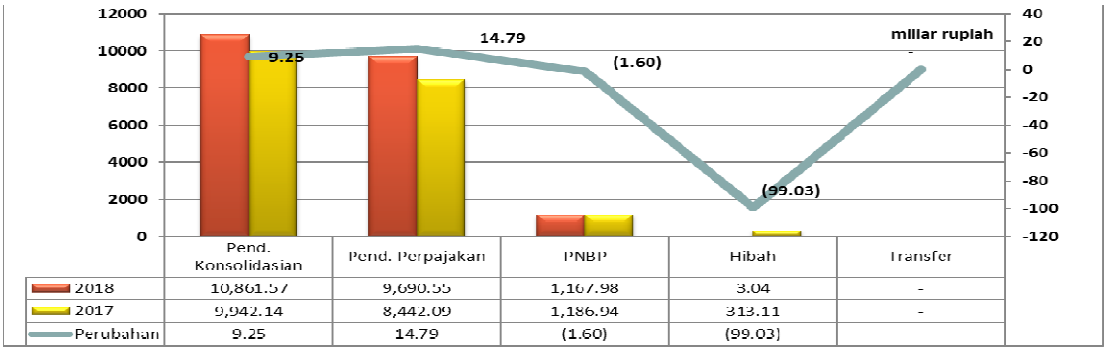

	Pend. Konsolidasian	Pend. Perpajakan	PNBP	Hibah	Transfer
2018	10,861.57	9,690.55	1,167.98	3.04	-
2017	9,942.14	8,442.09	1,186.94	313.11	-
Perubahan	9.25	14.79	(1.60)	(99.03)	

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Pada tahun 2018 Kenaikan pendapatan perpajakan mencapai 1,248,45 miliar atau 14.79 persen. Pendapatan Negara Bukan Pajak turun 55 miliar, sedangkan untuk pendapatan hibah turun 310.07 miliar. Penerimaan pajak dari daerah pada tahun ini sebesar Rp 2.866.88 atau sebesar 28,85 persen dari total pendapatan. Dengan komposisi tersebut maka Pemda diharapkan untuk dapat mengoptimalkan serta mencari alternatif sumber pendapatan pajak daerah yang baru.

C. BELANJA KONSOLIDASIAN

Belanja Pemerintahan Umum *(General Government Spending)* atau Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja

Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi).

1. **Analisis Proporsi dan Perbandingan**

Grafik IV.4
Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

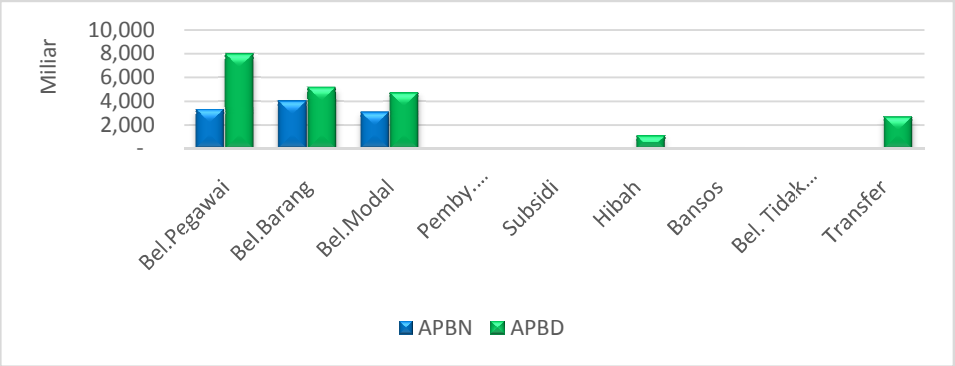

Sumber : Monev PA dan Pemda

Pada tahun 2018 secara keseluruhan, di Provinsi Kalimantan Barat total belanja pemerintah pusat lebih besar dari total belanja pemerintah daerah. Realisasi belanja dan transfer konsolidasian mencapai Rp 32.093,23 miliar, 32,40 persen bersumber dari anggaran pemerintah pusat dan sisanya sebesar 67,60 persen dari anggaran pemerintah daerah. Realisasi Belanja Pegawai konsolidasian mencapai Rp11.285,87 miliar yang bersumber dari APBD sebesar Rp3.310,68 miliar (29 persen) dan dari APBN sebesar Rp7.975,12 miliar (71 persen). Belanja barang konsolidasian mencapai Rp9.182,81 miliar dengan komposisi 56,29 persen dari pemerintah daerah dan 43,71 persen dari pemerintah pusat. Belanja Modal konsolidasian mencapai Rp7.762,94 miliar dengan komposisi 60,55 persen berasal dari APBD dan 39,45 persen dari APBN.

Proporsi belanja APBN dan belanja APBD terhadap belanja konsolidasian tersebut, apabila dikaitkan dengan kontribusi pemerintah pada pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat khususnya dari sisi pengeluaran pemerintah, menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kontribusi lebih untuk membiayai belanjanya dibanding pemerintah daerah.

2. Analisis Perubahan

Grafik IV.5
Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

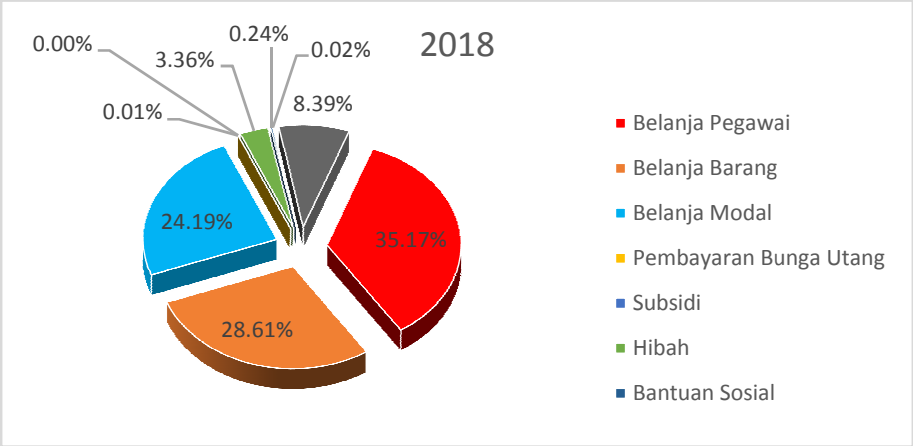

Sumber : Monev PA dan Pemda

Grafik IV.6
Komposisi Belanja Kons olidasian Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

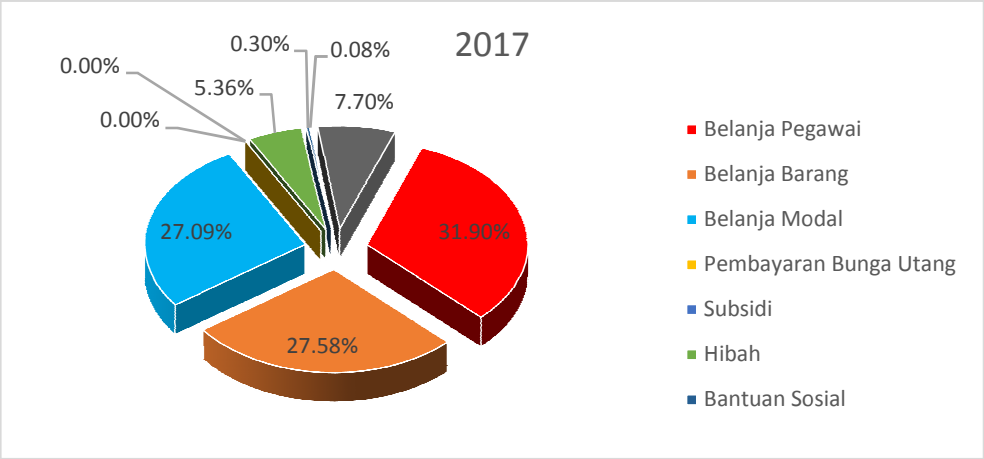

Sumber:monev PA dan Pemda

Realisasi belanja konsolidasian tahun 2018 dilihat dari nilainya apabila dibanding tahun 2017 secara keseluruhan mengalami penurunan kecuali belanja pegawai, belanja barang.

Sedangkan dari komposisinya, porsi belanja pegawai konsolidasian terhadap total belanja konsolidasian, mengalami kenaikan dari 31,90 persen di tahun 2017 menjadi 35,17 persen di tahun 2018, porsi belanja barang konsolidasian terhadap total belanja konsolidasian, mengalami kenaikan dari sebesar 27,58 persen di tahun 2017 menjadi sebesar 28,61 persen pada tahun 2018, porsi

belanja modal konsolidasian terhadap total belanja konsolidasian, mengalami penurunan dari sebesar 27,09 persen di tahun 2017 menjadi hanya 24,19 persen pada tahun 2018. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam hal peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran yang antara lain dengan meningkatkan porsi anggaran belanja modal terhadap total belanja pemerintah.

3. **Analisis Rasio Belanja Operasi Konsolidasian Terhadap Total belanja Konsolidasian**.

Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai konsolidasian dengan belanja barang konsolidasian. Rasio belanja operasi terhadap total belanja konsolidasian mengindikasikan porsi belanja pemerintah untuk mendukung operasional pemerintahan. Pada tahun 2018 rasio belanja operasi terhadap total belanja konsolidasian di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 63,78 persen. Sedangkan tahun 2017 sebesar 59,48 persen. Hal ini menunjukan bahwa semakin tingginya beban operasional pemerintahan yang ditunjukan oleh naiknya alokasi anggaran pemerintah untuk belanja operasi.

Tabel IV.2
Rasio Belanja Operasi Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2017 dan 2018

Uraian	2017		2018	
	Konsolidasian	Rasio	Konsolidasian	Rasio
Belanja Operasi	19.304.379.245.848	59,48%	20.468.617.292.167	63,78%
Total Belanja dan Transfer	32.454.631.868.211		32.093.238.657.357	

sumber : Monev PA dan Pemda

4. **Rasio Belanja Konsolidasian Terhadap Jumlah Penduduk**

Rasio belanja konsolidasian terhadap jumlah penduduk (belanja konsolidasian perkapita) menunjukkan seberapa besar belanja pemerintah pusat dan Pemerintah daerah yang digunakan untuk menyejahterakan per penduduk di suatu daerah. Semakin besar nilainya, semakin besar besar belanja yang dikeluarkan untuk menyejahterakan satu orang penduduk wilayah tersebut sehingga semakin besar kemungkinan tercapainya. Sebaliknya, semakin kecil angka rasionya, semakin kecil dana yang disediakan pemda untuk menyejahterakan penduduknya.

Grafik IV.7
Belanja Pemerintah Konsolidasian Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 dan 2018
(Juta Rupiah/Kapita)

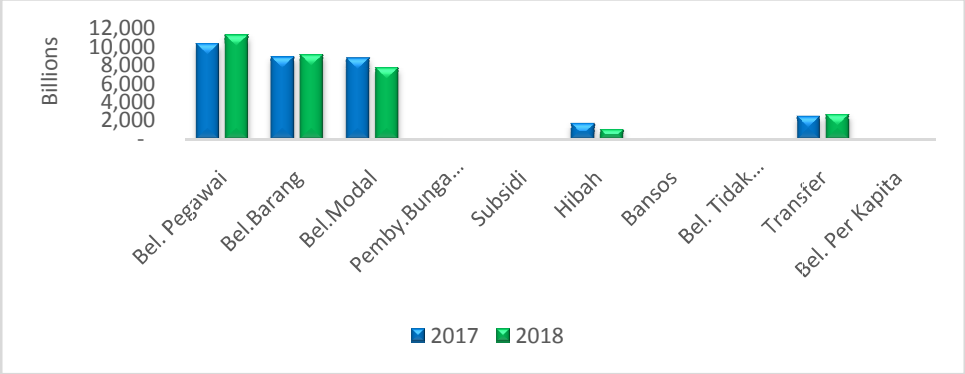

Sumber : Monev PA dan Pemda

Rasio total belanja konsolidasian terhadap jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 adalah Rp10,56 Juta per kapita. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya, selama tahun 2018 pemerintah telah membelanjakan sebesar Rp10,56 Juta untuk setiap jiwa penduduknya, kondisi ini menunjukan penurunan dibanding dengan tahun 2017 dimana pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp10,68 Juta per jiwa penduduknya.

D. SURPLUS/DEFISIT

Surplus/Defisit Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 mencapai minus Rp20,78 triliun. Defisit tersebut berasal dari Pemerintah Pusat sedangkan anggaran Pemerintah Daerah justru mengalami surplus sebesar Rp1,21 triliun.

Defisit yang disumbangkan Pemerintah pusat sebesar Rp22,03 triliun karena adanya Belanja Transfer yang merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk disalurkan ke daerah. Belanja transfer ini adalah bagian dari upaya pemerataan pembangunan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah.

Tabel IV.3
Rasio Surplus/Defisit Konsolidasian terhadap PDRB
pada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

Uraian	Surplus/Defisit		Rasio Terhadap PDRB
	Realisasi (Rp milyar)	Komposisi	
Gabungan Pemda Kalimantan Barat	1.217,10	-5,86%	0,93%
Pemerintah Pusat di Wilayah Kalimantan Barat	(22.003,02)	105,86%	-16,85%
Konsolidasian	(20.785,92)	100,00%	-15,92%

Sumber: SIKD, Monev PA 2018 diolah

E. ANALISA KONTRIBUSI KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Nilai PDRB suatu daerah dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu: Y = C + I + G + X-M). Berikut adalah ringkasan Laporan Operasional sebagai salah satu komponen Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Pelaporan 2018:

Tabel IV.4
Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Pelaporan 2018 (miliar Rp)

Pendapatan:	10.861,57
a. Pajak	9.690,55
b. Kontribusi sosial	1.167,98
c. Hibah	3,04
d. Pendapatan lain	-
Beban:	27.393,08
a. Kompensasi pegawai	11.285,81
b. Penggunaan barang dan jasa	9.182,81
c. Konsumsi aset tetap	3.062,79
d. Bunga	3,23
e. Subsidi	-
f. Hibah	1.078,96
g. Manfaat sosial	78,41
h. Beban Lainnya	2.701,07
Keseimbangan operasi bruto/neto	**(16.531,51)**
Transaksi Aset Non Keuangan Neto	4.700,16
a. Aset tetap	4.700,16
b. Persediaan	-
c. Barang berharga	-
d. Aset nonproduksi	-
Net Lending/Borrowing	**(21.231,67)**
Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban	445,75
a. Akuisisi Neto Aset Keuangan	-
- Domestik	856,28
- Luar Negeri	-
b. Keterjadian Kewajiban	-
- Domestik	410,54
- Luar Negeri	-

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Belanja Pemerintah (G) dikurangi bunga dalah Rp27,39 triliun dan Investasi (I) yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2018 sebesar Rp4,70 triliun. Dengan demikian dapat dihitung kontribusi belanja Pemerintah dan investasi Pemerintah terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Barat dengan PDRB sebesar Rp130,58 triliun adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi belanja Pemerintah terhadap PDRB adalah 20,97 persen;
2. Kontribusi investasi Pemerintah terhadap PDRB adalah 3,60 persen.

Belanja Pemerintah masih memiliki porsi yang cukup besar terhadap yaitu sebesar 20,97 persen atau lebih dari 1/5 bagian PDRB. Hal ini menunjukkan belanja Pemerintah adalah salah satu motor penggerak perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat dengan harapan belanja ini mampu memberikan efek dalam jangka waktu yang cepat terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah diharapkan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan belanja sebesar ini.

Pertumbuhan ekonomi atau peningkatan *output* perekenomian dipengaruhi oleh tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Tabungan merupakan instrumen yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal (penerimaan pajak dan belanja negara mempengaruhi tabungan nasional). Secara tidak langsung kebijakan fiskal ikut mengambil peran dalam pertumbuhan ekonomi. Keputusan-keputusan pemerintah mengenai kebijakan fiskal yang ditempuh suatu negara dapat mengubah *ouput* dalam perekonomian, baik bertambah maupun berkurang.

Peningkatan belanja Pemerintah memiliki *multiplier effect* (efek penggandaan) terhadap pendapatan (ouput perekonomian) suatu negara/daerah. Alasannya ialah pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi. Kenaikan belanja pemerintah menyebabkan meningkatnya pendapatan, kemudian meningkatkan konsumsi, yang selanjutnya meningkatkan pendapatan, kemudian meningkatkan konsumsi dan seterusnya.

Belanja Pemerintah yang meningkat dari tahun ke tahun memberikan efek yang baik untuk perekonomian Kalimantan Barat karena memegang porsi yang cukup besar terhadap PDRB. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan untuk memperbesar alokasi Investasi juga.

BAB V
KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SERTA TANTANGAN FISKAL REGIONAL

Pengantin Wanita Melayu

BAB V

KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI REGIONAL SERTA TANTANGAN FISKAL

A. Keunggulan Dan Potensi Ekonomi Regional

1. Analisis Sektor Unggulan dengan Metode *Location Quotient (LQ) Time Series*

Kalimantan Barat merupakan Provinsi yang memiliki luas wilayah terbesar ke empat di Indonesia yaitu seluas 146.807 km^2 dimana sebagian besar kondisi tanah sangat cocok untuk perkebunan sehingga mendukung dibangunnya perkebunan dengan skala besar beserta industri pengolahannya baik perkebunan kelapa sawit maupun perkebunan karet serta pemanfaatan untuk areal persawahan.

Untuk menjadi kawasan yang maju dan unggul maka pemerintah harus mendukung melalui pembangunan daerah dengan penentuan prioritas kebijakan yang lebih terarah serta berjalan efektif dan efisien mengingat keterbatasan sumber pendanaan serta tetap memperhatikan keunggulan dan potensi ekonomi daerah**.** Penentuan sektor unggulan daerah merupakan langkah awal menuju pembangunan yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghadapi persaingan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menginisiasi komoditas unggulan adalah metode *Location Quotient* (LQ). Dasar penentuan sektor unggulan Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan menggunakan *LQ time series* dimana data yang digunakan adalah PDRB dan PDB 4 (empat) tahun terakhir yaitu tahun 2015 sampai dengan 2018.

Tabel V.1
LQ Time Series Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015- 2018

No	Bidang/Tahun	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,69	1,69	1,73	1,77
2	Pertambangan dan Penggalian	0,47	0,56	0,56	0,59
3	Industri Pengolahan	0,75	0,74	0,73	0,72
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,08	0,09	0,10	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,68	1,69	1,68	1,67
6	Konstruksi	1,13	1,09	1,09	1,05
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,10	1,09	1,08	1,08
8	Transportasi dan Pergudangan	1,05	1,03	0,99	0,99
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,75	0,74	0,72	0,73
10	Informasi dan Komunikasi	0,90	0,91	0,96	0,95
11	Jasa Keuangan	0,91	0,90	0,92	0,95
12	Real Estate	0,97	0,94	0,93	0,94

No	Bidang/Tahun	2015	2016	2017	2018
13	Jasa Perusahaan	0,29	0,28	0,26	0,25
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,35	1,40	1,43	1,41
15	Jasa Pendidikan	1,32	1,28	1,25	1,22
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,29	1,26	1,22	1,21
17	Jasa Lainnya	0,64	0,61	0,60	0,58

Sumber: BPS diolah

Perhitungan LQ time series dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan terdapat delapan bidang yang potensial karena memiliki LQ lebih besar dari satu dan sembilan bidang tidak potensial dengan LQ kurang dari satu. Untuk memilih bidang apa yang akan paling potensial maka akan dihubungkan dengan sumbangsih PDRB bidang terhadap PDRB total. Persentase PDRB bidang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel V.2
Kontribusi PDRB Per Bidang Terhadap PDRB Total
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015- 2018 (%)

No	Bidang/Tahun	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,76	22,52	22,81	23,17
2	Pertambangan dan Penggalian	4,11	4,75	4,57	4,68
3	Industri Pengolahan	16,62	16,50	16,16	15,79
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,09	0,10	0,10	0,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,14	0,14	0,14
6	Konstruksi	11,41	11,13	11,29	10,95
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,28	15,08	14,90	14,83
8	Transportasi dan Pergudangan	4,20	4,23	4,21	4,32
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,31	2,29	2,26	2,30
10	Informasi dan Komunikasi	4,36	4,58	5,07	5,14
11	Jasa Keuangan	3,61	3,76	3,84	3,95
12	Real Estate	2,98	2,90	2,83	2,81
13	Jasa Perusahaan	0,49	0,48	0,46	0,46
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan				

No	Bidang/Tahun	2015	2016	2017	2018
	Jaminan Sosial Wajib	4,83	4,93	4,91	4,94
15	Jasa Pendidikan	4,28	4,14	3,99	3,93
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,45	1,41	1,40	1,42
17	Jasa Lainnya	1,07	1,06	1,07	1,07

Sumber: BPS diolah

Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan sumbangsih PDRB rata-rata 22,81 persen dan LQ rata-rata 1,72 selama masa pengamatan memiliki LQ tertinggi dan persentase PDRB tertinggi terhadap PDRB total.

Tabel V.2
Rata-Rata LQ dan Rata-Rata Kontribusi PDRB Per Bidang Terhadap PDRB Total Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015- 2018

No	Bidang	LQ Rata-Rata	% PDRB Rata-Rata
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,72	22,81
2	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,68	0,14
3	Konstruksi	1,09	11,20
4	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,09	15,02
5	Transportasi dan Pergudangan	1,01	4,24
6	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,40	4,90
7	Jasa Pendidikan	1,27	4,08
8	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,24	1,42

Sumber: BPS diolah

Dengan nilai LQ selama empat tahun paling tinggi dan kontribusi PDRB bidang terhadap PDRB rata-rata paling tinggi maka fokus pengembangan dilakukan pada bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

a) Analisis Nilai Tukar Petani (NTP) dengan Harga Komoditas Unggulan

NTP adalah merupakan salah satu indikator kesejahteraan petani, selama ini NTP Kalbar cenderung dibawah NTP Nasional dimana kondisi terakhir pada Bulan Desember 2018 NTP Kalbar adalah 94,66 jauh dibawah NTP Nasional yang mencapai 103,16. Banyak faktor yang mempengaruhi pergerakan NTP, selanjutnya akan dilihat hubungan antara harga komoditas utama tradisional Kalbar dengan NTP. Bisa dikatakan harga ke dua komoditas tersebut cenderung turun dimana harga karet/getah saat ini berkisar Rp6.000 – Rp7.000 perKg di tingkat petani dan kelapa sawit (Tandan

Buah Segar/TBS) dengan rata-rata harga per Kg berkisar Rp1.000 – 1.200. Analisis regresi linier berganda menghasilkan data perhitungan sebagai berikut:

Tabel
Statistik Regresi Harga Karet dan Kelapa Sawit dengan NTP

Indikator	Harga Karet	Harga Sawit
Adjusted R Square	0,473734292	
Koefisien	0,00009	0,00466
P-Value	0,61541	0,00335

Sumber: Hasil diolah 2019

Dari hasil analisis diatas diperoleh data sebagai berikut :

1. Dari *Adjusted R Square* diketahui bahwa harga karet dan harga sawit secara bersama-sama dapat menerangkan NTP sebesar 47,37 % sedangkan 52,62% lagi oleh faktor lain;
2. Dengan koefisien 0,00009 dan *P-value* 0,61541 menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga karet sebesar Rp1000/kg akan menaikkan NTP sebesar 0,09 dan harga karet tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap NTP;
3. Dengan koefisien 0,00466 dan *P-value* 0,00335 menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga sawit sebesar Rp1000/kg akan menaikkan NTP sebesar 4,66 dan harga sawit memberikan dampak yang signifikan terhadap NTP karena *P-value* dibawah 0,05

Dengan demikian sangat diperlukan usaha pemerintah untuk ikut menjaga stabilitas harga khususnya di tingkat petani. Pemerintah Provinsi Kalbar menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan indeks dan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun Kalbar. Para pekebun kelapa sawit di seluruh Kalbar harus bermitra, dengan perusahan kelapa sawit para mitra tersebut harus membeli sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Pabrik kelapa Sawit tidak boleh membeli tandan kelapa sawit dengan para pekebun yang bukan mitra.

Keberadaan BUMDes diharapkan dapat menampung hasil getah karet petani dan sekaligus memfasilitasi penjualan karet langsung ke pabrik karet sehingga jalur perdagangan terpangkas karena tidak melalui pengepul,apabila dilaksanakan secara serempak maka dampaknya diharapkan dapat meningkatkan stabilitas harga getah karet. Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan BUMDes harus didorong serta kemudahan permodalan melalui KUR.

2. Potensi Ekonomi Regional

a. Energi Listrik Terbarukan

Salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi dan mempunyai daya saing global adalah tersedianya pasokan energi yang murah, dimana laju pertumbuhan kebutuhan listrik berkisar 3-20% pertahun, hal ini disadari oleh pemerintah Indonesia dimana pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tahun 2018 - 2027 menyatakan komposisi target bauran energi pembangkit listrik akhir tahun 2025 adalah batubara 54,4%, Energi Baru dan Terbarukan (EBT) 23,0%, gas 22,2%, BBM 0,4%.

Kebutuhan Listrik Kalbar pada saat ini (Agustus 2018) mencapai 411 MW dengan daya mampu (kapasitas produksi) 543 MW. Potensi sumberdaya alam Kalbar sangat potensial sekali untuk dikembangkan menjadi salah satu daerah utama sebagai penghasil energi baru dan terbarukan, diantaranya adalah :

I. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm)

Propinsi Kalbar merupakan daerah penghasil kelapa sawit dengan total luasan areal tanaman kelapa sawit yang terdata seluas 1.478.133 hektare dengan produksi CPO 1.835.920 ton dan oil kernel 270.949 ton atau menyumbang 11% produksi CPO Nasional. Selama proses produksi pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dan oil kernel menyisakan limbah berupa cangkang. Semakin meningkatnya produksi CPO Kalbar juga diringi dengan jumlah ketersediaan limbah cangkang sawit. Pembangunan Pembangkit listrik berbahan baku cangkang kelapa sawit oleh swasta merupakan pembangkit biomassa pertama yang dibangun di Kalbar. Memproduksi sekitar 10 MV atau 74 juta *kilowatt hour* (*kWh*) dalam setahun dengan menggunakan 98.400 ton limbah cangkang sawit sebagai bahan bakar.

Pemprov diharapkan mendorong pengembangan PLTBm melalui regulasi penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan besar kelapa sawit dengan pengelolaan melibatkan BUMDes.

II. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Keunggulan Kalbar lainnya adalah kondisi geografis Kalbar yang ditunjang dengan sungai-sungai besar serta jeram atau air terjun yang bisa dimanfaatkan sebagai PLTA. Kondisi alam yang sangat menunjang prasyarat pembangunan kompleks PLTA dimana parameternya adalah adalah sumber air yang selalu mengalir sepanjang tahun (debit) dan adanya tinggi jatuhan air (*head*). Menurut

data Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalbar 2010 jumlah potensi Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) / Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di wilayah Kalbar adalah 66,89 MW.

Hingga saat ini di wilayah Kalbar belum dibangun satupun PLTA hanya PLTMH yang terbangun dengan skala kecil. Upaya pengembangan PLTMH bisa dibangun dengan memanfaatkan Dana Desa serta menambah usulan alokasi DAK Fisik khususnya untuk alokasi Bidang Energi Skala Kecil.

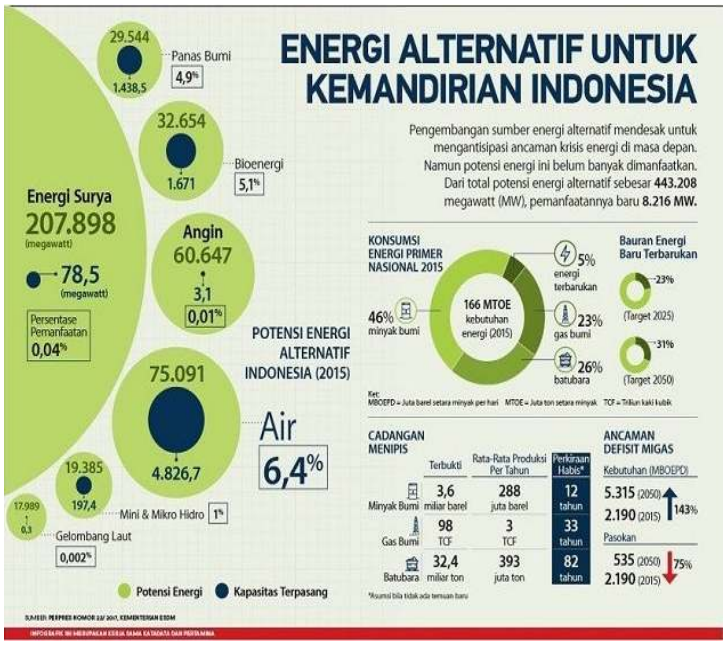

III. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Letak geografis Kalbar tepat berada di garis Kathulistiwa, hal ini menguntungkan bagi pengembangan PLTS. Dalam pemanfaatan potensi energi matahari untuk pembangkit listrik biasanya menggunakan satuan kWh/m2 day, sehingga diperoleh nilai radiasi matahari di Kalbar antara 3.96 - 5.25 kWh/m2 day. Energi tersebut apabila digunakan untuk menyalakan lampu 20 watt mampu menghidupkan antara 19 – 26 buah lampu dengan asumsi pemakaian 10 jam/hari dan menggunakan solar panel seluas 1 m2. Upaya pengembangan PLTS diharapkan melalui Dana Desa dan DAK Fisik khususnya untuk alokasi Bidang Energi Skala Kecil.

IV. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Badan Tanaga Nuklir Nasional (Batan) memastikan 70 ribu ton cadangan bahan energi uranium dan 210 -280 ribu ton thorium tertanam di bumi Indonesia. Cadangan tersebut bahkan bisa untuk kebutuhan listrik selama 2.000 tahun. Kalbar menjadi salah satu wilayah yang dengan cadangan uranium dan thoriumnyanya paling potensial, terbesar dengan jumlah 25.436 ton (data Mei 2014) yang tersebar di wilayah Kabupaten Melawi dan Ketapang.

Listrik dari PLTN sangat mendesak bagi Indonesia, dengan prinsip keamanan yang sangat tinggi maka pembangunan PLTN sangat memungkinkan dibangun pada salah satu pulau kecil di Kalbar mengingat besarnya uranium dan ditunjang oleh keuntungan Kalbar yang tidak pernah mengalami bencana alam besar yang kemungkinan akan merusak bangunan reaktor nuklir seperti gempa bumi. Untuk merealisasikan diperlukan regulasi daerah, melakukan percepatan agar tersusunnya rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dengan tujuan terjadi sinkronisasi, harmonisasi, serta keterpaduan antara RUED dengan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023.

b. Wilayah Perbatasan

I. Jalan Paralel Perbatasan

Pada tahun 2016 Provinsi Kalbar telah terhubung melalui jalan darat dengan Provinsi Kalimantan Tengah maka sejak saat itu seluruh wilayah di Pulau Kalimantan telah terhubung melalui jalan Trans Kalimantan. Selanjutnya program pembangunan infrastruktur pemerintah adalah membangun jalan pararel perbatasan Kalimantan sepanjang 1.920 Km yang tersebar pada wilayah Provinsi Kalimantan Utara sepanjang 827 Km, Kalimantan Timur 243 Km dan Kalimantan Barat 849 Km dengan pelaksanaan pembangunan selesai seluruhnya ditargetkan pada tahun 2019.

Jalan pararel perbatasan ini bernilai sangat strategis diantaranya fungsi pertahanan dan keamanan untuk menjaga keutuhan NKRI, dimana akan mempersingkat mobilisasi baik personil maupun peralatan militer di sepanjang perbatasan sekaligus juga mempermudah pengawasan patok perbatasan. Manfaat ekonomi diantaranya membuka dan menumbuhkan perekonomian wilayah perbatasan demi percepatan pemerataan hasil pembangunan, selanjutnya juga sebagai jalan penghubung untuk melengkapi pembangunan

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau Kabupaten Putussibau.

	Panjang (Km)	Penanganan TA 2016 (Km)			Penanganan TA 2017 (Km)			Rencana 2018 (Km)
		Pemb. Baru	Jalan Tembus	Belum Tembus	Pemb. Baru	Jalan Tembus	Belum Tembus	Jalan Tembus
Jalan Perbatasan	1.920,1	96,8	1.436,1	483,9	146,0	1.638,6	337,7	1.920,1

Pemerintah Daerah diharapkan melakukan promosi serta berusaha menarik investor perusahaan perkebunan/kehutanan besar terutama kelapa sawit untuk membangun kawasan industri kelapa sawit terpadu di daerah perbatasan yang selama ini terisolir dengan memanfaatkan kemudahan akses transportasi.

II. Pos Lintas Batas Negara (PLBN)

Membangun Indonesia dari pinggiran dan menjadikan batas wilayah negara sebagai halaman muka, dilakukan dengan membangun PLBN menjadi lebih representatif. Hingga saat ini di wilayah Kalbar telah beroperasi 3 (tiga) PLBN, 1 (satu) sedang dibangun dan 1 (satu) sudah masuk tahap lelang Detail Engineering Design (DED) :

No.	PLBN	Biaya	Keterangan
1	ARUK, Kab. Sambas	Tahap I Rp131,13 miliar	Operasional
2	ENTIKONG, Kab.Sanggau	Konstruksi Rp152,49 miliar, Terminal Barang (dry port) Rp143,9 miliar, Tahap II (pasar tradisional, toko serba ada, dan ruang terbuka hijau) Rp421 milyar	Operasional
3	NANGA BADAU, Kab. Kapuas Hulu	Tahap I Rp153 miliar	Operasional
4	JAGOI BABANG, Kab.Bengkayang	Nilai Paket Rp179,11 miliar	Rencana diresmikan Agustus 2019
5	SEI KELIK/JASA, Kab. Sintang		Rencana

Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai pintu gerbang masuk ke Indonesia yang membanggakan namun juga sebagai pusat ekonomi baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan, yang dilengkapi dengan pasar dan juga terminal barang (dry port). Khusus untuk PLBN Entikong pada saat ini sedang diupayakan menjadi pelabuhan darat internasional. hal ini akan mendorong ekspor

langsung ke Malaysia yang selama ini tidak bisa dilakukan, dimana potensi ekspor diantaranya adalah Crude Palm Oil (CPO), buah-buahan, beras dan cabai serta komoditas unggulan Kalbar lainnya. Khusus ekspor langsung CPO maka nantinya bagi hasil pajak ekspor CPO akan dinikmati Provinsi Kalbar karena selama ini ekspor CPO melalui pelabuhan di luar Kalbar dimana bagi hasil pajak ekspor CPO selama ini dinikmati oleh wilayah lain. Pemprov Kalbar diharapkan segera mendorong persiapan penetapan regulasi yang jelas tentang perdagangan ekspor-impor yang menggunakan pelabuhan darat serta penetapan kode pelabuhan yang menjadi syarat untuk aktivitas perdagangan luar negeri.

B. Tantangan Fiskal Regional

Tujuan Negara Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-empat salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Pemerataan kesejahteraan merupakan salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan amanat UUD tahun 1945 tersebut.

Pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui pemerataan kesejahteraan adalah dengan angka gini ratio yang dikeluarkan oleh BPS setiap tahunnya. Gini ratio adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan secara menyeluruh, dan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Semakin besar nilai gini ratio maka semakin besar pula ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat sementara semakin rendah gini ratio maka pemerataan kesejahteraan pada masyarakat semakin baik. Angka gini ratio Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2014 sampai tahun 2018 cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat melalui grafik berikut:

Grafik V.
Gini Ratio Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018

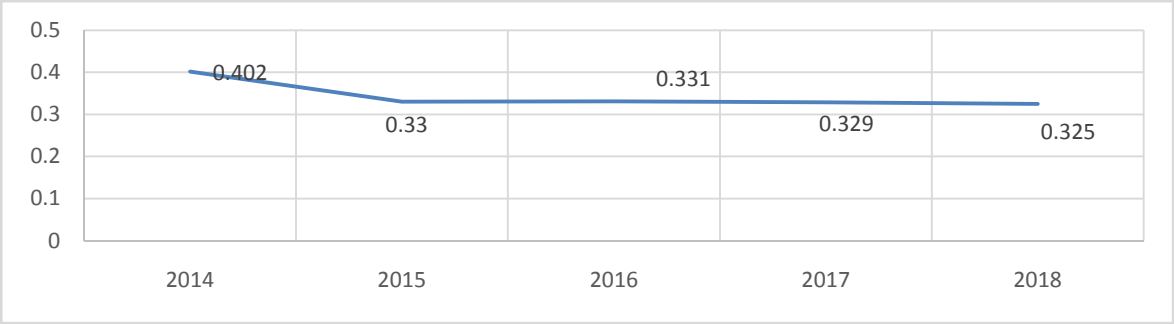

Sumber: BPS Kalbar diolah

Salah satu kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggunakan menyalurkan APBN dan APBD dalam bentuk belanja pemerintah. Belanja Pemerintah terrdiri dari berbagai jenis belanja dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga. Pada teori agensi di sektor publik, kinerja pemerintah dinilai melalui anggaran yang dibuatnya, sehingga diharapkan pengeluaran pemerintah yang menyentuh pada fungsi pelayanan kepada masyarakat, yang berwujud dalam belanja modal, harus mendapatkan porsi yang relatif besar (Halim, 2014:226).

Belanja modal menurut Halim (2008:4) adalah investasi baik berupa pengadaan atau pembelian aset yang memiliki masa manfaat dua belas bulan dan aset ini digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial, dan manfaat lain, sehingga meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Investasi untuk memenuhi kepentingan layanan publik memiliki jenis yang berbeda. Pengalokasian belanja modal harus melalui pertimbangan, perkiraan, dan perhitungan yang panjang. Hal tersebut dikarenakan belanja modal membutuhkan biaya yang cukup besar dan pengembalian dalam jangka waktu yang tidak sebentar (Badrudin, 2012:65). Selain itu, belanja modal tersebut diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Halim (2014:225) menyatakan apabila pemerintah Indonesia mampu menggunakan belanja modal secara bijaksana, maka diharapkan akan memberikan efek multifier dalam perekonomian nasional.

Belanja Modal yang ada pada Provinsi Kalimantan Barat terdapat dua jenis yaitu Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Belanja Modal Pemerintah Pusat. Tabel di bawah menunjukkan perkembangan Belanja Modal yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014-2018.

Grafik V.
Perkembangan Belanja Modal Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018
(Miliar Rupiah)

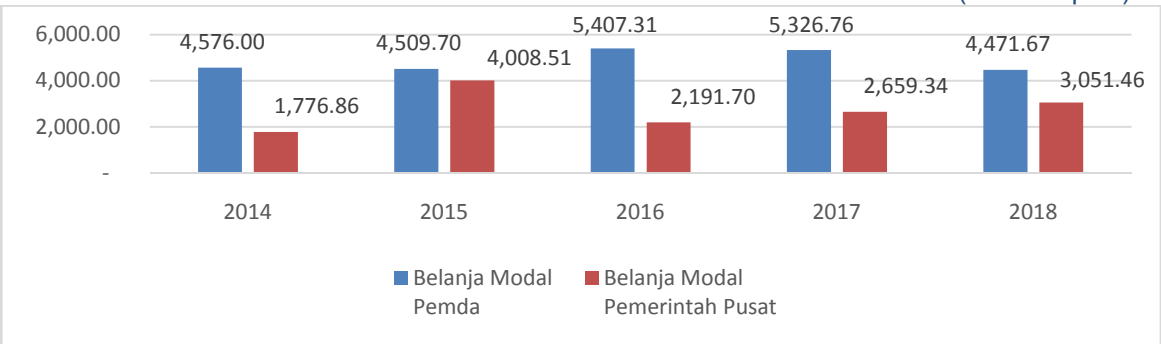

Sumber: SIKD, OMSPAN dan MONEV PA diolah

Soepangat (1991:52) menyatakan bahwa peningkatan belanja modal yang menyebabkan peningkatan penyediaan layanan barang dan jasa publik kepada masyarakat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan karakteristik belanja modal di atas maka akan dilakukan pengujian atas pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Belanja Modal Pusat terhadap Gini Ratio pada Provinsi Kalimantan Barat. Data yang digunakan adalah data APBN dan APBD TA 2014-2018 dan data kesejahteraan dari BPS.

Tabel V.6
Hasil Regresi

Variabel	Koefisien	*Adjusted R Square*
Belanja Modal Pemda	-0,00004579	0,5170
Belanja Modal Pusat	-0,00003407	0,5170

Sumber: hasil sendiri 2018

Angka *Adjusted R Square* yang menunjukkan 0,517 menunjukkan bahwa Belanja Modal Pemda dan Belanja Modal Pemerintah Pusat secara bersama-sama dapat menjelaskan Gini Ratio sebesar 51,70 persen, sementara sisanya 48,30 persen dijelaskan oleh faktor lain.

1. **Belanja Modal Pemerintah Daerah**

   Belanja Modal Pemerintah Daerah memiliki pengaruh yang negative terhadap *Gini ratio* dengan koefisien -0,00004579. Angka ini berarti bahwa setiap kenaikan Belanja Modal Pemerintah daerah sebesar Rp 1 triliun maka akan terjadi penurunan *Gini Ratio* sebesar 0,045.

2. Belanja Modal Pemerintah Pusat

Belanja Modal Pemerintah Pusat memiliki pengaruh yang negatif terhadap Gini Ratio dengan koefisien -0,00004579. Angka ini berarti bahwa setiap kenaikan Belanja Modal Pemerintah Pusat sebesar Rp 1 triliun maka akan terjadi penurunan *Gini Ratio* sebesar 0,034.

Belanja modal berpengaruh negatif terhadap *Gini ratio* Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini sejalan dengan teori-teori yang menyatakan bahwa belanja modal pemerintah akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Seperti Mardiasmo 2002 yang mengatakan peningkatan Pemda dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD.

Hasil perhitungan statistik di atas mengindikasikan bahwa pengelolaan belanja modal benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat telah melaksanakan amanat sesuai dengan yang diamanatkan kepadanya. Yaitu, untuk melayani masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengelola belanja pemerintah khususnya belanja modal, mengingat belanja ini berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka, pemerintah benar-benar harus mempertimbangkan secara matang dan dengan penuh perhitungan agar alokasi belanja yang dicanangkan berdampak pada masyarakat. Salah satunya, dengan terus meningkatkan proporsi alokasi belanja modal lebih tinggi dari belanja-belanja lainya yang ada struktur APBN dan APBD. Dengan kata lain, pemerintah harus menjadikan belanja modal sebagai belanja prioritas dari belanja-belanja lainnya. Harapanya, dengan penambahan proporsi belanja modal akan memberikan kesempatan yang lebih banyak untuk melaksanakan program-program kegiatan yang sifatnya jangka panjang. Karena hal tersebut memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB VI
ANALISA TEMATIK

Makan Saprahan

BAB VI - ANALISIS TEMATIK

KONTRIBUSI DAN TANTANGAN DANA DESA DALAM UPAYA UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN DI DAERAH

Salah satu usaha Pemerintah dalam melakukan pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia diwujudkan melalui Dana Desa yang dialokasikan khusus dalam APBN dengan semangat membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.

Kawasan perdesaan merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Pembangunan kawasan perdesaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kawasan perdesaan diartikan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta, sementara itu pada tahun 2018 tetap sebesar Rp60 triliun dan pada tahun 2019 menjadi Rp70 triliun.

Sementara itu perkembangan pagu dan realisasi Dana Desa di wilayah Propinsi Kalbar adalah sebagai berikut :

Tabel VI.1
Alokasi dan Realisasi Dana Desa Provinsi Kalbar Tahun 2017-2019

(miliar rupiah)

No	Nama Pemda	Jumlah Desa	2017		2018		2019
			Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu
1	Kab. Kubu Raya	117	98.33	98.33	111.50	110.33	134.45
2	Kab. Mempawah	60	51.32	51.32	55.23	55.23	66.55
3	Kab. Bengkayang	122	96.74	96.74	92.40	92.40	106.55
4	Kab Sambas	193	153.42	153.19	172.84	172.84	204.98
5	Kab. Sanggau	163	130.04	130.04	128.78	128.48	149.86
6	Kab. Landak	156	128.08	128.08	154.16	154.16	185.37
7	Kab. Sekadau	87	71.02	71.02	69.08	68.76	81.17
8	Kab. Kayong Utara	43	38.67	38.67	39.86	39.86	48.68
9	Kab. Ketapang	253	203.51	202.88	217.29	217.29	255.83
10	Kab. Kapuas Hulu	278	218.41	218.41	228.93	228.93	268.12
11	Kab. Sintang	390	294.28	294.28	294.87	294.72	338.48
12	Kab. Melawi	169	132.91	132.91	130.91	130.91	152.53
Jumlah		2031	1,616.73	1,615.86	1,695.86	1,693.92	1,992.57

Sumber: Omspan (diolah)

Selama 4 (empat) tahun mendapatkan kucuran dana yang tidak sedikit diharapkan membawa perubahan baik pembangunan fisik maupun pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

1. **Kontribusi Dana Desa Dalam Upaya Untuk Mendorong Pertumbuhan Dan Pemerataan Di Daerah**

   a. **Indeks Pembangunan Desa (IPD)**

Salah satu indeks untuk mengukur hasil pembangunan Desa yang dikembangkan oleh Bappenas dan Badan Pusat Statistik adalah Indeks Pembangunan Desa (IPD) dimana terdapat lima dimensi untuk mengukurnya, yakni pelayanan dasar, kondisi nfrastruktur, transportasi, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintah desa yang dijabarkan dalam 42 indikator.

IPD menunjukkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa, dengan skala 0-100. IPD menunjukkan perkembangan desa dengan status tertinggal (kurang dari atau sama dengan 50 poin), berkembang (lebih dari 50 poin, namun kurang dari atau sama dengan 75 poin) dan mandiri (lebih dari 75 poin).

Data perkembangan Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Kalbar adalah sebagai berikut :

Tabel VI.2
Perkembangan Indeks Pembangunan Desa Provinsi Kalbar Tahun 2014 dan Tahun 2018

Propinsi	IPD			Demensi Pelayanan Dasar			Demensi Kondisi Infrastruktur		
	2014	2018	%	2014	2018	%	2014	2018	%
Kalimantan Barat	49.85	53.10	0.07	47.79	48.58	0.02	31.25	35.81	0.15

Propinsi	Demensi Transportasi			Demensi Pelayanan Umum			Demensi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	2014	2018	%	2014	2018	%	2014	2018	%
Kalimantan Barat	69.07	70.59	0.02	54.50	55.47	0.02	58.49	71.56	0.22

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Dari tabel diatas diketahui bahwa IPD Kalbar selama kurun waktu 4 (empat) tahun telah mengalami peningkatan 0,07 persen dengan kenaikan terbesar pada demensi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa hingga 0,22 persen. Kenaikan ini tentunya akan berpengaruh pada penggolongan atau tipologi desa.

Tabel VI.3
Perkembangan Tipologi Desa Provinsi Kalbar Tahun 2014 dan Tahun 2018

Provinsi	Tipologi Desa Tahun 2014 dan Tahun 2018			
	2014			
	Tertinggal	Berkembang	Mandiri	Jumlah Desa
Kalimantan Barat	965 Desa (50.58%)	921 Desa (48.27%)	22 Desa (1.15%)	1,908
	2018			
	813 Desa (39.89%)	1.165 Desa (57.16%)	60 Desa (2.95%)3	2,038
Kenaikan (%)	**-21.13**	**18.42**	**156.52**	

Sumber: BPS Kalbar (diolah)

Perubahan tipologi desa menjadi sangat penting karena menunjukan tingkat keberhasilan pembangunan Desa, dari tabel diatas diketahui bahwa selama kurun waktu 4 (empat) tahun telah terjadi peningkatan Desa Mandiri hingga 156,62 persen. Program pemerintah Dana Desa di wilayah Provinsi Kalbar sejak tahun 2015 diduga membawa pengaruh terhadap pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat pedesaan sehingga dapat meningkatan tipologi Desa Mandiri hingga mencapai 156,62 persen.

b. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan sebagaimana tertuang dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 (RPJMN 2015 – 2019), yakni mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 5000 Desa dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 Desa pada tahun 2019. Sasaran pembangunan tersebut memerlukan kejelasan *lokus* (Desa) dan status perkembangannya. Indeks Desa Membangun tidak hanya berguna untuk mengetahui status perkembangan setiap Desa yang lekat dengan karakteristiknya, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai instrumen untuk melakukan targeting dalam pencapaian target RPJMN 2015 – 2019 dan koordinasi K/L dalam pembangunan Desa.

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi Desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap Desa dalam rentang skor 0,27 –0,92. Indeks Desa Membangun merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. IDM didasarkan pada 3 (tiga) dimensi tersebut dan dikembangkan lebih lanjut dalam 22 Variabel dan 52 indikator.

Dengan nilai rata – rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1.Desa Sangat Tertinggal : <0,491,

2.Desa Tertinggal : >0,491 dan <0,599

3.Desa Berkembang : >0,599 dan <0,707

4.Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815

5.Desa Mandiri : > 0,815

Tabel VI.4
Perkembangan Indeks Desa Membangun Provinsi Kalbar

Tahun	Wilayah	IDM	Maju		Mandiri		Berkembang		Teringgal		Sangat Tertinggal		Jumlah Desa
			Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	
2015	Kalbar	0.499	-	-	30	1.49	225	11.2	752	37.4	1,002	49.9	2,009
	Rata-Rata Nasional	0.566	174	0.24	3.608	4.89	22.882	31,0	33.592	45.57	13,453	18,25	73,709
2016	Kalbar		-	-	30	1.52	230	11.63	758	38.34	959	48.51	1,977
2018	Kalbar		1	0.05	53	2.61	372	18.32	928	45.69	677	33.33	2,031

Sumber: Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnmigrasi (diolah) 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa telah terjadi peningkatan status desa di wilayah Provinsi Kalbar dimana pada tahun 2018 terdapat 1 Desa Maju, menjadi 53 Desa Mandiri serta Desa dengan status sangat tertinggal berkurang hanya tinggal 33,33 persen dari semula tahun 2015 masih sebesar 49,90 persen. Peningkatan dan perkembangan status Desa di Kalbar beberapa tahun terakhir dikarenakan perbaikan pada pertumbuhan dan pemerataan hasil – hasil pembangunan di Desa, hal ini diduga sebagai kontribusi yang bagus dari kucuran Dana Desa yang selalu meningkat setiap tahunnya.

c. Hubungan Realisasi Dana Desa Dengan Penduduk Miskin dan Gini Ratio Pedesaan

Sebagai salah satu indikator untuk melihat hasil pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di pedesaan, digunakan angka gini ratio pedesaan dan persentase penduduk miskin pedesaan. Untuk melihat hubungan realisasi penyaluran Dana Desa dengan gini ratio pedesaan dan persentase penduduk miskin pedesaan digunakan regresi sederhana dengan menggunakan data empat tahun terakhir yaitu tahun 2015 sampai tahun 2018. Analisis regresi ini menghasilkan data perhitungan sebagai berikut:

Tabel VI.5
Statistik Regresi Dana Desa dengan Gini Ratio Pedesaan

Indikator	Dana Desa
R Square	0,158699323
Koefisien	-4,03195405936097E-15
P-Value	0,601629164

Sumber: BPS diolah 2019

Nilai R square 0,15 menunjukkan bahwa variabel Dana Desa dapat menjelaskan variabel Gini Ratio Pedesaan sebesar 15 persen. Koefisien X = -4,031 E^{-15} menunjukkan setiap kenaikan dana desa sebesar satu triliun rupiah akan menurunkan gini ratio pedesaan sebesar 0,0040. Dengan nilai Dana Desa sebesar Rp1,69 Triliun pada tahun 2018, telah memberikan kontribusi terhadap penurunan gini ratio pedesaan. Nilai dana desa diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun agar kontribusi terhadap penurunan gini ratio pedesaan juga semakin signifikan.

Tabel VI.6
Statistik Regresi Sederhana Dana Desa dengan Angka Kemiskinan Desa

Indikator	Dana Desa
R Square	0,65623592
Koefisien	-1,85839539184222E-08
P-Value	0,189916103

Sumber: BPS diolah 2019

Nilai R square 0,65 menunjukkan bahwa variabel Dana Desa dapat menjelaskan variabel Angka Kemiskinan Desa sebesar 65 persen. Koefisien X = -1,858 E^{-8} menunjukkan setiap kenaikan dana desa sebesar satu triliun rupiah akan menurunkan angka kemiskinan desa sebesar 18.584 jiwa. Kontribusi setiap kenaikan Dana Desa sebesar 1 triliun rupiah yang menurunkan lebih dari 6 persen jumlah penduduk miskin di desa menunjukkan bukti nyata dari keberhasilan Dana Desa di Provinsi Kalbar.

2. Tantangan Dana Desa Dalam Upaya Untuk Mendorong Pertumbuhan Dan Pemerataan Di Daerah

Untuk mencapai hasil pertumbuhan serta pemerataan pembangunan di daerah pedesaan khususnya yang bersumber dari penyaluran Dana Desa tentunya tidak terlepas dari tantangan dalam penyaluran Dana Desa yang efektif dan tepat sasaran demi hasil pertumbuhan dan pemerataan daerah, hal ini berkaitan dengan pencapaian beberapa target yang optimal, diantaranya :

a. Provinsi Kalbar Targetkan 400 Desa Mandiri

Dalam 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan terbentuknya 400 Desa Mandiri, walaupun di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalbar hanya 63 Desa Mandiri. Untuk mewujudkan hal ini telah diterbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat No.1 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

Strategi yang dilaksanakan adalah melalui pembagian sumber pendanaan bagi pengembangan dan perbaikan pada 50 indikator pada Indeks Desa Membangun (IDM), dengan pembagian 10 indikator pada dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten, 20 indikator dana Aspirasi DPRD dan 20 Indikator pada APBD Provinsi. Bahkan ke depan 20 persen dana untuk belanja langsung itu dialokasikan untuk mendukung program desa mandiri, selanjutnya juga dilakukan kerjasama dengan dengan Polri dan TNI melalui program TNI Manunggal Masuk Desa.

b. Realisasi Dana Desa mencapai 100 persen

Selama 2 (dua) tahun terakhir realisasi Dana Desa di Provinsi Kalbar tidak mencapai 100 persen, pada tahun 2017 sisa dana pada RKUN adalah sebesar Rp867 juta dan pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp1.628.684.500 yang tersebar pada 4 (empat) kabupaten (5 desa), diantara penyebabnya adalah kasus hukum yang menimpa Kepala Desa. Perlu dilakukan peningkatan sinergi yang optimal dari seluruh stakeholder yang terkait sehingga pada tahun 2019 realisasi Dana Desa mencapai 100 persen .

c. Tantangan

i. Sumber Daya Manusia

Kualitas aparatur Desa masih menjadi titik perhatian di dalam program Dana Desa, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa agar menjadi lebih memahami tentang regulasi dan dapat memperbarui informasi kebijakan-kebijakan sehingga terjadi kelancaran penyaluran dan tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan dimana pada akhirnya diharapkan program Dana Desa berhasil membawa pertumbuhan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.

Kebijakan yang perlu dilakukan adalah terjadinya peningkatan sinergi seluruh pihak penyelenggara peningkatan kapasitas dan pengelolaan Dana Desa seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Daerah berada pada koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa Provinsi Kalbar sehingga diharapkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan Dana Desa bisa lebih terkoordinasi, tersedianya database kapasitas aparatur Desa dan lebih efektif hasil penyelenggaraanya.

ii. Sebagai Penggerak Perekonomian Daerah

Jumlah Dana Desa selama 4 (empat) tahun yang disalurkan ke Provinsi berjumlah Rp5,09 triliun, melalui analisa diatas dihasilkan perhitungan bahwa Dana Desa telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin pedesaan. Data sementara melalui OMSPAN juga menunjukan selama tahun 2018 melalui Dana Desa diantaranya telah dilakukan pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan Desa mencapai 2.067 KM, pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jembatan sebanyak 6.803 jembatan dan untuk pemberdayaan masyarakat berupa pembentukan BUMDes sebanyak 293. Dapat dikatakan bahwa Dana Desa berpotensi sanagat besar sebagai penggerak perekonomian daerah.

Kebijakan yang perlu dilakukan diantaranya adalah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yaitu diantaranya untuk pemberdayaan masyarakat, BUMDes adalah salah satu solusi untuk peningkatan perekonomian Desa hal ini dapat dicapai dengan pembentukan BUMDes pada setiap Desa dengan ditunjang oleh dukungan permodalan melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR). Diperlukan komitmen yang kuat dari Bank Penyalur KUR agar mendukung pengembangan BUMDes. Selanjutnya penggunaan Dana Desa diarahkan sebagian alokasi penggunaanya untuk pembibitan/penanaman tanaman pangan, tanaman keras dan pengelolaan usaha hutan seperti durian dan karet, pada gilirannya untuk pengelolaan dan pengolahan hasil produksi akan dilakukan dan dikelola melalui BUMDes. Kebijakan ini juga berkaitan dengan usaha untuk pelestarian lingkungan melalui penanaman/penghijauan hutan.

BAB VII
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sungai Kapuas

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis di bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2018 sebesar 5,06 persen mengalami penurunan jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang sebesar 5.17, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5.17 persen disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan pada sektor kontruksi dan sektor informasi dan komunikasi;
2. Struktur perekonomian yang menopang ekonomi Kalbar didominasi oleh 4 (empat) sektor lapangan usaha yaitu : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (20,33 persen), industri pengolahan (16,08 persen) perdagangan besar-eceran serta reparasi mobil, sepeda motor (14,09 persen), kontruksi (12,50 persen);
3. Dana Investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Luar Negeri (PMA) di Kalimantan Barat pada tahun 2018 belum sesuai dengan target RPJMD Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan sebesar sebesar Rp19,51 triliun. . Hal ini disebabkan adanya fluktuasi nilai tukar USD yang dipicu oleh kenaikan suku bunga AS dan penguatan USD di pasar global, dan terjadinya negatif neraca perdagangan sedangkan sisi lain bahwa proyek-proyek strategis nasional di Kalimantan Barat sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga tambahan realisasi investasi tidak terlalu besar pada tahun 2018;
4. Inflasi tahunan Kalbar 2018 sebesar 3.99 persen atau meningkat dibanding periode yang sama tahun 2017 yang mencapai 3,83 persen tetapi masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional yang sebesar 3.13 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni 1.44 persen dan Desember 1.28 persen. Kenaikan pada bulan-bulan tersebut terutama dipicu oleh Peningkatan tarif angkutan udara terjadi pada akhir tahun sebagaimana pola historisnya sebagai dampak meningkatnya jumlah penumpang di akhir tahun;
5. Pergerakan nilai tukar rupiah pada awal tahun 2018 melemah pada angka Rp13.413,- per *US Dollar* dan terus menunjukan pelemahan sampai dengan bulan Oktober sudah menyentuh pada level Rp15.227,- per *US Dollar*, namun kembali penguatan pada akhir tahun 2018 mencapai di angka Rp14.339,-per *US Dollar.* Pelemahan nilai tukar Rupiah ini disebabkan oleh kondisi ekonomi global dari pada dalam negeri, situasi ini sangat

dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian AS terkait kenaikan suku bunga acuan The Fed Fun Rate sebanyak dua kali di tahun 2018;

6. Dari sisi belanja negara, alokasi anggaran untuk Provinsi Kalimantan Barat TA 2018 yaitu sebesar Rp30,73 triliun yang terbagi dalam belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp11,13 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp19,60 triliun. Realisasi Belanja pemerintah pusat sebesar Rp10,36 triliun. Sedangkan untuk transfer ke Daerah dan dana desa terealisasi Rp19,28 triliun;
7. Pendapatan negara terealisasi Rp8,23 triliun atau 95 persen dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat 1,44 triliun atau 21,30 persen dibanding pendapatan tahun 2017. Penerimaan perpajakan masih menjadi sumber utama pendapatan negara dengan kontribusi sebesar 82,87 persen. Realisasi pajak tahun 2018 sebesar Rp6,82 triliun terdiri pajak dalam negeri sebesar Rp6,41 triliun dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp409,75 miliar;
8. penerimaan Pajak Dalam Negeri tahun 2018 sebesar Rp6,41 triliun mengalami kenaikan Rp536,02 miliar atau 9.12 persen jika dibandingkan penerimaan tahun sebelumnya. Seiring dengan perekonomian yang tumbuh positif Pajak Pertambahan Nilai (PPn) merupakan penyumbang penerimaan yang terbesar yakni Rp3.05 triliun atau 47.59 persen, dan selanjutnya Pajak Penghasilan (PPh) yakni Rp3,02 triliun atau 47.15 persen;
9. Penerimaan PNBP selama tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp240,36 miliar atau 38.69 persen. Pendapatan PNBP BLU memberikan kontribusi 55.05 persen dari total penerimaan PNBP. Penerimaan PNBP BLU meningkat cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 592 persen dikarenakan telah ditetapkannya Universitas Tanjungpura Pontianak sebagai satker BLU;
10. Pembangunan infrastruktur terutama jalan terus ditingkatkan untuk mempermudah akses transportasi, karena kawasan perbatasan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, sehingga dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat;
11. Pendapatan Pemerintah Daerah provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 sebesar Rp 24.229,52 miliar mengalami peningkatan sebesar 4,36% dibanding tahun sebelumnya dan Belanja Pemerintah Daerah sebesar Rp 23.458,17 miliar meningkat sebesar 1,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan Pembiayaan sebesar Rp 445,75 miliar mengalami kenaikan sebesar 30,32%;
12. Pada tahun 2018 pendapatan konsolidasian pemerintah daerah provinsi Kalimantan Barat mencapai 9.942,14 miliar, naik 9,25% dari tahun lalu. Belanja Konsolidasi sebesar

32.093,24 miliar. Angka ini turun 1.11 persen dari tahun 2017. Sedangkan Pembiayaan Konsolidasian sebesar Rp 445,75 miliar berkurang sebesar 21,21 %;

13. Belanja Modal yang disalurkan oleh Pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap penurunan angka *Gini Ratio* Provinsi Kalimantan Barat;
14. Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi pada bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Hasil pertanian berupa Kelapa Sawit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai NTP Provinsi Kalbar;
15. Dana Desa memiliki pengaruh positif terhadap penurunan Gini Ratio Pedesaaan dan jumlah Penduduk Miskin Pedesaan.

B. REKOMENDASI

1. Pemerintah Daerah tetap mengupayakan peningkatan alokasi belanja pada jenis belanja dan meningkat investasi pada sektor-sektor yang belum atau kurang memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tahun 2018 terutama pada sektor kontruksi dan sektor informasi dan komunikasi yang mengalami penurunan sangat tajam pada periode ini, meskipun secara umum target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat bisa dikatakan masih stagnan dan belum memberikan kontribusi PDRB secara maksimal yang hanya sebesar 1,31 persen terhadap pembentukan PDB nasional diharapkan untuk berikutnya lebih meningkat dibanding tahun ini;
2. Pemerintah daerah harus berkonsentrasi terhadap gejolak kenaikan harga terutama pada masa-masa libur panjang sekolah dan peringatan hari besar keagamaan, sebagai upaya untuk pengendalian inflasi di Kalimantan Barat, forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar terus melakukan upaya stabilisasi harga, dalam jangka pendek antara lain melakukan sidak gudang dan pasar untuk memastikan kecukupan stok dan kelancaran aliran distribusi bahan pangan dan disisi lain mengimplementasikan program informasi harga secara online (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Enggang dan GENCIL setiap Kab/Kota) guna memudahkan masyarakat mengetahui informasi harga pangan di berbagai pasar di kabupaten/kota se-Kalimantan Barat;
3. Upaya yang perlu ditingkatkan dalam menggali Dana Investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Luar Negeri (PMA) di Kalimantan Barat diantaranya mengisentifkan program pendampingan bagi perusahaan yang memerlukan bimbingan langsung terkait penyusunan LKPM, Layanan informasi dan pengaduan masyarakat di bidang Penanaman Modal;

4. Indek Pembangunan Manuasia (IPM) Kalimantan Barat tahun 2017 termasuk kategori sedang dan berada pada urutan ke-30 dari 34 Provinsi. Hal ini menunjukan bahwa pembangunan manusia masih belum memenuhi harapan, peningkatan terhadap indikator penting pembangunan terutama dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan serta standar hidup layak harus ditingkatkan. Peningkatan investasi dari Pemerintah Pusat yang berupa alokasi Dana Transfer khususnya DAK Fisik dan Dana Desa diharapkan benar-benar dapat digunakan pada sektor-sektor program pembangunan manusia yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat, terutama pada tingkat IPM yang terandah di Kalimantan Barat yang selama ini selalu ditempati oleh Kabupaten Kayong Utara sebesar (61,52) dan Kabupaten Sekadau (63,04);
5. Penurunan nilai tukar Rupiah ini disebabkan oleh kondisi ekonomi global dari pada dalam negeri, situasi ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian AS terkait kenaikan suku bunga acuan The Fed Fun Rate sebanyak dua kali di tahun 2018. Untuk melindungi fundamental ekonomi domestik, pemerintah agar mengambil beberapa keputusan atau kebijakan salah satunya adalah upaya menyelamatkan defisit neraca perdagangan dengan cara mengurangi impor agar rupiah bisa kembali terdongkrak, adapun kebijakan tersebut berupa penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) komoditas impor;
6. Pemerintah Daerah harus berupaya meningkatan Pendapatan Asli Daerah, dengan menggali potensi sumber daya alam yang ada dan mencari sumber penerimaan pajak dari para investor dengan cara mewajibkan investor memiliki NPWP Kalimantan Barat sebagai dasar pengenaan pajak;
7. Pemerintah hendaknya menambah alokasi Belanja Modal pada Provinsi Kalimantan Barat agar dapat menekan ketimpangan kesejahteraan dalam masyarakat;
8. Lahan-lahan perkebunan kelapa sawit yang sudah ada di Provinsi Kalimantan Barat dapat di intensifikasi untuk lebih menghasilkan panen yang lebih banyak. Pemerintah dapat memfasilitasi proses intesifikasi ini dengan memperbesar porsi PABN maupun APBD pada pos belanja untuk sektor Pertanian dan Perkebunan;
9. Pengaruh positif Dana Desa terhadap penurunan *Gini Ratio* Pedesaan dan jumlah Penduduk Miskin Pedesaan menunjukkan salah satu kesuksesan penyaluran Dana Desa. Agar angka *Gini Ratio* Pedesaaan dan jumlah Penduduk Miskin Pedesaan turun secara konstan maka Pemerintah sebaiknya menambah alokasi Dana Desa pada Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun-tahun yang akan datang;

DAFTAR PUSTAKA

Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN

Halim, Abdul. 2008. *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik-Pemerintahan Daerah.* Penerbit UP AMP YKPN: Yogyakarta.

Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah).* Salemba Empat: Jakarta.

Kalimantan Barat Dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2019

Mardiasmo. 2002. *"Otonomi daerah sebagai upaya memperkokoh basis perekonomian daerah"*, Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel Th. I No.4 Juni 2002. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 *Tentang Pinjaman Daerah*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54/PMK.07/2014 *Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 *Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah*

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2011 *Tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Fungsi Direktorat Sistem Manajemen Investasi Kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2012 *Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum*

Ron Hood, 1998. Economic Analysis: A Location Quotient. Primer.Principal Sun Region Associates, Inc.

Suprapto, Tri. 2006. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2000-2004* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

JEMBATAN TAYAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

JALAN K.S. TUBUN NO. 36 PONTIANAK 78121
TELEPON : (0561) 733444, 733466 FAKSIMILE : (0561) 732029

NOTA DINAS
Nomor ND-168/WPB.17/2019

Yth.	:	Direktur Pelaksanaan Anggaran
Dari	:	Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Barat
Lampiran	:	1 (satu) Berkas
Sifat	:	Segera
Hal	:	Pengantar Kajian Fiskal Regional Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
Tanggal	:	26 Februari 2019

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, bersama ini kami sampaikan bersama ini kami sampaikan Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018. Kajian ini terdiri antara lain:

1. Tinjauan dan Analisis APBN dan APBD tahun 2018 lingkup Provinsi Kalimantan Barat. Analisis yang dilakukan baik dari segi pendapatan maupun belanja serta dampaknya terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang digambarkan dari indikator-indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, dan *Gini Ratio* (tingkat ketimpangan);
2. Untuk mengetahui sektor unggulan daerah dan pengembangan potensi tersebut digunakan analisis metode *Location Quotient (LQ) time series.* Dari analisis ini ditemukan sektor unggulan di Provinsi Kalbar adalah bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
3. Dalam KFR Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 ini terdapat analisis tematik dengan tema "Kontribusi dan tantangan Dana Desa dalam upaya mendorong pertumbuhan dan pemerataan di daerah". Tema ini dipilih dengan melakukan perhitungan menggunakan metode regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh Dana Desa terhadap Angka Penduduk Miskin Pedesaan dan *Gini Ratio* Pedesaan. Hasil analisis yang dilakukan menemukan ada dampak positif dari Dana Desa terhadap penurunan tingkat Angka Penduduk Miskin Pedesaan dan *Gini Ratio* Pedesaan.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

Edward UP Nainggolan
NIP 19710314 199303 1 001